RADIKALISME AGAMA & TANTANGAN KEBANGSAAN

Prolog

Lukman Hakim Saifuddin
Menteri Agama Republik Indonesia

RADIKALISME AGAMA TANTANGAN KEBANGSAAN

Prolog

Lukman Hakim Saifuddin

(Menteri Agama Republik Indonesia)

Diterbitkan

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Kemenag RI Tahun 2014

Kata Pengantar

SEKRETARIS DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt atas rahmat dan inayah-Nya, buku ini dapat diterbitkan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Buku yang diberi judul "Radikalisme Agama dan Tantangan Kebangsaan" ini merupakan kumpulan materi hasil Seminar Nasional tentang Fenomena ISIS bagi NKRI dan Islam rahmatan lil-'alamin tanggal 9 Agustus 2014 yang telah disempurnakan dan dilengkapi dengan tulisan-tulisan lain terkait.

Banyak perspektif dan gagasan menarik dari para nara sumber terkait dengan gerakan radikalisme agama di Indonesia. Oleh karena itu buku ini kami terbitkan dalam rangka menyebarluaskan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya Ditjen Bimas Islam berkontribusi dalam pencegahan munculnya gerakan radikalisme berbasis agama.

Diharapkan buku ini menjadi salah satu rujukan atau bahkan pegangan bagi para penyuluh agama Islam, mubaligh, atau pihak-pihak yang peduli terhadap masalah ini. Buku ini berisi kajian tentang fenomena gerakan radikalisme berbasis agama dan tantangan kebangsaan serta beberapa pemikiran

untuk menjaga keutuhan NKRI dan Islam *rahmatan lil alamin.*

Kepada semua pihak yang terlibat atau berkontribusi dalam penyelesaian buku ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah swt senantiasa meridhai usaha kita semua. Amin.

Wassalam,

Jakarta, November 2014

Sekretaris,

KEMENTERIAN AGAMA
DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT
ISLAM
REPUBLIK INDONESIA

Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, M. Ag.

NIP 196308141990031007

Sekapur Sirih

DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah swt atas karunia yang dilimpahkan kepada kita. Shalawat dan salam kita haturkan ke pangkuan nabi Muhammad saw.

Fenomena gerakan radikalisme berbasis agama belakangan ini menjadi keprihatinan kita semua, baik dalam konteks global maupun Indonesia. Agama yang seharusnya menjadi *drive* atau panduan hidup yang ramah dan toleran justru menjadi pemicu timbulnya kekerasan dan teror. Ini berarti ada kesalahan dalam pemahaman dan implementasi ajaran yang sangat fundamental. Bukankah Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad justru telah membuktikan sebagai agama yang menjunjung tinggi kasih sayang dan sangat menghargai terhadap perbedaan.

Memang dalam penggalan sejarah Islam telah muncul bibit-bibit radikalisme dan hingga saat ini masih terus ada. Namun demikian gerakan itu memiliki arus yang sangat kecil dibandingkan dengan mayoritas muslim dunia. Hanya saja, gerakan ini selalu mencuri momentum dunia, sehingga mendapatkan perhatian publik yang sangat mempengaruhi citra buruk Islam secara umum.

Terkait dengan hal tersebut, kepada seluruh elemen bangsa, khususnya para ulama, penyuluh agama Islam, dan pimpinan agama (masyarakat) pada umumnya harus memiliki kepekaan yang tinggi agar gerakan radikalisme agama tidak tumbuh dan membesar. Jika fenomena ini dibiarkan dan tidak ada upaya untuk mencegah dan ditangani secara holistik dan sinergis antar lembaga terkait, maka sangat mungkin gerakan ini akan membesar dan menjadi ancaman yang serius bagi NKRI dan *Islam rahmatan lil alamin*.

Oleh sebab itu, semua pihak harus mengambil bagian agar gerakan ini tidak menyebar dan merusak tatanan sosial dan kebangsaan kita. Patut kami hargai sekecil apapun peran yang diberikan, termasuk dengan terbitnya buku ini. Saya mengapresiasi terbitnya buku ini, paling tidak sebagai salah satu langkah penting Ditjen Bimas Islam dalam melakukan deradikalisasi.

Akhirnya saya mengucapkan selamat, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dalam rangka menciptakan harmoni umat.

Wassalam,

Jakarta, November 2014

Dirjen,

KEMENTERIAN AGAMA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
REPUBLIK INDONESIA

Prof. Dr. H. M. Machasin, MA

NIP. 195610131981031003

Prolog

Menuju Islam Indonesia yang Ramah dan Moderat

Lukman Hakim Saifuddin
(Menteri Agama Republik Indonesia)

Ketika perang saudara berkecamuk di beberapa negara muslim dan menghiasi berbagai pemberitaan media internasional dan nasional, sebuah pertanyaan besar mengemuka: bagaimanakah masa depan Islam di Indonesia? Akankah bangsa dengan mayoritas umat Islam ini "ikut" terjerumus ke dalam konflik tersebut? Bukan tanpa alasan bahwa pertanyaan tersebut muncul.

Pertama, apa yang terjadi di kawasanTimur Tengah selalu mendapat atensi besar dari berbagai kalangan umat Islam Indonesia. Walhasil, apapun yang terjadi di kawasan Timur Tengah, maka akan memberi dampak, setidaknya mendapat respon. *Kedua,* bahwa konflik yang (kini) terjadi di kawasan Timur Tengah ditengarai telah merembet pada konflik sektarian. Tentu, di tengah atensi besar bangsa Indonesia terhadap apa yang terjadi akan sangat membahayakan jika konflik tersebut ditransformasikan tanpa penyaringan. Artinya, terdapat generalisasi konflik yang dapat menggangu relasi sosial-keagamaan yang telah dibangun selama ini.

Pada saat yang bersamaan, munculnya beberapa kejadian yang "terkesan" intoleran dan gerakan-gerakan radikal di beberapa belahan nusantara, sedikit mengganggu ketenteraman dan citra Indonesia di mata dunia internasional. Kita mencatat beberapa kali media internasional dan lainnya begitu tajam menyoroti kejadian-kejadian intoleran dan radikal yang dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM

dan demokrasi. Tentu, Kementerian Agama bersama Ormas Islam dan tokoh-tokoh agama berada di garis terdepan dalam menangkal berbagai pencitraan negatif yang sangat potensial merusak citra Indonesia.

Munculnya gerakan-gerakan radikal dengan mengatasnamakan agama dan kelompok tertentu telah menimbulkan kerusakan pada tata kehidupan bangsa yang sangat majemuk. Bangsakita lebih mudah curiga terhadap sesuatu "yang berbeda", sesuatu yang dipandang "asing". Bahkan, tak jarang perbedaan yang terkanjur dipandang sebagai "yangasing", secara ekstrem juga disebut sebagia "sesat". Penyebutan diksi "sesat" dan"menyimpang" begitu mudah keluar untuk menyebut relasi sosial yang heterogen ini.

Pertanyaan besarnya adalah, dimanakah letak kerapuhan bangsa ini sehingga radikalisme agama "seperti" menemukan momentumnya untuk tumbuh dan memberi warna dalam kehidupan bangsa Indonesia? Bagaimana radikalisme dapat tumbuh dan menyusup di antara budaya bangsa yang penuh dengan keramahan dan mengedepankan musyawarah? Sepertinya kita harus terus bertanya, mengingat radikalisme dan turunannya begitu sangat nyata menjadi ancaman bagi bangsa ini.

Berbagai analisa mengemuka terkait hal ini. Muncul pandangan bahwa radikalisme agama tumbuh sebagai dampak dari politik global dunia Islam yang terus menerus menjadi obyek adu domba, penindasan dan kesewenang-wenangan. Palestina misalnya, selalu dipandang sebagai wajah dunia Islam yang begitu kuat dicengkraman para kapitalisme. Bahwa rasa solidaritas atas penderitaan umat Islam di beberapa belahan dunia telah melahirkan semangat berbagi rasa. Pada titik inilah kemudian lahir gerakan-gerakan yang mengatasnamakan agama untuk berada di garis konfrontasi dengan dunia Barat.

Pada saat yang bersamaan, radikalisme agama juga terindikasi dipengaruhi konflik sektarian yang memang memiliki kesejarahan dalam perjalanan umat Islam. Konflik

yang kini terjadi di beberapa negara muslim dan melibatkan sesama muslim pula, telah dimaknai sebagai konflik teologis dan beberapa kalangan mencoba menariknya kedalam konteks keindonesiaan. Kelompok ini begitu massif melakukan propaganda dan menggiring opini publik bahwa konflik tersebut adalah jihad dalam memerangi kelompok muslim tertentu.

Kedua hal di atas, tentu harus kita sikapi secara proporsional. Sebagai pelaku dakwah yang telah mewarisi kenegarawanan dari para pendahulu, kita dituntut memiliki sikap yang arif dan bijaksana. Arif dalam artian memahami konflik dan turunannya sebagai dinamika lokalitas, sangat terkait dengan peta perpolitik regional, bijaksana dalam arti tepat mengambil langkah yang efektif dan efisien. Maka, sikap yang harus tumbuh adalah memahami konfik dalam konteks regional dan mengambil sikap proporsional dalam menyikapinya, sehingga tidak menimbulkan ekses negatif, atau setidaknya mencegah konflik masuk dalam tata kehidupan umat Islam di Indonesia.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi strategis sebagai pusat kiblat peradaban Islam di dunia. Keberhasilan Indonesia dalam membangun kerukunan dan berdemokrasi adalah bukti bahwa bangsa Indonesia memiliki kemampuan yang baik dalam pembangunan kualitas kehidupan beragama. Kita boleh berbangga, bahwa Indonesia saat ini menjadi kekuatan penyeimbang dan netral dalam berbagai konflik, baik yang melibatkan antar dunia Islam maupun antara dunia Islam dan Barat. Ini semua diperoleh melalui berbagai usaha yang tak kenal lelah dari seluruh elemen bangsa, khususnya tokoh agama dan Ormas Islam.

Kegigihan para ulama, tokoh agama dan para pejuang kemerdekaan tidak hanya diwujudkan dalam bentuk pengorbanan fisik dan materi atau bahkan nyawa. Lebih dari itu, para pendiri bangsa telah mewakafkan hidup dan pengabdiannya untuk membangun kerukunan bangsa yang

heterogen ini. Mereka telah membuat dasar-dasar negara yang mencerminkan keragaman nusantara, merangkul seluruh perbedaan berada dalam bingkai NKRI.

Tentu, ini semua tidaklah mudah. Bagaimanapun keragaman yang sangat tinggi dan terjadi di semua sektor menjadi faktor besar yangdapat menghambat. Namun, semua itu dapat dilewati dengan sukses melalui komitmen kebangsaan yang menghormati secara penuh segala perbedaan. Maka, lahirnya bangsa Indonesia penuh dengan nilai-nilai kebersamaan, kesatuan dan persatuan. Dan, perbedaan tidaklah menghalangi untuk bersatu dengan tetap menghargai keyakinan dan ijtihadnya masing-masing.

Inilah yang harus dipahami oleh bangsa ini, bahwa komitmen kebersamaan dan mempersempit perbedaan adalah nilai luhur yang juga harus kita pegang dalam membangun bangsa ini. Kini, dengan arus modernitas yang semakin maju serta berbagai tantangan kerukunan yang juga beragam, komitmen kebersamaan dan mempersempit perbedaan sangat relevan untuk dihidupkan kembali. Harapannya adalah, bangsa Indonesia semakin dewasa dan bijak dalam menyikapi perbedaan dan mengdepankan dialog demi memecahkan perbedaan dimaksud.

ISIS dan Isu Radikalisme Modern

Sebagaimana disampaikan oleh Menko Polhukam terkait sikap pemerintah Indonesia atas fenomena ISIS, Kementerian Agama berpandangan bahwa ideologi *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) bertentangan dengan ideologi Pancasila yang dapat mengancam NKRI. Pernyataan ISIS yang mengatakan bahwa Pancasila adalah *thaghut* atau berhala yang harus diperangi, sudah amat kelewat batas. Begitupun, cara-cara radikal dan mengedepankan kekerasan dalam memperjuangkan negara Islam di Iraq dan Suriah, merupakan cermin nyata bahwa organisasi ini berpaham radikal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin.*

Munculnya pemberitaan sebagian umat Islam Indonesia yang mengangkat sumpah dan berjanji setia kepada orang yang disebut Khalifah Daulah Islamiyah, Abu Bakar Al-Baghdadi, tentu menjadi *warning* bagi keberlangsungan kerukunan dan eksistensi NKRI. Bangsa Indonesia telah berpengalaman dalam pengembangan dakwah Islam secara damai, mengajak dan merangkul semua kalangan dengan cara-cara yang baik dan penuh hikmah, bukan dengan menebar ketakutan dan kekerasan. Maka jelaslah, idiologi ISIS sangat bertentangan dengan kesejarahan Islam dan penyebarannya di Nusantara.

Kami bersama para ulama, Ormas Islam dan tokoh-tokoh agama menghimbau kepada seluruh ummat Islam Indonesia untuk meningkatkan kehati-hatian dan memiliki kewaspadaan dalam menyikapi isu gerakan ISIS. Kita berkomitmen bahwa apapun yang berpotensi merusak perdamaian NKRI, harus segera dicegah dan ditangani secara komperehensif.

Dalam menyikapi isu ini, kepada seluruh umat Islam Indonesia dan pimpinan Ormas Islam harus selalu mengedepankan semangat ukhuwah Islamiyah dan kerukunan nasional. Kepada para ulama, kyai, dan tokoh agama kiranya perlu mengintensifkan pembinaan kepada umatnya masing-masing agar masyarakat tidak terprovokasi terhadap isu-isu yang tidak perlu. Umat Islam dan segenap kekuatan bangsa tidak boleh terpecah-belah dan terjebak dalam strategi adu-domba yang dapat merugikan kepentingan umat yang lebih besar. Tentu, untuk menuju ke arah sana, kami sangat berkepentingan menyamakan persepsi guna menentukan langkah-langkah strategis pencegahan ISIS ke depan.

Kementerian Agama senantiasa memegang teguh komitmen kebangsaan dalam bingkai NKRI. Bersama ulama, kami akan terus bersinergi membangun kehidupan keagamaan yang lebih baik, termasuk di dalamnya pencegahan atas potensi radikalisme dan ekstremisme yang dapat merusak citra Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan perdamaian.

Melalui berbagai dialog dan koordinasi antara Kementerian Agama dan Ormas Islam, kami berharap akan diperoleh kesepahaman dan langkah strategis ke depan dalam pencegahan radikalisme, khususnya terkait dengan kemunculan gerakan ISIS. Buku yang ada di tangan pembaca ini adalah satu diantara hasil kajian kami dan akan diteruskan kepada seluruh *stakeholders* di seluruh Indonesia.

Menjadi sebuah tantangan besar bagi bangsa Indonesia guna menjaga kerukunan dan moderasi yang telah dibangun oleh para pendahulu bangsa ini. Indonesia tumbuh sebagai negara besar adalah ditopang oleh kualitas kehidupan beragama yang mengedepankan nilai-nilai moderasi, toleransi, dan persamaan hak. Walhasil, kerukunan menjadi keniscayaan bagi bangsa ini, karena kerukunan merupakan perwujudan kedewasaan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan perbedaan.

Kita harus terjaga dan waspada dari segala bentuk upaya destruktif bagi kerukunan ini. Moderasi Islam yang dikembangkan para tokoh dan pendiri bangsa harus kita jaga dan pertahankan dari segala bentuk upaya perusakan. Kita harus memiliki kewaspadaan dan kepeduliaan untuk terus menjaga kerukunan ini, untuk tidak memberi tempat bagi tumbuhnya radikalisme agama, apapun alasannya. Dan, kita harus terus terjaga akan sikap-sikap negarawan dan moderat sebagai karakter bangsa yang sejak dahulu telah menyatu dalam langkah perjuangan bangsa ini.

Jakarta, November 2014
Menteri Agama,

Lukman Hakim Saifuddin

DAFTAR ISI

1

MEMBEDAH RADIKALISME DALAM ISLAM

Radikalisme agama telah banyak mendapat perhatian dari berbagai sarjana di berbagai belahan dunia. Hal ini tak lepas dari dampak yang ditimbulkan, bahwa radikalisme memunculkan dampak negatif, baik rusaknya tatanan sosial kebangsaan maupun berjatuhannya korban-korban dari masyarakat sipil yang tidak terkait dengan inti permasalahan.

Abdurrahman Mas'ud, profesor dalam Ilmu Sejarah Peradaban Islam dan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, menyatakan bahwa gerakan radikalisme agama dalam beberapa hal dapat mengganggu stabilitas nasional dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setidaknya ada tiga alasan mengapa radikalisme agama ini dapat mengganggu NKRI. *Pertama,* mewarnai/mengganti ideologi negara yang mapan dengan ideologi kelompok tersebut, tanpa mempertimbangkan kepentingan ideologi kelompok lain. *Kedua,* membawa instabilitas/keresahan sosial karena sifatnya yang militan, keras, cenderung anarkis, tidak mau kompromi. *Ketiga,* dampak dari radikalisme dapat mengancam eksistensi kedudukan para elit penguasa.

Menurut Abdurrahman Mas'ud, fenomena radikalisme yang ada di Indonesia sebaiknya disikapi sebagai *wake up call* yang menyadarkan seluruh komponen bangsa untuk melakukan

konsolidasi diri dengan usaha-usaha *early warning system,* pembinaan umat yang lebih efektif serta kerjasama kebangsaan yang lebih kokoh.

Pada dasarnya, radikalisme dan berbagai turunannya, terlepas dari simbol agama apapun yang mereka gunakan merupakan musuh bersama umat beragama. Jika kita telaah lebih dalam, kelompok radikal dan teroris seringkali menempatkan agama sebagai tameng untuk meligitimasi tindakan dan perbuatannya.

Padahal, agama bukan faktor utama yang memicu munculnya gerakan radikalisme dan terorisme. Sebab agama menjadi sumber kebaikan dan kedamaian. Terorisme misalnya, tidak memiliki akar dalam Islam dan semua aksi teror pada dasarnya bukan tindakan keagamaan. Islam sangat keras dalam mengecam terorisme dan ini ada dalam Al-Quran. Maka, ketika agama berlawanan dengan karakter dasar agama itu, berarti agama telah terkontaminasi oleh kepentingan lain di luar agama, seperti kepentingan ekonomi dan politik.[1]

Radikalisme yang menimbulkan sikap ekstremis tersebut pada gilirannya akan memperkeruh suasana bagi keutuhan umat Islam. Ini bisa saja mencoreng kesucian agama yang transenden. Yang paling penting adalah kita harus menjaga sakralitas agama pada satu komitmen, untuk memperteguh keyakinan pada nilai-nilai dasar agama yang paling fundamental. Suasana yang tertekan dan goncangan batin yang begitu mendalam, membuat seseorang yang menganut prinsip radikalisme akan terus berupaya mencari titik temu sebuah kebenaran yang mereka anut. Atas nama agama, seseorang sering mengabaikan dimensi keluhuran kemanusiaan yang menjadi fitrah manusia itu sendiri, sehingga tindakan kekerasan menjadi pilihan yang paling ideal untuk memperkuat jaminan kehidupan selanjutnya.[2]

---

1. Republika.co.id, 31 October 2013

2. Mohammad Takdir Ilahi, "Genealogi Radikalisme Agama," Sinar Harapan, 7 Januari 2014

A. Apa itu Radikalisme?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme adalah paham atau aliran yang menghendaki perubahan sosial dan politik, dengan cara menggunakan tindakan kekerasan sebagai batu loncatan untuk menjustifikasi keyakinan mereka yang dianggap benar. Dari sini, radikalisme bisa dipahami sebagai paham politik kenegaraan yang menghendaki adanya perubahan dan revolusi besar-besaran, sebagai jalan untuk mencapai taraf kemajuan yang signifikan. Definisi yang terakhir ini cenderung bermakna positif yang bisa melahirkan kemajuan besar bagi peradaban dunia. Kecenderungan makna radikalisme yang melahirkan bias politik maupun ekonomi, pada dasarnya tidak lepas dari pandangan para penganutnya, yang memiliki argumentasi berbeda untuk memaknai gerakan radikalisme yang tumbuh pesat di kalangan umat Islam. Tidak heran bila pandangan positif dan negatif terhadap munculnya gerakan radikalisme sangat tergantung pada keyakinan dasar penganutnya.[3]

Pengertian lain mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan radikal atau radikalisme itu adalah prinsip-prinsip atau praktik-praktik yang dilakukan secara radikal. Suatu pilihan tindakan yang umumnya dilihat dengan mempertentangkan secara tajam antara nilai-nilai yang diperjuangkan oleh kelompok (aliran) agama tertentu dengan tatanan nilai yang berlaku atau dipandang mapan pada saat itu.

Kata radikal juga sering diartikan sebagai keberpihakan, kecondongan, mendukung pada satu ide pemikiran saja, satu kelompok, atau suatu ajaran agama secara penuh dan bersungguh-sungguh serta terfokus pada suatu tujuan serta bersifat reaktif dan aktif. Secara harfiah, radikalisme atau fundamentalisme tidak memliki sesuatu yang negatif. Namun

---

3. Mohammad Takdir Ilahi, "Genealogi Radikalisme Agama," Sinar Harapan, 7 Januari 2014

secara etimologi, radikalisme dan fundamentalisme telah mengalami penyempitan makna yang bermakna negatif.[4]

Pada dasarnya, perlu dibedakan antara radikal, radikalisme dan radikalisasi. Menurut KH. Hasyim Muzadi, Mantan Ketua PBNU dan pengasuh pesantren al-Hikam Malang), pada dasarnya seseorang yang berpikir radikal (berpikir mendalam, sampai ke akar-akarnya) boleh-boleh saja, dan memang berpikir sudah seharusnyalah seperti itu. Katakanlah misalnya, seseorang yang dalam hatinya berpandangan bahwa Indonesia mengalami banyak masalah (ekonomi, pendidikan, hukum, dan politik) disebabkan Indonesia tidak menerapkan syariat Islam, oleh karena itu, misalnya, dasar Negara Indonesia harus diganti dengan sistem pemerintahan Islam (Khilafah Islamiyyah). Pendapat yang radikal seperti itu sah-sah saja. Sekeras apapun pernyataan di atas jika hanya dalam wacana atau pemikiran, tidak akan menjadi persoalan publik. Sebab pada hakikatnya, apa yang muncul dalam benak atau pikiran tidak dapat diadili (kriminalisasi pemikiran) karena tidak termasuk tindak pidana. Kejahatan adalah suatu tindakan (omissi). Dalam pengertian ini, seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak.[5]

Adapun term "radikalisme", KH. Hasyim Muzadi mendefiniskannya "radikal dalam paham atau ismenya". Biasanya mereka akan menjadi radikal secara permanen. Radikal sebagai isme ini dapat tumbuh secara demokratis, force (kekuatan) masyarakat dan teror. Dengan kata lain, radikalisme adalah radikal yang sudah menjadi ideologi dan mazhab pemikiran. Dalam pandangan peneliti, setiap orang

---

4. Moh. Haitami Salim, "Islam dan Perspektif Tentang Radikalisme Agama," http://www.pascastainpontianak.com/islam-dan-perspektif-tentang-radikalisme-agama.html

5. Abu Rokhmad, "Radikalisme Islam Dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal", Walisongo, Volume 20, Nomor 1, Mei 2012, h. 82

berpotensi menjadi radikal dan penganut paham radikal (radikalisme), tergantung apakah lingkungan (habitus) mendukungnya atau tidak.[6]

Sedangkan yang dimaksud dengan radikalisasi, menurut Muzadi adalah (seseorang yang) tumbuh menjadi reaktif ketika terjadi ketidakadilan di masyarakat. Biasanya radikalisasi tumbuh berkaitan dengan ketikadilan ekonomi, politik, lemahnya penegakan hukum dan seterusnya. Jadi, jangan dibayangkan ketika teroris sudah ditangkap, lalu radikalisme hilang. Sepanjang keadilan dan kemakmuran belum terwujud, radikalisasi akan selalu muncul di masyarakat. Keadilan itu menyangkut banyak aspek, baik aspek hukum, politik, pendidikan, sosial, hak asasi, maupun budaya. Hukum itu berbeda dengan keadilan. Hukum adalah aspek tertentu, sedangkan keadilan adalah akhlak dari hukum itu.[7]

B. Genealogi Radikalisme Agama

Konflik dalam sejarah Islam telah nampak benih-benihnya pasca wafatnya Nabi Muhammad saw. Para sahabat saling berbeda pendapat tentang sosok yang pantas menggantikan posisi Nabi saw sebagai pemimpin. Walau pada akhirnya Abu Bakar as-Shiddiq muncul sebagai khalifah pertama, namun percikan perbedaan tentang sosok khalifah tetaplah tidak bisa dihindari. Dan kepemimpinan Abu Bakar sendiri tidak sepi dari adanya penolakan sebagian kecil umat Islam.

Pasca wafatnya Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua, Utsman bin Affan melanjutkan kendali kekhalifahan. Periode kepemimpinannya tidaklah sepi dari konflik. Khalifah Utsman bin Affan oleh sebagian kelompok umat Islam dipandang terlalu lemah, sehingga ia sangat mudah terpengaruh oleh berbagai kepentingan kekeluargaan (nepotisme). Berlarutnya masalah demi masalah berbuntut pada konflik yang menyebabkan

---

6. Abu Rokhmad, *ibid*, h. 83

7. *Ibid*

Utsman terbunuh. Ali bin Abi Thalib yang dilantik menggantikan Utsman, juga mendapatkan perlawanan dari beberapa sahabat diantaranya A'isyah, Talhah, Zubair dan Muawiyah.

Konflik antara Ali dan Muawwiyah merupakan pintu bagi lahirnya konflik yang lebih luas antara dua kubu politik ini. Ketika peperangan antara keduanya hampir dimenangkan oleh pasukan Ali, Muawiyah bin Abu Sufyan menawarkan arbitrase. Proses arbitrase sendiri pada akhirnya dimenangkan oleh kubu Muawwiyah yang memiliki tingkat kecerdikan politik dibanding Ali. Dampak atas arbitrase memunculkan kekecewaan luar biasa dari pendukung Ali, hingga pada akhirnya melahirkan kelompok Khawarij. Khawarij tumbuh sebagai golongan radikal, baik pandangan politik maupun teologisnya. Bagi mereka, baik Ali mupun Muawiyah telah melakukan dosa besar, sehingga berhak dihukumi kafir atau murtad dari Islam. Sebagai konsekuensinya maka darah keduanya halal ditumpahkan. Dalam setiap argumentasinya, Khawarij selalu mengedepankan semboyan "La hukma illa lillah" (tidak ada hukum selain bagi Allah) dan "La hakama illa Allah" (tidak ada hukum selain Allah) sebagaimana tersurat dalam surat al-Maidah ayat 44.

Pada perkembangannya, bukan hanya persoalan teologis yang menjadi sasaran kelompok Khawarij, mereka juga menyasar tema-tema politik, yang mana sikap politiknya sangat ekstrem dan radikal. Khawarij berpandangan, setiap muslim yang tak sependapat dengan paham mereka, kedudukannya musyrik dan halal darahnya.

Paham radikal yang dikembangkan Khawarij mendapat reaksi yang tak kalah keras dari kelompok Islam lainnya, mengingat paham Khawarij sangat tidak ramah terhadap perbedaan. Maka, muculah aliran teologi (kalam) seperti Murji'ah, Syi'ah, Mu'tazilah, Maturidiyah, Asy'ariah dan lainnya dan merespon apa yang diyakini Khawarij sebagai sebuah kesalahan. Kondisi ini menyeret umat Islam terjerumus pada

konflik sektarian, saling menyalahkan dan bahkan terus berdebat hingga lahirlah konflik antara Mu'tazilah melawan Asy'ariah, antara kaum filosof dengan kaum mutakallimin, antara ahli syariah dengan ahli tasawuf. Dampak terbesar dari situasi ini adalah, umat Islam semakin asyik dengan pertengkaran dan melupakan persatuan, sehingga di sinilah Islam mulai masuk dalam kemunduran.

Sejarah panjang konflik sekte dalam Islam memberi pengaruh yang sangat luas dalam perkembangan Islam, termasuk di Nusantara. Abdul A'la, Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya, memberi gambaran yang cukup luas terkait dengan fenomena radikalisme di Nusantara. Menurutnya, hampir semua sejarawan sepakat, penyebaran Islam di kawasan Nusantara –yang nantinya sebagian besar wilayahnya menjadi Indonesia –ditumbuh-kembangkan melalui proses dan pola secara damai. Penduduk di kepulauan ini pada umumnya menerima dan memeluk agama yang dibawa Nabi Muhammad saw itu secara suka rela, tanpa dilatarbelakangi dengan adanya suatu paksaan yang berarti. Bahkan sampai derajat tertentu, penduduk menyikapi agama yang baru ini sebagai sesuatu yang tidak asing. Pola penyebaran dan pembumian Islam secara damai ini menjadi ikon penting Islam di bumi Nusantara.

Kendati demikian, keberagamaan Islam di kawasan tersebut bukan berarti seutuhnya berwajah mulus seperti itu. Dalam periode tertentu, atau dan di daerah tertentu kekerasan dari kelompok Islam tertentu juga ikut menghiasi wajah keislaman Nusantara. Kelompok awal yang melakukannya adalah gerakan Padri yang melakukan kekerasan bukan hanya terhadap orang di luar Islam, tapi juga terhadap sesama Muslim yang tidak mau mengikuti ajaran mereka. Kekerasan dan tindakan sejenis yang dilakukan tampaknya bukan semata-mata terjadi secara serta-merta, tapi merujuk kepada pandangan keagamaan tertentu yang berkelindan dengan aspek lain dan terkonstruk secara sistematis

yang sampai derajat tertentu melegitimasi atas terjadinya sikap dan tindakan semacam itu.[8]

Pemikiran yang dikembangkan kaum Padri tidak berhenti sebatas pada arah diskursus semata. Mereka melabuhkannya ke dalam realitas kehidupan melalui aksi konkret. Dalam melakukan tindakan dengan mengatasnamakan agama itu, mereka terperangkap ke dalam fundamentalisme radikal yang berujung kepada kekerasan terhadap kelompok yang tidak sejalan dengan kaum Padri.

Kekerasan yang dilakukan kaum Padri –meminjam konsep Galtung–merupakan segi tiga kekerasan yang sudutnya terdiri dari kekerasan struktural, langsung dan kultural. Pada umumnya, mereka melakukan kekerasan dengan bentuk kekerasan struktural dan langsung yang ditegakkan sebagai kaki, dan kekerasan kultural sebagai dasar pelegitimasi. Kekerasan kultural sebagai aspek-aspek budaya –yang diwakili agama dan ideologi, bahasa, dan ilmu pengetahuan–yang menjustifikasi kekerasan dapat ditelusuri dengan amat memadai pada pemikiran agama mereka tentang takfir, penyesatan dan sejenisnya. Melalui itu mereka mengembangkan kekerasan struktural yang dirupakan dalam bentuk konsep marginalisasi terhadap orang-orang, kelompok, atau masyarakat.[9]

Minangkabau yang tidak bersedia mengikuti ajaran mereka. Kekerasan struktural ini kemudian ditubuhkan menjadi kekerasan langsung dengan melakukan pengepungan dan pembunuhan. Semua itu, eksplisit atau implisit, didasarkan pada ajaran agama. Dengan demikian, kekerasan itu muncul dari radikalisme keberagamaan mereka.[10]

---

8. Abd A'la, "Genealogi Radikalisme Muslim Nusantara: Akar dan Karakteristik Pemikiran dan Gerakan Kaum Padri dalam Perspektif Hubungan Agama dan Politik Kekuasaan," Pidato Ilmiah Disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Sejarah Pemikiran Politik Islam pada Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008, h. 2

9. Abdul A'la, *Ibid*, h. 12

10. *ibid*

Dari paparan di atas dapat kita tarik benang merah, bahwa radikalisme agama tumbuh dan berkembang seiring dengan dinamika yang terjadi di internal umat Islam, berbagai persinggungan baik secara politik, ekonomi maupun paham keagamaan, memberi pengaruh terhadap kemunculannya. Dalam hal inilah kita melihat bahwa radikalisme agama sering mengatasnamakan paham agama tertentu sebagai legitimasinya, sedangkan motivasi politik, ekonomi dan sosial budaya menjadi kabur.

Mohammed Arkoun (1999), satu diantara sarjana muslim kontemporer, melihat radikalisme Islam sebagai dua tarikan berseberangan, yakni, masalah ideologisasi dan politis. Dan, Islam selalu akan berada di tengahnya. Manusia tidak selalu paham sungguh akan perkara itu. Bahwa radikalisme secara serampangan dipahami bagian substansi ajaran Islam. Sementara fenomena politik dan ideologi terabaikan. Memahami Islam merupakan aktivitas kesadaran yang meliputi konteks sejarah, sosial dan politik. Demikian juga dengan memahami perkembangan fundamentalisme Islam. Tarikan politik dan sosial telah menciptakan bangunan ideologis dalam pikiran manusia. Nyata, Islam tidak pernah menawarkan kekerasan atau radikalisme. Persoalan radikalisme selama ini hanyalah permainan kekuasaan yang mengental dalam fanatisme akut. Dalam sejarahnya, radikalisme lahir dari persilangan sosial dan politik. Radikalisme Islam Indonesia merupakan realitas tarikan berseberangan itu.[11]

Kalau kita lebih rinci menganalisis sejarah munculnya radikalisme yang mengatasnamakan agama, ternyata ada satu tesis yang patut kita pertimbangkan secara matang terkait fanatisme, terhadap ideologi yang dilakukan sekelompok aliran politik tertentu yang meresahkan keamanan dunia. Radikalisme agama pada dasarnya berujung pada sebuah kegagalan yang

---

11. Muhamamd Ismaiel, "Radikalisme Islam di Indonesia," nu.or.id, 28/10/2008

kemudian melahirkan kebencian, dendam, maupun fanatisme. Barangkali kita harus menyadari, pendukung radikalisme agama tidak mampu memberikan tawaran untuk mencapai kesepakatan damai maupun keinginan melakukan dialog partisipatif demi memecah kebuntuan. Ketika jalan damai tidak tercapai, jalan pintas berupa *self-defeating* (menghancurkan diri sendiri) atas nama agama, yang dipahami dalam suasana jiwa yang sakit dan tertekan, kerap dilakukan sebagai bentuk kepuasaan pribadi.[12]

C. Faktor Pemicu Radikalisme dalam Islam

Syamsul Bakri, dosen Peradaban Islam STAIN Surakarta, membagi faktor pendorong munculnya gerakan radikalisme kedalam 5 (lima) faktor. [13]

Pertama, faktor-faktor sosial-politik. Gejala kekerasan "agama" lebih tepat dilihat sebagai gejala sosial-politik daripada gejala keagamaan. Gerakan yang secara salah kaprah oleh Barat disebut sebagai radikalisme Islam itu lebih tepat dilihat akar permasalahannya dari sudut konteks sosial-politik dalam kerangka historisitas manusia yang ada di masyarakat. Sebagaimana diungkapkan Azyumardi Azra bahwa memburuknya posisi negara-negara Muslim dalam konflik utara-selatan menjadi penolong utama munculnya radikalisme. Secara historis kita dapat melihat bahwa konflik-konflik yang ditimbulkan oleh kalangan radikal dengan seperangkat alat kekerasannya dalam menentang dan membenturkan diri dengan kelompok lain ternyata lebih berakar pada masalah sosial-politik.

Kedua, faktor emosi keagamaan. Harus diakui bahwa salah satu penyebab gerakan radikalisme adalah faktor sentimen keagamaan, termasuk di dalamnya adalah solidaritas keagamaan

---

12. Mohammad Takdir Ilahi, "Genealogi Radikalisme Agama," Sinar Harapan, 7 Januari 2014

13. Syamsul Bakri, "Islam dan Wacana Radikalisme Agama Kontemporer", Jurnal DINIKA Vol. 3 No. 1, January 2004 (http://www.ditpertais.net/jurnalptai/dinika-skt/31104/bakri-01.pdf)

untuk kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Tetapi hal ini lebih tepat dikatakan sebagai faktor emosi keagamaannya, dan bukan agama (wahyu suci yang absolut) walaupun gerakan radikalisme selalu mengibarkan bendera dan simbol agama seperti dalih membela agama, jihad dan mati syahid. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan emosi keagamaan adalah agama sebagai pemahaman realitas yang sifatnya interpretatif. Jadi sifatnya nisbi dan subjektif.

Ketiga, faktor kultural ini juga memiliki andil yang cukup besar yang melatarbelakangi munculnya radikalisme. Hal ini wajar karena memang secara kultural, sebagaimana diungkapkan Musa Asy'ari bahwa di dalam masyarakat selalu diketemukan usaha untuk melepaskan diri dari jeratan jaring-jaring kebudayaan tertentu yang dianggap tidak sesuai. Sedangkan yang dimaksud faktor kultural di sini adalah sebagai anti tesa terhadap budaya sekularisme. Budaya Barat merupakan sumber sekularisme yang dianggap sebagai musuh yang harus dihilangkan dari bumi. Sedangkan fakta sejarah memperlihatkan adanya dominasi Barat dari berbagai aspeknya atas negeri-negeri dan budaya Muslim. Peradaban Barat sekarang ini merupakan ekspresi dominan dan universal umat manusia.

Barat telah dengan sengaja melakukan proses marjinalisasi seluruh sendi-sendi kehidupan Muslim sehingga umat Islam menjadi terbelakang dan tertindas. Barat, dengan sekularismenya, sudah dianggap sebagai bangsa yang mengotori budaya-budaya bangsa Timur dan Islam, juga dianggap bahaya terbesar dari keberlangsungan moralitas Islam.

Keempat, faktor ideologis anti westernisme. Westernisme merupakan suatu pemikiran yang membahayakan Muslim dalam mengaplikasikan syari'at Islam. Sehingga simbol-simbol Barat harus dihancurkan demi penegakan syari'at Islam. Walaupun motivasi dan gerakan anti Barat tidak bisa disalahkan dengan alasan keyakinan keagamaan tetapi jalan kekerasan yang ditempuh kaum radikal justru menunjukkan ketidakmampuan

mereka dalam memposisikan diri sebagai pesaing dalam budaya dan peradaban.

Kelima, faktor kebijakan pemerintah. Ketidakmampuan pemerintahan di negara-negara Islam untuk bertindak memperbaiki situasi atas berkembangnya frustasi dan kemarahan sebagian umat Islam disebabkan dominasi ideologi, militer maupun ekonomi dari negera-negara besar. Dalam hal ini elit-elit pemerintah di negeri-negeri Muslim belum atau kurang dapat mencari akar yang menjadi penyebab munculnya tindak kekerasan (radikalisme) sehingga tidak dapat mengatasi problematika sosial yang dihadapi umat.

Dari kelima faktor sebagaimana diuaraikan di atas dapat kita kerucutkan kedalam tiga hal.

a. Konflik Palestina-Israel

Konflik Israel dan Pelestina telah merenggut ribuan korban jiwa, insfrastruktur dan harta, serta rusaknya tata kehidupan warga Palestina. Dalam serangan terbaru, Militer Israel mengklaim telah menyerang lebih dari lima ribu lokasi selama perang di Jalur Gaza. Serangan itu mengakibatkan 2.145 warga Palestina tewas, dan 11 ribu lainnya terluka.[14]

Di bidang ekonomi, sebagaimana disampaikan Bank Dunia, bahwa konflik yang terjadi di Jalur Gaza mengakibatkan kondisi perekonomian Palestina semakin tertekan dan memperburuk antara lain karena menurunnya penghasilan per kapita pada 2013. Tanpa adanya tindakan segera dari Otoritas Palestina, lembaga donor, dan Israel untuk merevitalisasi ekonomi dan memperbaiki iklim bisnis, maka akan menjadi bahaya nyata, kata Direktur Negara Bank Dunia untuk Tepi Barat dan Gaza Steen Lau Jorgensen dalam rilisnya, Rabu (17/9). Menurut Jorgensen, seperenam warga Palestina di Tepi Barat dan hampir separuh warga di Gaza menjadi pengangguran karena konflik terbaru. Laporan Pengawasan Ekonomi Palestina yang mengkaji ekonomi

14. Republika, 28 Agustus 2014

Palestina serta menganalisis dampak masa depan bila tren saat ini berlanjut adalah merekonmendasikan aksi remedial baik dari Otoritas Palestina, pemerintah Israel, dan donor internasional.[15]

Dunia Islam merespon apa yang terjadi di Palestina dengan beragam kecaman dan aksi. Dari Indonesia, Ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina, Din Syamsuddin mengecam keras adanya agresi militer tentara Israel ke Jalur Gaza. Dalam serangan yang menewaskan ratusan warga sipil termasuk anak-anak di bawah umur tersebut, Din menganggap apa yang dilakukan Israel adalah tindakan brutal."Kami sampaikan kecaman keras atas serangan brutal tersebut," kata Din di gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya 62, Jakarta Pusat, Kamis (10/7). Selain itu, dirinya juga mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengambil sikap nyata menghentikan serangan yang semakin deras di Jalur Gaza. Dia juga berharap kepada presiden Indonesia, untuk tetap memihak kepada rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Kami tetap dorong untuk keberpihakan kepada rakyat Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaan, sesuai dengan apa yang diamanatkan konstitusi.[16]

Dunia pun tidak tinggal diam. Sebanyak 24 negara turut memberikan dukungan terhadap resolusi PBB pada hari Selasa (22/7) yang menuntut Israel menghentikan serangannya ke Gaza. Negara-negara tersebut termasuk India, Rusia, China, dan Afrika Selatan. Sementara itu, 17 negara abstain dari keseluruhan 46 negara anggota dewan. Negara yang menentang hanya Amerika Serikat, sedangkan semua negara Eropa memilih abstain. [17]

Sikap barat yang mendua dalam menyikapi konflik Israel dan Palestina, dipandang sebagai keberpihakan Barat terhadap pembantaian warga Palestina. Barat yang begitu gigih menentang terorisme dan radikalisme, begitu mudah

---

15. Republika, 17 September 2014
16. http://www.merdeka.com/10 Juli 2014
17. Republika, 25 Juli 2014

membiarkan teror menghantui warga Gaza. Fakta menunjukkan keberpihakan Amerika Serikat sebagai negara adidaya pada Israel. Keberpihakan tersebut semakin terlihat jelas ketika tidak kurang dari puluhan resolusi yang dikeluarkan PBB untuk konflik Israel-Palestina kerap "dimentahkan" Amerika dengan vetonya. Ada hal lain yang lebih menarik, sunyinya suara negara-negara Arab (khususnya Saudi Arabia yang dalam banyak hal dianggap sebagai "kampung halaman Islam", dan berteman dekat dengan Amerika) semakin memperlihatkan nuansa politik yang cukup kontras dalam kasus ini.[18]

Di samping itu, faktor media massa (pers) Barat yang selalu memojokkan umat Islam juga menjadi faktor munculnya reaksi dengan kekerasan yang dilakukan oleh umat Islam. Propaganda-propaganda lewat pers memang memiliki kekuatan dahsyat dan sangat sulit untuk ditangkis sehingga sebagian "ekstrem" yaitu perilaku radikal sebagai reaksi atas apa yang ditimpakan kepada komunitas Muslim.[19]

Konflik Israel dan Palestina menjadi pusat perhatian dunia Islam, termasuk lahirnya kelompok-kelompok radikal yang menghendaki jalan kekerasan sebagai respon atas berbagai tindakan Israel terhadap warga Palestina. Apa yang tersaji di berbagai berita tentang pembantaian warga Gaza, penghancuran bangunan, sekolah dan rumah sakit, tentang anak-anak yang terenggut nyawanya, kesemuanya membangkitkan rasa solidaritas dari kalangan muslim dunia. Maka lahirlah gerakan-gerakan radikal yang menjadikan kasus pembantaian di Palestina sebagai alasan untuk melakukan kekerasan yang sama terhadap Barat dan sekutunya.

Pada aspek tataran global, akar radikalisme bisa ditelusuri

---

18. Eko Marhaendy,"Analisis Konflik Israel Palestina: Sebuah Penjelajahan Dimensi Politik dan Teologis," komarhaendy.wordpress.com (diunduh 19 September 2014)

19. Syamsul Bakri, "Islam dan Wacana Radikalisme Agama Kontemporer", Jurnal DINIKA Vol. 3 No. 1, January 2004 (http://www.ditpertais.net/jurnalptai/dinika-skt/31104/bakri-01.pdf)

melalui nasib Palestina yang dizalimi Israel yang didukung penuh Amerika Serikat. Sebagai penguasa tunggal dunia, Amerika Serikat sebenarnya berperan strategis menyelamatkan peradaban umat manusia yang mulai tersungkur oleh kebengisan akhlak dan moral, sehingga bisa mengembangkan sebuah kultur kearifan global (*a culture of global wisdom*). Harapan itu tidak terjadi karena politik luar negeri Amerika Serikat sangat pro-Israel. Ini mengakibatkan permasalahan kemanusiaan global tidak dapat dipecahkan secara berkelanjutan (Muhammad Hanif Hasan, 2007). Dari sini kita bisa mengetahui bagaimana kekejaman Amerika Serikat terhadap rakyat Irak dan Afganistan. Mohammad Abu Kazleh (2003), penulis asal Yordania, mengungkapkan rasa dukanya terhadap tragedi yang menimpa rakyat Irak akibat diinvansi Amerika Serikat.[20]

Fakta yang cukup sulit untuk dibantah, bahwa konflik Israel-Palestina berhasil membangun stigma di tengah masyarakat Islam sebagai konflik bernuansa agama. Pandangan ini setidaknya dibangun berdasarkan asumsi bahwa Palestina diyakini sebagai salah satu simbol spiritualitas Islam, dan korban yang berjatuhan di tanah Palestina secara umum adalah masyarakat Islam. Istilah "jihad" sendiri merupakan terminologi dalam ajaran Islam yang mengandung pengertian perang yang dilakukan di jalan Allah, sehingga jika jihad dapat ditolerir dalam kasus ini, maka semakin sulit membangun fondasi keyakinan di tengah masyarakat Islam tentang adanya "fakta lain" di balik situasi konflik yang sejak lama terjadi antara Israel dan Palestina.[21]

Konflik Israel-Palestina dengan sendirinya dapat diposisikan sebagai konflik sosial mengingat kasus ini dapat disoroti dari beberapa aspek: politik dan teologi. Konflik sosial sendiri – sebagaimana dikatakan Oberschall mengutip Coser–

20. Mohammad Takdir Ilahi, "Genealogi Radikalisme Agama," Sinar Harapan, 7 Januari 2014

21. Eko Marhaendy,"Analisis Konflik Israel Palestina: Sebuah Penjelajahan Dimensi Politik dan Teologis," komarhaendy.wordpress.com (diunduh 19 September 2014)

diartikan sebagai "*...a strugle over values or claims to status, power, and scare resource, in wich the aims of the conflict groups are not only to gain the desired values, but also to neutralise injure or eliminate rivals*. Pengertian ini menunjukkan bahwa konflik sosial meliputi spektrum yang lebar dengan melibatkan berbagai konflik yang membingkainya, seperti: konflik antar kelas (*social class conflict*), konflik ras (*ethnics and racial conflicts*), konflik antar pemeluk agama (*religions conflict*), konflik antar komunitas (*communal conflict*), dan lain sebagainya.[22]

b. Standar Ganda Kebijakan Negara Maju

Faktor anti barat menjadi akar yang kuat dalam mendorong lahirnya sikap radikal. Radikalisme agama yang tidak jarang kemudian melahirkan aktifitas kekerasan dan terorisme pada umumnya merupakan respons dan perlawanan terhadap kebijakan Amerika dan sekutunya terhadap kezaliman yang terjadi di negara-negara Islam. Kebijakan "perang melawan terorisme" yang selama ini digaungkan oleh Amerika dan sekutunya menimbulkan segregasi yang sangat nyata: siapa yang mendukung kebijakan tersebut merupakan sekutu bagi Amerika, sedangkan yang menolaknya dianggap sebagai musuh. Dengan kebijakan tersebut Amerika dan sekutunya memburu orang-orang yang dianggap sebagai teroris, bukan saja di negara mereka tapi juga di negara lain.

Kondisi inilah yang kemudian menjadi penyebab "mengerasnya" sikap sekelompok umat Islam, yang kemudian mereka juga membuat garis pemisah yang tegas: siapa yang mendukung kebijakan Amerika dan sekutunya tersebut dianggap bagian dari mereka (*anshar at-thaghut*). Sedangkan yang menolak dianggap sebagai teman seperjuangan (*anshar at-tauhid*).

Menurut kelompok ini kebijakan Amerika dan sekutunya

22. Eko Marhaendy,"Analisis Konflik Israel Palestina: Sebuah Penjelajahan Dimensi Politik dan Teologis," komarhaendy.wordpress.com (diunduh 19 September 2014)

yang mengobarkan perang global melawan terorisme dipahami sebagai perang melawan umat Islam secara global. Pada akhirnya sikap keras Amerika dan sekutunya dalam menjalankan agenda perang melawan terorisme menjadi penyebab semakin radikalnya kelompok ini. Kelompok ini membalas kebijakan tersebut dengan mengobarkan perang melawan Amerika dan sekutunya dengan mengincar kepentingan-kepentingan mereka. Kelompok ini menjustifikasi aktifitasnya dengan mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan adalah jihad melawan pihak-pihak yang memerangi umat Islam. Mereka membolehkan melakukan serangkaian pengeboman pada objek-objek yang mereka anggap sebagai perpanjangan kepentingan Amerika dan sekutunya, di manapun objek tersebut berada, bahkan di negara berpenduduk mayoritas muslim sekalipun.

Justifikasi terhadap apa yang kelompok ini lakukan, yaitu dengan mengatasnamakan jihad, tidak disetujui oleh para ulama. Kelompok ini memahami jihad hanya dengan arti perang (*qital*). Padahal, menurut para ulama, jihad juga mempunyai makna lain, misalnya upaya sungguh-sungguh dalam melakukan perbaikan. Menurut para ulama, jihad selain mempunyai makna *qital* (perang), juga mempunyai makna *ishlah* (perbaikan).

Dalam konteks ini, kaum radikalisme memandang fakta historis bahwa umat Islam tidak diuntungkan oleh peradaban global sehingga menimbulkan perlawanan terhadap kekuatan yang mendominasi. Dengan membawa bahasa dan simbol serta slogan-slogan agama kaum radikalis mencoba menyentuh emosi keagamaan dan mengggalang kekuatan untuk mencapai tujuan "mulia" dari politiknya. Tentu saja hal yang demikian ini tidak selamanya dapat disebut memanipulasi agama karena sebagian perilaku mereka berakar pada interpretasi agama dalam melihat fenomena historis. Karena dilihatnya terjadi banyak penyimpangan dan ketimpangan sosial yang merugikan komunitas Muslim maka terjadilah gerakan radikalisme yang

ditopang oleh sentimen dan emosi keagamaan.[23]

c. Distorsi Paham Keagamaan

Selain itu, faktor distorsi pemahaman agama juga menjadi akar dari munculnya sikap radikal dalam beragama. Salah satu penyebab terjadinya distorsi dalam memahami agama adalah pemahaman terhadap dalil Al-Quran dan Hadis hanya secara harfiyah atau literer. Pemahaman terhadap dalil Al-Quran dan Hadis hanya dengan menggunakan pendekatan literer ini membahayakan, karena dapat menggelincirkan seseorang dalam kesalahan pemahaman. Dalam pengambilan suatu hukum dari dalil-dalil syar'i (*istinbath al-hukm*) harus melewati seperangkat metodologi yang telah diformulasikan oleh para ulama, baik dengan cara pemahaman terhadap makna harfiyah dari dalil Al-Quran dan Hadis (*manthuq an-nash*) ataupun dengan cara menggali lebih dalam makna tersebunyi dari dalil Al-Quran dan Hadis (*mafhum an-nash*).

Pemahaman agama yang hanya didasarkan pada *manthuq an-nash* saja akan menimbulkan kekakuan dalam beragama. Karena agama Islam diturunkan oleh Allah *subhanahu wata'ala* sebagai agama terakhir, sehingga apapun peristiwa dan permasalahan yang muncul seiring dengan perkembangan zaman dapat dicarikan jawabannya dalam agama. Nash keagamaan (*nushush syar'iyah*) terbatas pada *ayat quraniyah* dan *sunnah nabawiyah* sedangkan permasalahan akan senantiasa muncul seiring dengan perkembangan zaman. Sehingga apabila pemahaman agama didasarkan hanya pada *munthuq an-nash* saja maka boleh jadi agama tidak akan bisa menjawab permasalahan yang muncul, karena tidak semuanya termaktub secara jelas di dalam *nash*. Suatu hal yang tidak mungkin menjawab semua persoalan yang muncul hanya terpaku dengan *manthuq an-nash,* karena *nash* sifatnya sangat terbatas sedangkan persoalan yang

---

23. Syamsul Bakri, "Islam dan Wacana Radikalisme Agama Kontemporer", Jurnal DINIKA Vol. 3 No. 1, January 2004 (http://www.ditpertais.net/jurnalptai/dinika-skt/31104/bakri-01.pdf)

terjadi terus berkembang. Sebagaimana ungkapan para ulama:

لأن النصوص محدودة ولكن الحوادث والنوازل غير محدودة أو لأن النصوص تتناهى ولكن الحوادث والنوازل لا تتناهى.

"Sesungguhnya nash itu terbatas, sedangkan persoalan-persoalan yang muncul tidaklah terbatas. Atau karena sesungguhnya nash itu telah berhenti sedangkan permasalahan akan senantiasa muncul dan tidak pernah berhenti"

Apabila pemahaman terhadap dalil ini dipaksakan hanya dengan mempergunakan cara literer, apalagi kalau tidak diimbangi dengan penguasaan yang mendalam terhadap maksud dari dalil tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan pemahamannya menjadi terdistorsi. Karena pemahaman terhadap dalil secara literer dan parsial cenderung bisa menyesatkan, dan dikhawatirkan akan menimbulkan radikalisme dalam pemahaman agama.

d. Cita-cita Khilafah Islamiyyah

Khilafah Islamiyyah menjadi isu yang telah menarik dalam kemunculan radikalisme dan terorisme. Alasan yang mengemuka adalah, bahwa bentuk pemerintahan saat ini tidaklah sesuai dengan ketentuan syariat Islam karena tidak dibentuk atas prinsip khilafah Islamiyyah, perundang-undangan tidak berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadits. Oleh karena itulah, negara tanpa khilafah Islamiyyah disebut *thagut,* dan wajib diperangi.

Gerakan mendukung khilafah Islamiyyah telah terjadi dalam setiap periode. Sejak runtuhnya Turki Utsmani, memang tidak ada lagi negara dengan label "khilafah". Negara-negara yang mendeklarasikan sebagai negara Islam pun banyak dibangun atas dasar kerajaan. Ditambah, hegemoni Barat terhadap dunia Islam yang begitu kuat, mendorong kalangan muslim untuk mengembalikan kejayaan khilafah Islamiyyah. Pada titik inilah, khilafah Islamiyyah bagi sebagian kecil kelompok umat Islam

dipandang sebagai model terbaik satu-satunya bagi kemajuan umat Islam. Hal ini pulalah yang dapat kita baca saat Islamic State (IS- sebelumnya ISIS) mendeklarasikan negara Islam, bahwa di bawah kepemimpinan IS inilah khilafah Islamiyyah ditegakkan.

Menurut Din Syamsuddin, khilafah adalah ajaran Islam yang baik dan disebutkan dalam Al-Quran, bahkan dalam nada bahwa setiap manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Oleh karena itu konsep khilafah tidak mungkin kita tolak. Namun, jika khilafah ditarik kepada kelembagaan politik keagamaan maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dan cendekiawan muslim dari dulu hingga kini. Soal khilafah historis yang pernah ada dalam sejarah Islam, misalnya, Ibnu Khaldun mengkritiknya sebagai bukan lembaga kepemimpinan politik yang bersifat keislaman, karena sesungguhnya khilafah waktu itu adalah kerajaan.

Menurut Din, gagasan untuk menegakkan khilafah sekarang ini mempunyai makna esensial perlunya persatuan umat Islam. Oleh karena itu penegakan khilafah harus tetap dalam kerangka NKRI. Khilafah seperti itu menolak separatisme pada satu sisi dan universalisme pada sisi lain. Sebagai manifestasi persatuan umat Islam, khilafah tidak boleh mengurangi inklusifisme dan pluralisme bangsa. Kepada semua pihak diimbau untuk tidak perlu khawatir dengan wacana khilafah sebagai bagian dari proses demokrasi dan pluralisme. Justru sikap menolak dan mengecam wacana yang hidup di kalangan bangsa bisa bersifat antidemokrasi dan pluralisme.[24]

D. ISIS dan Fenomena Radikalisme Modern

Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), yakni kelompok bersenjata di Irak dan Suriah yang ditengarai berafiliasi dengan Al-Qaeda muncul menjadi isu internasional yang menggemparkan dunia.

Sampai saat ini belum diketahui data berapa jumlah

24. http://suaramerdeka.com/harian/0708/13/nas01.htm

anggota ISIS, termasuk pengikutnya di Indonesia. Kelompok ini menggunakan media sosial dalam menyebarkan pengaruh dan merekrut anggota di seluruh dunia. ISIS memiliki akun Twitter bernama, Fajr Al-Bashaer (@Fajr991) untuk merekrut anggota baru yang mau bergabung. Para pendaftar akan dimintai data personal dan selanjutnya mereka akan dikirimi berita seputar pertempuran ISIS di Irak dan Suriah serta perkembangannya. ISIS merilis video yang mengajak para pemuda Muslim di Barat agar turut berjuang bersama kelompok itu. ISIS dalam gerakannya yang terlihat saat ini fokus menentang Israel, dan berbeda dengan Al-Qaeda yang menentang Barat dan Yahudi, tapi tidak spesifik terhadap Israel.

Sebuah video berisi ajakan dari warga Indonesia untuk bergabung ke ISIS beredar melalui situs YouTube. Dalam video berdurasi delapan menit berjudul *'Join the Ranks'* itu, seseorang yang menyebut dirinya Abu Muhammad al-Indonesi meminta warga Indonesia untuk mendukung perjuangan ISIS menjadi khilafah dunia.

ISIS menerbitkan surat kabar eletronik dan cetak dalam bahasa Inggris dan Arab. Mereka telah menerbitkan surat kabar "Dabiq" dan akan menerbitkan "Chalipate 2" yang didistribusikan di seluruh wilayah Suriah yang mereka kuasai.

Dukungan terhadap ISIS dari warga negara Indonesia yang terpengaruh paham dan gerakan ekstrem tersebut merupakan ancaman keamanan dalam negeri. Para pendukung ISIS mempunyai dua pilihan, yaitu hijrah ke Timur Tengah membantu ISIS atau mengubah negaranya menjadi negara kekhilafah. Para pendukung ISIS di Indonesia telah bersumpah setia atau membaiat pimpinan ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi. Dengan sumpah itu, para pendukung ISIS seolah-olah tak lagi menjadi warga negara Indonesia, melainkan menjadi warga negara ISIS. Pembaiatan anggota ISIS telah terjadi yaitu di Malang, Jawa Timur.

Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin secara tegas menyatakan, ideologi *Islamic State of Iraq and Syiria* (ISIS) bertentangan dengan ideologi Pancasila. Pernyataan ISIS yang mengatakan bahwa Pancasila adalah *thagut* atau berhala yang harus diperangi, sudah amat kelewat batas. ISIS merupakan suatu organisasi pergerakan yang berpaham radikal, dan menggunakan kekerasan demi memperjuangkan apa yang diyakininya. Yakni memperjuangkan negara Islam di Iraq dan Suriah. Umat Islam Indonesia tak perlu terpengaruh dan ikut-ikutan.

Menurut Menteri Agama, masyarakat Indonesia yang mengangkat sumpah dan berjanji setia kepada negara asing atau menjadi bagian dari negara asing bisa mengakibatkan kehilangan status kewarganegaraan. Khususnya umat Islam Indonesia, Menteri Agama meminta agar bersikap mawas diri. Sebab dakwah Islam dilakukan secara damai, mengajak dan merangkul semua kalangan dengan cara-cara yang baik dan penuh hikmah, bukan dengan menebar ketakutan dan kekerasan. Demikian kutipan pernyataan Menteri Agama.

Umat Islam Indonesia perlu hati-hati dan memiliki kewaspadaan dalam menyikapi isu gerakan ISIS. Untuk itu diperlukan kajian yang konprenhensif. Perlu didalami latar belakang dan potensi ancaman yang dapat ditimbulkannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tokoh organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah telah menyampaikan pernyaatan dalam menyikapi ISIS. DR (HC) KH. Hasyim Muzadi (Nahdlatul Ulama) mengatakan bahwa video yang mengajak warga Indonesia bergabung dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) bisa mengancam kedaulatan negara. Sebab, ISIS merupakan gerakan lintas negara yang bertujuan mendirikan negara tersendiri. Ini gerakan ekstrem yang tidak menghormati kedaulatan negara. Hasyim meminta umat muslim dan pemerintah mewaspadai kampanye yang mengajak

warga bergabung dengan ISIS. Soalnya ISIS bukanlah aliran agama yang berisi ajaran teologi dan ritual keagamaan, tetapi gerakan politik yang bisa mengancam kedaulatan dan konstitusi. Menurut, Hasyim, jika gerakan ini merebak di Indonesia, bukan tak mungkin akan ada gerakan-gerakan serupa ISIS yang bermunculan. Organisasi ini dinilai sangat berbahaya.

Ahmad Syafi'i Maarif (Muhammadiyah) meminta pemerintah untuk mewaspadai munculnya kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Tanah Air. Menurut Syafi'i Maarif, jika memang ada, maka pemerintah harus segera memberantas kelompok tersebut sebelum berkembang lebih jauh. Jika terbukti ada, harus dipangkas pada kuncupnya sebelum berkembang. Syafi'i Maarif juga meminta masyarakat agar tidak tertipu dengan ajakan bergabung dengan kelompok tersebut. Sebab, ISIS merupakan kelompok sesat dan merasa benar di jalan yang sesat.

Menurut salah seorang pengamat politik, organisasi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) berpotensi besar berkembang di Indonesia. Ada dua penyebab ISIS mudah berkembang di Tanah Air. *Pertama,* Indonesia memiliki toleransi yang tinggi terhadap kebebasan beragama. Kondisi ini sekaligus menjadi peluang tumbuhnya bibit-bibit gerakan yang membahayakan. *Kedua,* pengetahuan dan informasi masyarakat mengenai agama cenderung sedikit, tapi semangat ingin berbuat lebih.

Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan bahwa Kemenkominfo tidak serta merta bisa memblokir video ajakan kepada masyarakat Indonesia untuk bergabung dengan ISIS di situs YouTube. Pemblokiran itu hanya bisa dilakukan atas dasar pengaduan dari masyarakat.

Dideklarasikannya ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) oleh sekelompok orang dan mengklaim secara sepihak sebagai kekhalifahan Islam secara global segera mendapatkan reaksi dari berbagai pihak, ada yang menolak dan ada pula yang mendukungnya, ada yang menganggapnya sebagai ancaman dan ada pula yang menganggapnya sebagai harapan. Pihak

yang menolak dan menganggapnya sebagai ancaman berasal dari sebagian besar umat Islam, termasuk para ulama dan pemimpin dunia Islam. Sedangkan pihak yang mendukung dan menganggapnya sebagai harapan berasal dari segelintir orang yang sejak awal telah mempunyai cita-cita untuk mendirikan kekhalifahan Islam secara global walaupun dengan menggunakan pendekatan kekerasan.

Pihak yang menolak kemunculan ISIS beserta klaimnya sebagai kekhalifahan Islam global berasal dari hampir semua komponen umat Islam. Bahkan kelompok dalam umat Islam yang selama ini dikenal sebagai pihak yang gigih mewacanakan pentingnya khilafah Islamiyah juga masuk dalam barisan pihak yang menolak pendeklarasian ISIS tersebut. Alasan yang paling menonjol dan disepakati oleh hampir semua kelompok Islam adalah terkait dengan cara yang dipergunakan oleh kelompok ISIS yang jauh dari ajaran Islam. Cara yang dipakai lebih tepat disebut sebagai teror yang mengedepankan kekerasan, kebiadaban dan ketidak-toleranan.

Selain alasan itu, para ulama dan pemimpin Islam juga banyak yang tidak setuju dengan cita-cita pendirian kekhalifahan Islam secara global. Karena menurut mereka cita-cita tersebut saat ini tidaklah realistis dan juga tidak ada justifikasinya dalam ajaran Islam. Saat ini umat Islam berada di setiap negara yang berbeda, yang masing-masing Negara mempunyai sejarah dan kebijakannya sendiri terkait umat Islam. Bahkan banyak dari para ulama dan pemimpin Islam yang secara sadar melakukan ijtihad untuk memperkuat negaranya masing-masing, seperti umat Islam di Indonesia.

Bagi kelompok terakhir ini, mendirikan kekhalifahan Islam global tidak ada landasannya dalam ajaran Islam dan juga dalam perjalanan sejarah Islam. Model kekhalifahan hanya terjadi pada era *al-khulafa ar-rasyidun*, yakni era kepemimpinan sayyidina Abu Bakar, sayyidina Umar, sayyidina Usman, dan sayyidina Ali (*radhiallahu 'anhum ajmai'in*). Itupun kalau diperhatikan

secara seksama model yang diterapkan berbeda antara era empat kepemimpinan tersebut. Oleh karena itu tepat kiranya apa yang dinyatakan oleh Ibnu Khaldun dalam Muqaddimahnya bahwa prinsip kekhalifahan Islam hanya ditemukan di era *al-khulafa ar-rasyidun* saja, sedangkan setelahnya tidak ada yang pas untuk disebut sebagai kekhalifahan Islam. Lebih jauh ia mengatakan, jikapun ada yang menyebut adanya kekhalifahan Islam setelah era *al-khulafa ar-rasyidun* maka hal itu hanyalah dalam nama saja, sedangkan dalam substansinya sama sekali jauh dari prinsip-prinsip yang dijalankan pada era *al-khulafa ar-rasyidun.* Karena itu, menurut kelompok terakhir ini, cita-cita untuk mendirikan kekhalifahan Islam global saat ini sangatlah tidak mungkin dan tidak realistis. Yang paling memungkinkan saat ini adalah mengadopsi semangat kekhalifahan Islam sebagaimana dicontohkan *al-khulafa ar-rasyidun* di dalam setiap Negara di mana umat Islam bernaung.

Sedangkan sekelompok orang yang mendukung dideklarasikannya ISIS menganggap bahwa hal itu merupakan langkah awal dari perwujudan cita-cita mendirikan kekhalifahan Islam secara global. Sekelompok orang ini berasal dari Negara yang berbeda, termasuk dari Indonesia. Mereka berjumlah beberapa orang saja, tapi karena militansi dan sikapnya yang radikal mengharuskan agar tetap diwaspadai keberadaan dan aktifitasnya. Tidak menutup kemungkinan sekelompok orang ini akan memengaruhi dan merekrut orang lain masuk ke dalam kelompok mereka. Yang lebih mengkhawatirkan dan perlu diwaspadai, sekelompok orang ini jangan sampai melakukan aksi sebagaimana yang dilakukan kelompok ISIS di luar negeri, yakni dengan menggunakan teror, kekerasan, kebiadaban dan tidak toleran.

Apabila diidentifikasi, sekelompok orang yang mendukung dideklarasikannya ISIS ini mempunyai karakter yang hampir sama, yakni kecenderungan mempunyai pemahaman yang kurang pas terhadap ajaran agama, sehingga menimbulkan

distorsi pemahaman dan sikap radikal dalam beragama, dimana hal itu bisa berpotensi memunculkan tindakan kekerasan dan tidak toleran. Oleh karena itu, upaya pencegahan agar kelompok ini tidak bisa berkembang bukan hanya dilakukan dengan menggunakan pendekatan keamanan (*security aproach*) saja tapi juga melalui pelurusan pemahaman keagamaan[]

2

ISLAM,
KEINDONESIAAN, DAN KEBANGSAAN

Islam telah menegaskan bahwa ia adalah rahmat bagi seluruh alam. Bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah yang di pundaknya ajaran Islam yang penuh dengan nilai humanis, pembela kebenaran dan hak asasi manusia (HAM). Islam adalah kabar gembira bagi seluruh isi dunia, karena ajaran dan nilai-nilainya mengangkat derajat manusia sebagai makhluk terbaik ciptaan Tuhan. Bahwa, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad, kecuali akan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Perjalanan Islam sebagai agama rahmat telah dibuktikan melalui catatan sejarah yang sangat panjang. Islam hadir di tengah-tengah kondisi rusaknya tatanan sosial, hukum dan moralitas bangsa Arab. Islam hadir membawa angin perubahan, merombak tata kehidupan bangsa Arab menuju arah yang lebih baik, penuh dengan nilai-nilai humanis, tegaknya kepastian hukum, serta moralitas yang baik dan beradab. Negeri Madinah adalah bukti bahwa Islam bukanlah ancaman bagi keberagaman, bagi minoritas, bagi para saudagar. Akan tetapi Islam adalah pelindung bagi keberagaman, penjaga harmoni, dan pembangkit filantropi yang menjadikan keseimbangan hubungan sosial.

Dalam perjalanan bangsa Indonesia, Islam hadir dengan berbagai rangkaian kisah-kisah heroik tentang perjuangan menegakkan kemerdekaan, HAM dan kesetaraan pendidikan.

Islam bersama para ulama, kyai, tokoh agama, ormas Islam, bahu membahu mencipta harmoni dalam keragaman Nusantara. Islam bukanlah ancaman bagi Nusantara, akan tetapi nilai-nilai yang semakin memperkuat *ukhuwah wathoniyyah* dan komitmen kerukunan. Walhasil, Islam menjelma sebagai agama dengan total pemeluk terbesar dan memberi kontribusi yang sangat luas terhadap kemajuan dan perkembangan bangsa Indonesia.

A. Memaknai Universalitas Misi Nubuwah

Setidaknya terdapat tiga misi yang terkandung dalam ajaran Nabi saw sebagai utusan Allah ketika pertama kali diutus di jazirah Arab.

Pertama, meluruskan penyimpangan aqidah. Pada dasarnya Nabi saw tidak membawa syariat baru. Beliau diutus untuk kembali menegakkan ajaran Allah yang telah diajarkan para nabi terdahulu. Salah satunya adalah ajaran tauhid atau keesaan Allah (monoteisme).

Bangsa Arab sendiri mengetahui ajaran tauhid dan mengakuinya. Hal ini sebagaimana terekam dalam Al-Quran bahwa ketika mereka ditanya *siapakah Tuhan yang Esa itu,* mereka menjawab Allah Tuhan Yang Esa.

"Dan jika engkau (Muhammad) bertanya kepada mereka (orang musyrik): "Siapakah Yang menciptakan langit dan bumi, dan menundukkan matahari dan bulan?" Pasti mereka akan menjawab: "Allah". Maka mengapa mereka bisa dipalingkan (dari kebenaran)? (QS. al-Ankabut: 61).

Namun demikian bangsa Arab justru membelokkan keyakinan mereka dari ajaran tauhid. Hal ini terbukti dengan penyembahan berhala yang mereka lakukan sebagai sebuah ibadah. Mereka menjadikan para berhala itu sebagai tuhan yang patut disembah. Hal ini jelas bertentangan dengan ajaran tauhid.

Perbuatan syirik yang dilakukan bangsa Arab berdampak pada rusaknya tatanan sosial kemasyarakatan. Mereka bukan

saja membelokkan keesaan Tuhan, melainkan juga membelokkan hukum-hukum Tuhan yang telah disampaikan oleh para Nabi terdahulu. Pada akhirnya, hukum Tuhan diganti dengan hukum manusia. Runtuhnya tatanan sosial bangsa Arab pada saat itu sebagian besar disebabkan oleh penyimpangan akidah dari ajaran para nabi.

Islam datang mengajak bangsa Arab kembali ke jalan yang benar sebagaimana digariskan dalam ajaran para nabi terdahulu. Ajaran tauhid menjadi fokus utama dakwah Nabi saw yang kemudian diikuti dengan membangun kesadaaran untuk kembali ke hukum Allah sebagi satu-satunya hukum.

Kedua, menyempurnakan moralitas anak manusia. Mengapa moralitas menjadi fokus dakwahnya? Hal ini dikarenakan bahwa moralitas merupakan fondasi bagi terbentuknya suatu tatanan sosial kemasyarakatan yang berkeadilan, damai dan sejahtera. Moralitas adalah prasyarat bagi terbangunnya kehidupan yang lebih baik.

Pada dasarnya Al-Quran datang untuk menegaskan kembali nilai-nilai yang telah diajarkan oleh kitab-kitab terdahulu. Al-Quran menegaskan kebenaran Taurat dan Injil sebagaimana difirmankan dalam surat an-Nisa ayat 47: *Artinya:*

"Wahai orang-orang yang telah diberikan kitab! Berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami turunkan (Al-Quran), yang membenarkan kitab-kitab yang ada pada kamu, sebelum kami mengubah wajah-wajah(mu), lalu Kami putar kebelakang atau Kami laknat mereka sebagaimana Kami melaknat orang-orang (yang berbuat maksiat) pada hari Sabat (Sabtu). Dan ketetapan Allah pasti berlaku (QS an-Nisa : 47).

Pesan yang dibawa oleh para Nabi adalah sama: mengajarkan keesaan Tuhan dan perwujudannya terutama dalam hukum moral. Inilah Islam. Adam, Nuh, Ya'kub, Syu'aib, Sulaiman, Isa as, semuanya Islam. Sulaiman mengajak Ratu Saba masuk Islam, Musa dalam perjuangannya melawan kesombongan dan kezaliman dan Luth dalam penolakannya terhadap budaya

homoseksual...semuanya mengimbau ditertibkannya hukum moral, yaitu Islam. Dalam surat Ali Imran ayat 84 difirmankan:

Artinya :"*Katakanlah : Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Dan kami tidak membedakan seorang pung dari mereka dan hanya kepada-Nya-lah kami menyerahkan diri."*(QS Ali Imran 3: 84).

Ketiga, menegakkan Hak Asasi Manusia. Islam melihat bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar setiap individu. Tidak ada kesempatan sedikitpun bagi individu untuk merenggut ha-hak individu lainnya. Islam sangat menjunjung hak hidup setiap individu, menjaga hak-hak sosial setiap individu.

Nilai-nilai humanisme menjadi ciri tersendiri dakwah Nabi saw. Persamaan hak, persaudaraan, dan perdamaian terus digulirkan di tengah-tengah masyarakat Arab pada saat itu. Ajaran ini ditujukan agar terbangun kesadaran dalam diri manusia betapa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang tidak boleh diganggu. Beberapa hadis merekam ajaran humanisme yang dibawa Nabi saw. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a:"*Telah bersabda Rasulullah saw: (hal) yang pertama kali dibalas diantara manusia pada hari kiamat adalah masalah darah"* (HR Bukhari dan Muslim).

Ada dua hal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Pertama shalat yang merupakan hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya. Kedua darah, yang merupakan hubungan horizontal antara manusia dengan manusia. Darah dalam hal ini berarti hak hidup.

Hadits ini secara tegas menempatkan permasalahan hak hidup menjadi perhatian serius. Begitu prinsipilnya hak hidup, Islam menegaskan bahwa permasalahan ini akan menjadi pertanyaan pertama saat dihisab nanti. Apakah kita sudah menghargai hak hidup orang lain, ataukah justru kita telah merenggut hak hidup orang lain ?

Al-Quran memberikan penegasan terhadap hadis ini sebagaimana tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 178: *"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) Qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih."* (QS. Al-Baqarah 2: 178).

Qishas adalah mengambil pembalasan yang sepadan. Pembunuhan harus dibayar dengan pembunuhan. Hukum *qishas* pada dasarnya akan menghalangi individu untuk merampas hak hidup individu lainnya. Orang akan berfikir seribu kali untuk melakukan tindak kekerasan atau kejahatan kepada sesamanya karena ia akan mendapat pembalasan serupa dengan perbuatannya. Dengan begitu, Islam sangat menjungjung tinggi hak-hak asasi manusia tanpa membedakan ras dan suku.

Bahkan dalam berperang yang penuh dengan kekerasan sekalipun Islam memberikan aturan yang melarang perbuatan semena-mena. Surat Al-Baqarah ayat 190 memberikan penjelasannya: *"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang telah membunuh kalian dan janganlah berlebihan karena Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan"*.

Berperang dalam Islam adalah tindakan membela diri dari serangan pihak luar yang hendak menghancurkan. Inilah konsep dasar dari jihad. Membela diri dari serangan pihak asing merupakan bagian dari jihad selama pembelaan diri itu berada di pihak yang benar.

Islam tetap menjunjung HAM dalam berperang. Secara tegas Islam melarang berlebihan dalam berperang. Membunuh anak-anak, janda-janda, orang jompo dan binatang ternak merupakan larangan keras dalam berperang. Ini menunjukkan

bahwa perang yang notabenenya merupakan sebuah kekerasan tetap memiliki tata aturan yang mengatur hak-hak dasar manusia, menutup kemungkinan terjadinya tindakan yang akan merenggut hak-hak dasar individu.

Hampir tidak pernah ditemukan dalil agama, baik itu Al-Quran dan Hadits, maupun ijtihad ulama yang memberikan kesempatan kepada seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak kekerasan yang bertentangan dengan nilai-nilai HAM.

Inilah nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ajaran yang diemban oleh Nabi agung Muhammad saw. Beliau adalah utusan Allah ke muka bumi yang bertugas menyampaikan nilai-nilai ketuhanan, mengangkat derajat manusia sebagai makhluk yang sempurna di sisi Tuhan dengan ajaran cinta kasih. Ajaran-ajarannya universal, berlaku bagi setiap masa. Kehadirannya adalah kabar gembira bagi segenap umat manusia karena beliau adalah sosok pejuang keadilan bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia.

B. Islam dan Misi *Rahmatan lil alamin*[25]

Islam hadir di tanah Arab dengan misi memperbaiki tata kehidupan manusia menuju arah yang lebih baik, menegakkan hukum secara adil, memberangus segala bentuk penindasan dan menjamin kehidupan yang sejajar bagi seluruh umat manusia, apapun warna kulit dan latar belakang statusnya. Dalam kata lain, Islam adalah moralitas terbaik bagi umat manusia menuju kehidupan yang aman, damai dan sejahtera.

Moralitas Islam begitu nampak dalam berbagai ajaran, nilai dan hukum yang tersurat dalam Al-Qur'an dan hadits. Pada keduanya kita bisa menemukan berbagai kemuliaan Islam, keagungan hukum Allah sebagai satu-satunya aturan yang harus

---

25. Makalah Maulid Nabi Muhammad saw Tingkat Kenegaraan oleh Prof. Dr. H. Yusny Saby, MA, Rektor IAIN ar-Raniry Nangroe Aceh Darussalam dengan tema "Misi Kenabian Muhammad saw Sebagai Pembawa Perdamaian."

kita taati dan patuhi. Islam adalah berkah bagi seluruh manusia, tanpa terkecuali.

a. Islam Agama Rahmat

Kita mengetahui bahwa peran utama Nabi Muhammad saw adalah pembawa perdamaian. Dengan demikian maka logikanya adalah bahwa pengikut Nabi Muhammad saw-pun harus menjadi pelopor perdamaian. Hal ini perlu diungkapkan mengingat keberadaan sejumlah masyarakat kita, bangsa Indonesia ini, bahkan di luar Indonesia, yang mengaku dirinya sebagai pengikut Nabi Muhammad saw, namun nyatanya telah terseret, baik sadar atau tidak ke dalam kancah yang merusak prinsip dan suasana damai. Di antara kegiatan tersebut adalah: kekacauan, kerusuhan, pemboman di tempat umum, unjuk rasa yang merusak, mencederakan bahkan menghilangkan nyawa, pungli, korupsi, kolusi, sogok, kronisme dan nepotisme. Semua perilaku negatif ini telah menjadi akar penderitaan dan sangat merugikan bangsa kita. Lebih dari itu ia telah merusak kehidupan damai yang kita semua cita-citakan dan perjuangkan. Melihat kenyataan masyarakat tersebut marilah kita cermati perjuangan Nabi Muhammad saw dalam mengusahakan damai ini, antara lain:

Islam Agama Damai.

Pesan Allah, sebagai ajaran pokok yang diemban oleh Nabi Muhammad saw untuk disampaikan kepada umat manusia adalah damai. Ini dibuktikan oleh kenyataan bahwa ajaran yang dibawakan beliau bukanlah dinamakan dengan Muhammadanisme, Arabisme, Quraisyme, atau isme-isme lain, yang biasa disebarkan oleh pembesar-pembesar kaliber dunia. Ajaran yang beliau bawakan kepada umat manusia yang juga sampai kepada kita ini adalah Islam, yang berarti selamat, sejahtera, tentram, damai. Ini bermakna bahwa ajaran yang dibawakan beliau intinya damai. Dengan demikian siapapun yang mengatakan bahwa dirinya sedang mengembangkan ajaran Nabi Muhammad saw yaitu Islam, harus mengutamakan prinsip

damai, bukan sebaliknya. Prinsip damai ini harus tertuang dalam setiap langkah, mulai dari perencanaan sampai kepada pelaksanaan, dari sikap individu sampai kepada kebijakan negara, baik antara sesama atau dengan bangsa lain.

Secara kelembagaan Nabi telah merumuskan beberapa pakta perdamaian dalam kebijakannya. Di antara yang terkenal adalah Perjanjian Hudaybiyah (bahkan dua termin), sampai kepada Piagam Madinah yang mencakup seluruh elemen masyarakat, dan kemudian menjalankannya dengan setia. Sejumlah ayat dan hadits telah mengungkapkannya dengan jelas. Oleh karena itu kalau ada kegiatan yang nyata-nyata merusak kedamaian, siapapun yang melakukannya atau apapun alasannya sudah pasti itu bukan bersumber dari ajaran Islam. Sangat mungkin itu adalah ekspresi emosi perorangan atau kelompok yang mengatasnamakan Islam, karena ia bertentangan dengan misi Nabi Muhammad saw yang sebenarnya membawa perdamaian dan kesejahteraan.

Oleh karena itulah sejumlah prinsip dan kegiatan lain yang beliau lakukan ditujukan untuk mendukung damai, mendukung Islam, antara lain: pema'af, kerja keras, toleransi, jujur, tidak ada diskriminasi, setia kawan, tidak putus asa, berorientasi ke depan, penuh perhitungan, tegas, setia kepada sistem, patuh pada hukum, sayang kepada yang lebih muda, hormat kepada yang lebih tua, dan sebagainya. Semua itu adalah prinsip dan kebijakan yang dimaksudkan untuk menunjang tercipta dan terpeliharanya kedamaian untuk seluruh umat manusia sebagai inti misi kerasulan yang beliau emban.

Sikap Pemaaf

Tata cara penyiaran agama atau yang dinamakan dengan kegiatan dakwah yang diemban oleh Nabi Muhammad saw adalah Islam, damai, tanpa paksaan, walau perlakuan tidak pantas yang dialami terhadap diri dan pengikutnya telah sangat menyakitkan. Masa tiga belas tahun di Mekah adalah masa yang sangat genting antara hidup dan mati. Penguasa dan masyarakat

Quraisy Mekah telah mengeluarkan putusan dan tindakan yang sangat menyakitkan Nabi Muhammad saw dan pengikut beliau. Kalaulah kemudian kekerasan dibalas juga dengan kekerasan pada masa itu, apa jadinya agama mulia yang diajarkannya. Jangan-jangan ia hanya bisa bertahan sebagai satu sekte sempalan saja di sana. Tidak usah mengharap agama mulia ini akan sampai ke negeri kita dan kepada kita, apalagi ke seluruh pelosok dunia, seperti sekarang ini. Ajaran toleransi dan pemaaf ini adalah sendi bertahannya kedamaian. Cobalah kalau bangsa kita, terutama para pemimpinnya dapat saling memaafkan setelah selesainya "upacara pertarungan" yang seolah saling bermusuhan. Mereka dapat saling berangkulan, akan sangat menjadi contoh teladan bagi rakyat pengikut mereka. Rakyat juga akan saling memaafkan dan akan hidup dalam kedamaian yang berkepanjangan. Pengalaman menunjukan bahwa ketegangan yang berkesinambungan yang terjadi dalam masyarakat tumbuh dan berakar dari perseteruan para pemimpin mereka, yang sebagiannya dari sisa-sisa masa pemilihan yang terlalu berorientasi kepada "meraih kekuasaan," bukan kepada kedamaian antar sesama.

Islam Anti-Diskriminasi

Ungkapan Nabi Muhammad saw yang terkenal mengenai ini adalah: "tidak ada bedanya antara orang Arab dengan orang 'Ajam (asing) kecuali kualitas taqwanya." Untuk memahami ajaran ini dalam budaya kita dapat dijelaskan bahwa penunjukan/ pengangkatan untuk suatu jabatan atau penerimaan untuk satu formasi yang dibutuhkan bukanlah karena hubungan sanak saudara, atau suku bangsa, atau karena suka tidak suka, tetapi karena potensi/profesionalitas yang dimiliki oleh orang itu untuk jabatan dan formasi tertentu. Potensi dapat dijabarkan dalam kekuatan fisik (sehat wal 'afiat), potensi intelektual, dibuktikan dengan kualifikasi ijazah dan test khusus, bahkan *proper test,* potensi pengalaman, keterampilan, dan sebagainya, dan di atas segalanya tentu akhlak mulia, atau dalam bahasa damai: bertakwa kepada Allah SWT. Ciri utama orang bertaqwa adalah

budi pekertinya yang mulia. Ini dapat diuji dan diketahui dengan berbagai cara. Sejarah telah membuktikan bahwa kerusuhan muncul dari masa ke masa karena sebahagian rakyat kita merasakan perbedaan perlakuan dalam memperoleh kesempatan menikmati buah pembangunan di Republik ini.

Pengakuan Terhadap Kesetaraan

Bahwa sebelum kebangkitan Nabi Muhammad saw, masyarakat hidup dalam suasana pendewaan laki-laki, sedangkan perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap saja. Perempuan berstatus sebagai objek untuk dikuasai, bahkan adakalanya dapat diwarisi, tak ubahnya sebagai benda belaka. Nabi Muhammad-lah yang telah mengajarkan manusia bahwa perempuan dapat menjadi tiang negara, perempuan adalah ibu dan guru utama manusia, para ibu adalah pintu menuju ke surga bagi anak-anaknya. Sejak itulah orang perempuan diberi hak untuk memiliki harta, dan tidak dapat diganggu gugat haknya oleh siapa-pun tanpa alasan yang benar. Pengakuan kepada kesetaraan ini telah berdampak sangat besar kepada kehidupan kedamaian manusia khususnya antara laki-laki dan perempuan dan anak-anak yang mereka lahirkan.

Ketika seseorang bertanya kepada 'Aisyah, isteri Nabi, tentang apa saja kegiatan Nabi di rumah, 'Aisyah menjawab: "Beliau bekerja juga membantu kegiatan rumah tangga dan keluarga." Nabi Muhammad saw bukanlah layaknya seorang raja di rumahnya yang selalu menuntut untuk dilayani, tetapi beliau juga bersedia melayani dan melakukan pekerjaan rutin rumah tangga.

Ketika suatu saat Nabi telah membuka kelas untuk mengajar di masjid Madinah khusus untuk laki-laki, kaum perempuan pun kemudian menuntut haknya untuk diajarkan oleh Nabi. Nabipun kemudian memenuhinya. Kesetaraan hak untuk memperoleh pendidikan telah dimulai oleh Nabi Muhammad saw lima belas abad yang lalu. Karena itulah ketika Ummi Waraqah dipercayakan Nabi untuk memimpin kegiatan

keagamaan di kompleknya adalah karena dia dianggap telah tinggi ilmunya dan menguasai dalam bidangnya. Kalau masih saja ada anggota atau kelompok masyarakat yang tidak memberi peluang sama dalam masalah pendidikan ini berarti mereka melakukan ketidakbijakan dan ini bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad saw .

Lebih dari itu ketidaksetaraan adalah pangkal kesenjangan, dan ini menjadi penyebab timbulnya ketegangan, yang akan mengganggu kedamaian yang diajarkan agama.

Islam Mengajarkan Toleransi

Toleransi atau *tasamuh* adalah di antara prilaku dan misi Nabi Muhammad saw kepada umat manusia. Toleransi ini telah dipraktikkan dan kemudian dipromosikan di mana dan kapan saja. Sikap toleransi berarti juga tanpa memaksakan kehendak pribadi atas orang lain. Toleransi ini dianjurkan dalam segala bidang kehidupan, terutama sekali dalam bidang kehidupan keagamaan. Toleransi bukanlah tukar menukar atau jual beli antara yang satu dengan yang lain. Tetapi ia sebagai sikap menghormati dan memberi peluang kepada orang lain untuk berpendapat, bersikap, dan bahkan berbuat yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita pahami atau anut, sejauh tidak menyalahi hukum yang berlaku. Firman Allah dalam Al-Qur'an :

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. (Q.S. al-Kâfirûn: 6)

Ayat tersebut memberi pelajaran kepada kita betapa toleransi Nabi kepada orang di luar kelompoknya telah menjadi modal bagi perdamaian dunia. Bahwa toleransi adalah modal dalam melaksanakan dan memelihara suasana damai dalam skala yang lebih luas. Alangkah bahagianya kita sebagai sebuah bangsa besar Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, budaya, adat istiadat dan agama kalau dapat mengamalkan perilaku toleransi sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Kita mengetahui ketika Nabi dan pengikutnya kembali ke Mekah,

ketika segala kewenangan berada di tangannya, beliau tidak melakukan paksaan atas tradisi dan agama masyarakat, bahkan sikap toleransi lah yang dipertunjukkan. Masing-masing jamaah hidup dalam naungan saling menghormati dan menghargai.

Tegas dalam Penegakan Hukum

Nabi Muhammad saw pernah mengatakan; "Apabila ada dua Muslim berhadapan satu sama lain dalam siaga berkelahi/bertempur, maka keduanya (baik yang kalah atau yang menang) masuk neraka. Ada yang bertanya, mengapa demikian ya Rasulullah? Yang masuk neraka kan cuma orang yang menang saja, sedangkan yang kalah tidak? Yang kalahpun sama saja, karena dia juga yang telah memprovokasi rivalnya untuk berkelahi dengannya." Dari ungkapan ini dapat kita pahami bahwa perkelahian antar umat apalagi yang mengakibatkan kematian, apapun alasannya, tidak dapat dibenarkan sama sekali. Dengan kata lain tidak ada satupun yang berhasil, yang kalah dan yang menang akan sama mendapat hukuman Allah, tentu di samping hukuman dunia sebagaimana ketentuan.

Nabi Muhammad saw bahkan pernah mengatakan bahwa kalaulah anak beliau yang bernama Fatimah melakukan kesalahan, diapun akan diberi hukuman yang sama dengan yang lainnya juga.

Berjuang dengan Istiqamah

Apa yang diyakini benar, atau yang telah dimusyawarahkan dan diputuskan bersama sebagai kebijakan yang dianggap benar maka akan diperjuangkan terus secara bersama-sama. Perjuangan sering dikatakan dengan jihad. Jihad kecil melibatkan fisik, sedangkan jihad besar melibatkan aspek psikis, jiwa, diri, nafsu, godaan. Inilah yang benar-benar jihad yang harus diperjuangkan oleh manusia beriman. Seharusnya sebelum melakukan jihad ke luar berjuanglah lebih dahulu untuk menguasai nafsu murka, nafsu kuasa, nafsu kaya pada diri masing-masing yang biasanya susah terkendali. Namun ada lagi jihad utama yang

berkaitan dengan kehidupan bersama dalam satu negara yaitu mengingatkan secara benar kepada pemimpin yang dianggap telah melakukan kebijakan yang salah.

Kesediannya memberi ingat kepada pemimpin sesuai dengan prosedurnya adalah jihad yang paling utama dan akan menghilangkan kecurigaan kepada pemimpin, yang ujungnya akan membuahkan perseteruan. Dalam keseharian Nabi adakalanya diingatkan oleh para sahabat yang paham akan sikap Nabi. Dalam hal ini seharusnya pemimpinpun bersedia diingatkan akan kesalahan atau kekeliruan yang telah terjadi atau mungkin akan terjadi karena kebijakan tertentu. Inilah pemimpin yang berjiwa besar. Kita sebagai bangsa besar tentu sangat berbangga kepada pemimpin kita yang sabar dan tidak pernah emosi karena koreksi-koreksi yang beliau terima tentu dalam beragam bentuknya, dari yang lembut, santun, sampai yang tidak pantas diungkapkan. Inilah pemimpin yang berjiwa besar yang telah meneladani perilaku Nabi Muhammad saw.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama,* bahwa inti ajaran agama Islam yang dibawakan Nabi Muhammad saw adalah untuk menciptakan damai, selamat, sejahtera, yang perlu direalisasikan baik dengan pribadi, dalam keluarga, masyarakat, bangsa maupun dengan komunitas dunia.

Kedua, bahwa siapapun yang mengaku dirinya sebagai pengikut Nabi Muhammad saw , apakah raja, kepala negara, menteri, gubernur, bupati, konglomerat, dan lain sebagainya, haruslah ia berpikiran dan bersikap yang menghasilkan damai. Kalau tidak demikian maka sebenarnya yang bersangkutan bukan pengikut Nabi Muhammad saw yang sejati, walau ia tidak mengakuinya. (Kita mengucapkan selamat kepada pemimpin negeri ini yang telah dengan tulus dan susah payah mengusahakan terciptanya kedamaian di negeri ini, dari Aceh sampai Papua, walaupun tentu saja belum seluruh pelosok negeri dapat merasakannya).

Ketiga, bahwa tindakan-tindakan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan kerusuhan, kerugian, bahkan kematian adalah perbuatan yang anti damai, dan sekaligus bertentangan dengan ajaran yang dibawakan Nabi Muhammad saw. Untuk itu perlu ditangani dengan segera agar tidak berkembang dan meluas, yang kerugian nya tidak bisa kita ramalkan.

Keempat, bahwa usaha-usaha menegakkan kedamaian sebagaimana yang telah diusahakan oleh pemerintah selama ini perlu mendapat dukungan penuh dari semua pihak. Usaha penegakan supremasi hukum serta pemberantasan korupsi, pungli, dan nepotisme yang telah berlangsung lama, benar-benar telah merusakkan sendi-sendi kehidupan normal, dan telah menjadi akar kerusuhan yang menyengsarakan.

Kelima, bahwa pemimpin dan cendekia, dalam setiap tingkatan adalah pewaris Nabi. Beliau semua adalah model panutan masyarakat dan bangsa masa kini. Bagi yang belum siap menjadi teladan dan model hendaknya jangan berusaha jadi pemimpin. Bagi yang telah menjadi pemimpin atau umara dan tidak bersedia menjadi teladan hendaknya bersedia mundur dengan terhormat. Negeri kita yang penduduk 220 juta jiwa masih mempunyai putra-putri yang mampu menjadi teladan dalam fikiran dan perbuatan;

Keenam, bahwa rakyat dan masyarakat dalam memilih pemimpin hendaklah bertindak sangat hati-hati, jangan sampai salah pilih. Pilihlah yang Anda yakini akan dapat menjadi panutan, yang akan mau dan mampu menciptakan damai, tentram, sejahtera, bukan sebaliknya. Sekali salah pilih dampak buruknya akan berlangsung lama. Janganlah pilih pemimpin yang hanya pandai membuat janji, atau karena sudah terlanjur berhutang budi, dan sejenisnya. Siapapun yang terpilih, dukunglah dengan sepenuh hati, dan siap mengoreksi ketika ada kekeliruan dalam kebijakannya.

b. Empat Pilar Utama Negeri Madinah

Terlalu banyak cerita mengenai pernik-pernik sikap dan perilaku Rasul yang dapat menjadi teladan bagi kita semua. Beberapa peristiwa memberi gambaran bahwa sejak fase awal, ia telah mendapat julukan sebagai al-Amin (yang dapat dipercaya) karena kejujuran dan ketulusannya. Kasus penyelesaian sengketa kabilah Arab mengenai hajar aswad oleh nabi memberikan sinyal bahwa sejak awal ia memperoleh kepercayaan secara alami sebagai pemimpin umat. Ini hanyalah sebagian contoh dari sekian banyak keteladanan seorang nabi yang diberi julukan Al-Qur'an dengan sebutan *uswah hasanah,"Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Alah dan (kedatangan) hari Kiamat yang banyak mengingat Allah.* (QS. al-Ahzâb: 21)

Spirit yang diperlihatkan oleh nabi Muhammad saw dalam bentuk kesungguhan menghadapi pahit getirnya hidup di awal masa perjuangan, dapat dijadikan sebagai inspirasi dan *elan vital* untuk berbuat yang terbaik tatkala berhadapan dengan masalah bersama seperti musibah yang datang silih berganti, egoisme sektoral, pelanggaran hukum, ketidak pedulian pada kepatutan sosial, kecerobohan terhadap lingkungan dan lain-lain.

Meski demikian, kita tak boleh lupa bahwa dalam rentangan sejarah panjang selalu saja ada antagonisme dengan aneka tujuan. Pencitraan buruk terhadap nabi selalu saja ada semenjak ia melakukan reformasi total terhadap kepercayaan bangsa Arab yang bersifat paganistis menuju tauhid, kebiasaan mengunggulkan superioritas ras menuju kesamaan derajat dan kehidupan yang egaliter. Mereka yang merasa terusik oleh kehadiran sang reformer merasa telah diinjak-injak tradisi dan martabatnya sehingga menjadikan Muhammad saw sebagai ancaman serius.

Pada abad sembilan belas dan awal abad dua puluh kita dapat membaca deretan panjang orientalis atau pengamat soal-soal ketimuran yang bersuara lantang mencibir, mengejek

atas nama kebebasan berekspresi, kajian ilmiah tanpa melihat secara fenomenologis bahwa sosok Muhammad saw menjadi ikon spritual dunia Timur yang berkembang begitu pesat dan mencengangkan.

Jika di surau-surau pedesaan orang membaca maulid mengagumi pribadi Muhammad saw lalu berusaha menginternalisasi nilai melalui pembacaan biografi dari karya al-Barzanji, orang lain juga bisa melihatnya dari sudut pandang lain, termasuk melihatnya sebagai rasul pembawa misi *rahmatan lil alamin* sebagaimana dilukiskan dalam Al-Qur'an surat al-Anbiyâ 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Q.S. al-Anbiyâ: 107)

Apa maksud rahmat bagi alam semesta? Al-Thabari dalam *Tafsir al-Thabari* menyitir satu pandangan yang menyatakan bahwa rahmat bagi alam semesta tersebut berlaku universal untuk siapa saja tak terbatas kaum muslimin saja.

Label sebagai utusan yang membawa rahmat inilah yang didakwahkan nabi kepada lingkungannya dengan segala suka dan duka dan sekaligus memberikan penegasan kedudukan Islam yang menyejarah semenjak didakwahkan dari semenanjung Arabia ke wilayah sekitar dan akhirnya sampai ke negeri kita melalui rute perdagangan.

Terjadinya proses dialog dan akulturasi budaya dengan wilayah penyebaran Islam di berbagai belahan dunia memperlihatkan elastisitas ekspresi sosiologis dan antropologis agama Islam yang tidak kaku. Saudara kita yang ada di India, Mesir, Iran, Turki, India, Pakistan dalam beberapa hal memperlihatkan ekspresi keagamaan yang tidak sama persis dengan kita atau saudara kita yang ada di tanah Arab meski semuanya mengacu kepada kesaksian tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad saw adalah utusanNya.

Dalam konteks Indonesia Islam yang datang dibawa para pedagang melalui kawasan pesisir juga memperlihatkan adanya persinggungan dengan budaya lokal yang ada. Ini yang dapat kita lihat misalnya pada bentuk arsitektur masjid khas Jawa sebagaimana digambarkan oleh GF. Pijper dalam bukunya, *Studien over de Geschiedenis van de Islam in Indonesia 1900 – 1950,.* yang memberi kejelasan akan corak khas identitas masjid Jawa. Selain itu juga terlihat dalam segi-segi kehidupan sehari-hari seperti dalam tembang-tembang Jawa berisikan ajaran Islam dengan aransemen lokal. Gubahan para penyebar Islam yang sering dikenal dengan Walisongo.

Ruang gerak berdialog dengan kebudayaan lokal yang cukup lebar inilah yang antara lain menjadikan pertumbuhan pemeluk Islam begitu cepat sejak dari semenanjung Arabia ke wilayah sekitar dan akhirnya ke kawasan Timur jauh seperti negeri kita ini. Dewasa ini pemeluk Islam berkembang secara signifikan hingga mencapai 1,5 milyar lebih dan mengalami pertumbuhan pesat baik melalui kelahiran maupun konversi.

Mungkin saja ada pertanyaan apakah memang dalam realitas empirik kita telah mampu menjadikan konsep *rahmatan lil alamin* sebagai kata kunci yang melandasi peradaban Islam yang peduli pada perdamaian, keadilan, kebebasan, keseimbangan, toleransi, dan persamaan? Sebuah pertanyaan yang tidak hanya cukup dijawab dengan tulisan di atas kertas dan orasi di mimbar pidato seperti ini, tetapi harus dijawab dengan kenyataan yang menyejarah dalam bentuk sepak terjang umat Islam yang benar-benar mampu menjadi teladan sebagai pengayom tatkala besar dan mampu menjadi minoritas kreatif serta santun tatkala kecil. Jika memang belum, maka inilah agenda mendesak yang perlu disebarkan sebagai spirit yang melandasi dakwah dan perjuangan menuju Islam *rahmatan lil alamin* di tengah-tengah abad milenium ketiga.

Ketika nilai-nilai seringkali hanya berhenti pada tataran kertas dan orasi, mungkin saja ada sesuatu yang hilang yakni

keteladanan sebagaimana diperlihatkan oleh nabi Muhammad saw. Di antara kesuksesannya dalam menjalin komunikasi publik adalah kemampuannya menjadi contoh teladan sehingga mampu menjadikan pengikutnya termotivasi untuk berbuat sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan bahkan lebih dari yang diharapkan. Di sinilah ia menjadi seorang pemimpin transformasional (*transformational leader*) dengan ciri mampu menjadikan pengikut mengubah orientasi pada kepentingan dirinya sendiri menjadi kepentingan kelompok

Ikon Islam *rahmatan lil alamin* ini menjadi sedemikian strategis ditilik dari perkembangan peradaban dewasa ini yang di sana sini masih saja ada ketimpangan menyangkut pengentasan kemiskinan, pendidikan, jender, kesehatan, lingkungan, ketidakadilan, kemitraan global dll.

Artikulasi tokoh sentral seperti nabi Muhammad saw mungkin saja hanya dianggap sebagai ikon panutan di kalangan umat Islam saja, tetapi tanpa kita sadari secara perlahan tapi pasti ia telah menyadarkan akan arti penting sopan santun dan etika universal di tengah-tengah arus deras ideologi bernama demokrasi. Kasus Jylland Posten yang heboh adalah contoh kongkrit bahwa kebebasan yang biasanya dikaitkan dengan semangat berdemokrasi ternyata perlu juga menghargai kearifan dari belahan dunia lain (dunia Timur) yang sarat akan nilai-nilai substansial seperti penghargaan terhadap nabi utusan Allah, keyakinan fundamental pada agama yang menjadi hak setiap orang.

Apapun alasannya entah itu kritik atau kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat, manakala tidak peduli terhadap ranah tradisi dan budaya orang lain akan berakibat buruk. Apalagi kalau kritik itu disampaikan dalam ekspresi yang tidak lumrah dalam ukuran-ukuran kepatutan umum. Kiranya tepat kalau dikatakan bahwa kritik itu ibarat obat mujarab bila diminum sesuai petunjuk, mengikuti dosis yang ditentukan akan menjadi penawar segala penyakit. Sebaliknya ia menjadi racun

apabila menyalahi kepatutan dan salah dalam penggunaannya.

Secara sosiologis pemeluk agama hakekatnya adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan pengalaman terhadap Tuhan yang diyakini sebagai pencipta alam semesta, pengendali dan penentu peruntungan nasib manusia. Konsekuensi logis dari situasi ini adalah munculnya solidaritas antar sesama pemeluk suatu agama sehingga seringkali memperlihatkan perilaku bersama. Konsep *ummat* pada hakekatnya adalah pengejawantahan dari pengalaman religi akan kedudukan manusia sebagai hamba yang memiliki kewajiban untuk mengabdi kepadaNya dalam bentuk ibadah berupa ritual ataupun amal soleh terhadap sesama.

Pada sisi yang lain secara normatif ditemukan adanya ajakan untuk menciptakan solidaritas dan persudaraan di antara sesama pemeluk suatu agama. Dalam Islam terdapat ayat yang memberikan penegasan akan arti pentingnya solidaritas internal yang seringkali disebut dengan *ukhuwwah*. Al-Qur'an menyatakan :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua sudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.(Q.S. al-Hujurât: 10)

Konsep umat ini telah melembaga menjadi institusi sosial yang memiliki daya ikat luar biasa antara satu anggota dengan lainnya, suatu kekuatan potensial yang bisa digerakkan untuk kepentingan yang positif bagi kemanusiaan seperti kepedulian terhadap sesama ketika sedang menghadapi musibah, termasuk kepedulian terhadap sesama dalam rangka mengatasi kemiskinan dan ketimpangan hidup, penegakkan hukum dan lain-lain.

Pada sudut pandang yang lain solidaritas internal agama yang belebihan tak jarang menimbulkan potensi konflik laten yang dapat mengancam kemanusiaan itu sendiri jika berhadapan dengan solidaritas internal agama lain. Agama memang tidak menyuruh umatnya untuk menyakiti sesama, berbuat kejahatan

terhadap sesama, akan tetapi acapkali solidaritas yang terlalu eksesif dan penafsiran yang terlalu eksklusif bisa mengabaikan keharusan menjaga perdamaian dan harmoni dalam kehidupan. Inilah konflik yang oleh sementara peneliti dikatakan bernuansa keagamaan yang sering terjadi secara siklis dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, berpotensi selalu terjadi pada negara dengan kebhinekaan latar belakangnya seperti kita ini.

Tentu saja kita merasa prihatin melihat saudara-saudara kita sebangsa setanah air merasa berhadap-hadapan akibat rasa solidaritas keagamaan yang terlalu berlebihan tadi. Konflik Situbondo 1996, konflik Ambon, konflik Poso, konflik Maluku hanyalah contoh peristiwa menonjol di samping insiden kecil yang bisa terjadi sewaktu-waktu dan berpotensi mengganggu harmoni anak-anak manusia yang rindu akan kedamaian di negeri ini.

Dalam perspektif kehadiran Nabi Muhammad saw sebagai *rahmatan lil alamin,* Islam mengajarkan nilai-nilai universal dan menjunjung tinggi toleransi, keragaman dan kebhinekaan, moderat, dan perdamaian. Penekanan pada semangat ajaran ini perlu mendapat dukungan dari kita semua apalagi kita hidup dalam negara yang memiliki keragaman di satu sisi dan berhubungan dengan bangsa lain yang juga beragam.

Perjalanan hidup Rasulullah saw secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua fase yakni fase Mekah dan fase Madinah dengan karakteristiknya masing-masing. Pada fase Mekah perhatian lebih banyak diberikan pada upaya konsolidasi membangun fondasi aqidah yang kuat berupa seruan kepada ajaran tauhid pada kalangan Quraisy. Dinamika seruan atau dakwah tak selamanya memberi kegembiraan, sebaliknya banyak memberinya pengalaman pahit tatkala muncul reaksi penolakan dari kalangan Quraisy terhadap ajakannya dalam bentuk gangguan keamanan mulai dari yang ringan hingga mencapai titik kulminasi dalam bentuk konspirasi yang membahayakan keselamatan Rasul. Inilah yang membawanya untuk eksodus

bersama sahabat-sahabatnya atau hijrah ke Yatsrib (Madinah) meninggalkan rumah kelahiran dan segala hal yang dimiliki di Mekkah.

Fase kedua tatkala ada di Madinah membangun masyarakat baru bermodalkan empat pilar utama yakni :

1. Mendirikan masjid, merupakan langkah awal yang ditempuh Rasul di Madinah yang bukan saja berfungsi sebagai tempat ibadah tetapi sekaligus pusat kebudayaan, yakni tempat berkiprah kaum muslimin dalam membangun masyarakat Islam. Masjid sekaligus menjadi alat pemersatu umat yang mungkin saja dalam kesehariannya punya latar belakang etnik, tradisi dan budaya yang berbeda-beda.
2. Mempererat pesudaraan antara kaum pendatang dengan penduduk asli Madinah (Ansar dan Muhajirin). Ini juga merupakan masalah penting dilihat dari sudut pentingnya membangun solidaritas ummat. Secara psikologis antara Ansar dan Muhajirin bisa saling mengklaim akan signifikansinya masing dalam perjuangan bersama Rasul. Yang satu merasa menjadi penolong dan berjasa terhadap Rasul dan sahabatnya ketika mereka berbondong-bondong hijrah dari Mekah ke Madinah. Kelompok yang lain (Muhajirin) juga merasa paling berjasa karena menyertai Rasul dalam suka dan duka menempuh perjalanan dari Mekah ke Madinah. Potensi konflik semacam ini bisa saja terjadi secara berulang karena munculnya sikap merasa paling hebat dibanding dengan orang lain.
3. Menciptakan kerjasama bahu membahu antara muslim dengan non muslim melalui Piagam Madinah yang menjadi landasan bersama dalam bermasyarakat dan bernegara pada waktu itu. Kesadaran akan kebhinnekaan dan keragaman masyarakat yang telah dicontohkan oleh nabi waktu menjadi sebuah keniscayaan dalam rangka memperkokoh bangunan masyarakat Madinah melalui penanaman tanggung jawab secara proporsional. Inilah

sebuah kecerdasan mencandra potensi konflik laten yang memang sering terjadi akibat orientasi etnik dan kelompok yang berlebih-lebihan, khususnya di Madinah sebelum kedatangan Rasulullah saw.

4. Membuat pondasi untuk kehidupan politik, ekonomi dan sosial. Ini dilakukannya sebagai penegasan untuk mengartikulasikan hubungan antara Islam dan negara yang merupakan kebutuhan mendesak pada saat itu. Ayat-ayat yang turun pada waktu banyak berhubungan dengan soal-soal hukum dan Rasul senantiasa memberikan penjelasan-penjelasan dan tindakan nyata. Dalam kehidupan bernegara sangat dibutuhkan mekanisme pemecahan masalah berdasarkan prinsip musyawarah sebagaimana dinyatakan Al-Qur'an:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal kepadaNya. (Q.S. Ali Imrân: 159)

Empat pilar yang menjadi landasan bagi pembinaan masyarakat Madinah ini dapat dipandang sebagai miniatur dari dinamika suatu bangsa dalam mencapai cita-cita bersama. Ada ruang publik yang perlu disediakan sebagai tempat berkiprah dan berkomunikasi antar warga, sebagai tempat untuk bermusyawarah memecahkan suatu masalah dan sebagai lambang persatuan. Ada kebutuhan untuk menciptakan kohesi sosial yang merupakan unsur penguat suatu bangsa dalam menghadapi masalah bersama serta mempertahankan kedaulatan dari ancaman separatisme. Tentu saja entitas etnik dan budaya masih saja dipelihara sebagai wujud kekuatan untuk menumbuh-kembangkan demokrasi atas dasar prinsip musyawarah yang dijelaskan Al-Qur'an di atas.

Perubahan besar dalam sejarah peradaban tidak selalu terjadi akibat dari keputusan politik tetapi lebih banyak diwarnai oleh orientasi nilai-nilai yang melandasi cara bersikap dan bertindak. Ketaatan para sahabat nabi dan para pelanjutnya pada hakekatnya berpangkal pada tingkat apresiasi mereka terhadap sosok Nabi Muhammad saw yang membawa nilai-nilai perubahan dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara waktu itu. Nilai-nilai inilah yang dalam banyak hal masih saja relevan untuk dipergunakan bagi masyarakat Timur seperti kita ini.

Sebagai bangsa yang secara geografis mendiami kawasan Timur tentu saja memiliki dinamika sejarah pemikiran yang tidak sama dengan bangsa lain di Barat. Agama menjadi nafas dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di sini agama dan negara punya jati diri masing-masing namun keduanya saling membutuhkan satu dengan yang lain. Agama memerlukan negara sebagai alat untuk mengakomodasi kepentingan pemeluknya dalam melaksanakan ajaran baik dalam peribadatan dan kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya negara juga memerlukan agama, karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualitas.

Konsekuensi logis dari identitas pemikiran yang tidak sama inilah yang seharusnya membuat pihak lain dapat memberikan pengakuan dan penghargaan terutama menyangkut kehidupan keagamaan dalam ranah publik sehari-hari. Dunia menjadi ramai justru karena adanya perbedaan cara pandang dan pemikiran epistemologis yang bervariasi. Jadi, tidak pas kalau kita yang punya entitas sebagai bangsa Timur Indonesia asli tak mengembangkan cara berpikir dengan spirit Timur yang boleh jadi akan menjadi pandangan hidup alternatif di tengah-tengah kegalauan bangsa-bangsa di dunia akan kecemasan universal akibat kerusakan moral dan kerusakan alam yang semakin memprihatinkan.

Ucapan, sikap dan perilaku Rasulullah saw tak akan ada habisnya memberi inspirasi bagi kita dan tidak cukup hanya ditulis dan disampaikan di mimbar tetapi dalam tindakan nyata sebagai wujud Islam benar-benar menjadi rahmat bagi semesta alam.[26]

c. Nilai Persaudaraan dan HAM dalam Islam[27]

Ketika kita melangkah untuk memahami Islam dalam perspektif hak asasi manusia, kita selalu akan dihadapkan pada pertanyaan akademis, apakah Islam memang memberikan pengajaran di bidang ini? Secara umum kita tentu dapat menjawab, bahwa Islam pada dasarnya adalah ajaran yang komprehensif karena Al-Qur'an yang merupakan himpunan wahyu Ilahi yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw adalah kitab yang berfungsi "memberikan petunjuk, penjelasan atas petunjuk itu dan pembeda" antara kebenaran dengan kesalahan. Ajaran-ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw mencakupi keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun untuk bidang-bidang tertentu, la hanya memberikan rumusan-rumusan umum yang senantiasa dapat difikirkan, direnungkan dan diformulasikan untuk menghadapi tantangan perubahan zaman.

Selain itu, corak rasionalitas dari ajaran Islam yang senantiasa mendorong umatnya untuk berfikir kreatif dengan berlandaskan kepada dua sumber ajaran Islam Al-Qur'an dan al-Hadits akan senantiasa mendorong umatnya untuk menemukan gagasan baru dan konsepsi baru untuk menjawab tantangan zaman. Al-Qur'an sendiri mengatakan "barangsiapa berusaha dengan sungguh-sungguh di jalan Kami, maka Kami akan menunjukinya jalan-jalan Kami".

---

26. Materi ini pernah disampaikan pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tk. Kenegaraan di Jakarta Tahun 2010.

27. Materi Ceramah Maulid Nabi Muhammad Tingkat Kenegaraan oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dengan tema "Nilai Persaudaraan dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Ajaran Islam."

Persoalan hak asasi manusia berkaitan erat dengan konsepsi filosofis suatu aliran pemikiran tentang manusia. Perbedaan pandangan metafisik terhadap manusia inilah yang melahirkan perbedaan konsepsi tentang kehidupan pribadi dan sosial. manusia. Meskipun perdebatan metafisik ini telah dimulai sejak ribuan tahun yang lalu, namun masalah itu belum sepenuhnya dapat terjawab dengan memuaskan. Manusia tetap saja merupakan misteri terbesar di antara semua eksistensi. Hingga sekarang, ironisnya, manusia sebenarnya belum mempunyai pemahaman yang utuh dan komprehensif tentang dirinya sendiri. Ajaran Islam juga memberikan dasar-dasar pemahaman tentangmanusia, yang sampai sekarang menjadi sumber yang tidak pernah kering dalam membahas manusia baik dari sudut pandangan filsafat ataupun ilmu-pengetahuan.

Hal-hal pokok yang ditegaskan oleh Al-Qur'an ialah bahwasanya Allah adalah Tuhan Yang Esa dan manusia pada dasarnya adalah "umat yang satu" (*ummatan wahidah*). Allah bukan saja pencipta, pemelihara dan tempat bergantung segala sesuatu tetapi juga tempat kembalinya segala yang ada. Manusia bukanlah makhluk independen, dalam arti bebas menentukan segala-galanya, karena, secara fisik manusia adalah bagian dari alam semesta dan karena itu tunduk kepada sunnatullah (*the laws of nature*) yang di lihat dari sudut ilmu kalam adalah ketentuan-ketentuan universal yang mengatur jagad raga dengan penuh kepastian. Dunia adalah fana, bukan sesuatu yang kekal untuk selamanya. Hidup manusia akan berakhir dan setiap diri akan mempertanggungjawabkan segala amalnya di hadapan Tuhan Yang Maha Adil.

Manusia dengan sengaja diciptakan Allah untuk menjadi khalifahnya di muka bumi dalam rangka untuk mengabdikan diri kepadaNya. Manusia diberikan kemampuan berfikir secara kategoris dan kemampuan membuat simbol-simbol untuk mengabstraksikan dunia nyata, sebagaimana dilambangkan dalam kisah penciptaan Nabi Adam yang "sanggup memberi

nama kepada benda-benda". Kemampuan seperti itu tidak ada pada makhluk yang lain, termasuk para malaikat. Dengan kemampuan berfikir secara abstrak, konsepsional dan kategoris itulah Al-Qur'an mengatakan bahwa manusia itu adalah sesempurna-sempurna penciptaan". Bahkan dalam hadits Qudsi dikatakan bahwa Allah swt tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada akal-fikiran yang diberikannya kepada manusia. Namun dibalik itu, jika manusia tidak sungguh-sungguh memahami eksistensi dirinya, bukan mustahil suatu ketika mereka akan jatuh ke dalam posisi "yang lebih rendah dari segala yang rendah". Al-Qur'an telah mengisahkan kehancuran bangsa-bangsa sepanjang sejarah umat manusia, karena mereka berlaku "zalim, melampaui batas dan tidak mau kembali ke jalan yang benar". Pengajaran seperti ini sangat penting untuk menjadi bahan renungan bagi manusia modern sekarang, yang memang cenderung sewenang-wenang, melakukan pengrusakan yang menimbulkan malapetaka bagi umat manusia, bumi serta alam semesta tempat kita menjalani kehidupan.

Ajaran Islam pada prinsipnya menegaskan bahwa manusia haruslah menundukkan diri kepada Tuhan dan memandang manusia dalam perspektif persamaan derajat. Ketaatan manusia yang tutus dan tanpa batas kepada Tuhan, bermakna ketaatan manusia kepada kesadaran hati nuraninya sendiri. Hati nurani, sebagaimana dikatakan Ali bin Abi Thalib, adalah sesuatu yang tidak dapat berbuat dusta. Landasan manusia dalam berhubungan dengan manusia lain, menurut Islam, harus dibangun di atas perspektif keadilan. Prinsip ini mendapatkan nuansa demikian kuatnya di dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Kita dapat memetik ayat Al-Qur'an yang menekankan tema tentang keadilan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu orang-orang yang

benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri, ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih mengetahui kemaslahatannya. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu dan berpaling dari kebenaran. Dan jika kalian memutar-balikkan kata-kata atau enggan memberikan kesaksian yang benar, maka Allah Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan. (Q.S. an-Nisâ :135).

Para ahli hukum Islam sepakat untuk menyatakan bahwa keadilan adalah jiwa atau prinsip dasar dari syari'ah Islam. Tidak akan ada norma hukum yang akan ditaati oleh manusia jika kaidah hukum itu jauh dari nilai dasar keadilan. Keadilan pulalah yang secara normatif dan imperatif harus dijadikan sebagai landasan dalam kita berbuat dan bersikap terhadap sesama manusia. Suatu ketika seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad saw tentang apakah yang dimaksud dengan adil. Rasulullah saw menjawab, adil itu ialah memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya, dan mencabut dari seseorang apa yang bukan menjadi haknya. Sikap keadilan adalah dasar untuk membangun hubungan yang harmonis dan dinamis antar sesama manusia. Keadilan harus dimulai dalam kerangka berpikir kita, baik menilai diri sendiri maupun menilai orang lain. Rasa benci atau tidak suka kepada seseorang, sebagaimana dikatakan Al-Qur'an, tidak boleh menyebabkan seseorang berlaku tidak adil terhadapnya.

Dalam kesempatan ini, kami ingin menukilkan teks Pidato Nabi Muhammad saw di hadapan kaum Muslimin yang sedang wukuf di Padang Arafah; pada 9, 10 dan 11 Zulhijjah 13 Hijrah yang bertepatan dengan 9, 10 dan 11 Maret 632 Masehi, yang dikenal dalam sejarah Islam sebagai Khutbah Hajjatul Wada'. Dalam pidato yang sangat bersejarah dan diucapkan hanya beberapa bulan sebelum Rasulullah saw wafat itu, beliau antara lain berkata: "Hai sekalian manusia, dengarkanlah kata-kataku ini, sebab tiadalah aku mengetahui apakah aku masih mempunyai kesempatan berjumpa dengan kalian di tempat ini

pada kesempatan yang lain di tahun-tahun mendatang. Tahukah kalian, bulan apakah sekarang ini? Inilah bulan yang disucikan. Dan tahukah kalian tempat apakah tempat ini? Inilah tempat yang disucikan. Maka dengan itu, aku permaklumkan kepada kalian semua bahwa darah kalian dan harta-benda milik kalian adalah suci sampai dengan kalian menjumpai Tuhan di hari akhirat nanti. Hendaklah apa-apa yang kukatakan ini, disampaikan oleh mereka yang hadir kepada mereka yang tidak hadir. Suatu saat nanti kalian akan menjumpai Tuhan dan Dia akan meminta pertanggungjawaban kalian terhadap apa-apa yang telah kalian lakukan selama hidup kalian di dunia ini. Aku berpesan kepada kalian, barangsiapa yang diserahi amanat maka hendaklah dia menunaikan amanat itu kepada yang berhak menerimanya.

Aku permaklumkan pula kepada kalian bahwa semua bentuk riba [yakni salah satu bentuk eksploitasi manusia atas manusia] adalah terlarang dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Tetapi kalian tetap berhak untuk memperoleh kembali modal atau pinjaman yang telah kalian pinjamkan kepada seseorang. Janganlah kalian berbuat aniaya dan berlaku sewenang-wenang terhadap orang lain, dan jangan pula kalian dianiaya dan diperlakukan sewenang-wenang oleh orang lain. Sesungguhnya Allah telah menetapkan bahwa segala bentuk penindasan dan kekejaman adalah terlarang... Aku permaklumkan pula bahwa semua dendam dan tuntutan darah atas pembunuhan yang terjadi pada masa Jahiliyah semuanya tidak berlaku lagi. Dan tuntutan darah yang pertama aku hapuskan ialah darah Ibnu Rabi'a bin Harith bin Abdul Muttalib

Kemudian daripada itu, wahai manusia, sebagaimana kalian mempunyai hak atas isteri kalian, maka isteri kalianpun mempunyai hak yang sama atas diri kalian... Berlaku baiklah terhadap isteri kalian, karena kalian telah mengambil kehormatan mereka atas nama Tuhan dan kehormatan mereka dihalalkan kepadamu atas nama Tuhan pula. Perhatikanlan kata-kataku ini wahai manusia. Ada dua pusaka yang aku tinggalkan

kepada kalian [yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah] yang jika kalian berpegang teguh pada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Wahai manusia sekalian, aku nyatakan kepada kalian bahwa setiap Muslim adalah bersaudara. Seseorang tidak dibenarkan mengambil sesuatu dari saudaranya, terkecuali dia rela untuk memberikannya. Keesokan harinya tanggal 10 Zulhijjah 13 Hijrah (10 Maret 632 Masehi), Nabi Muhammad saw kembali menegaskan isi pidatonya sehari sebelumnya.

Akhirnya pada tanggal 11 Zulhijjah 13 Hjriah (11 Maret 632 Masehi), Nabi Muhammad saw menegaskan prinsip penting persamaan antara semua manusia. Berkatalah Rasulullah saw "Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan Yang Esa dan nenek moyang kalian adalah satu. Semua manusia adalah keturunan Nabi Adam Alaihissalam; dan Adam telah diciptakan Tuhan dari tanah. Karena itu [aku permaklumkan kepada kalian] tidak ada kelebihan dan keunggulan orang-orang Arab dengan orang-orang yang bukan Arab. Begitu pula tidak ada kelebihan apapun dari orang-orang kulit putih dengan kulit merah [berwarna], demikian pula sebaliknya. Semua manusia adalah sama. Yang membedakan mereka hanyalah derajat ketakwaanya kepada Allah.

Sesudah mengucapkan kata-kata itu Rasulullah saw mengangkat mukanya ke arah langit dan berseru: Ya Allah, sudahkah aku sampaikan semua risalah ini kepada manusia. Dan sudahkah aku menyampaikannya kepada mereka? Maka ribuan orang yang hadir itupun semuanya berteriak: Sudah ya Rasulullah. Sungguh Engkau telah menyampaikan semuanya kepada kami. Maka berkatalah Rasulullah saw: Ya Allah, aku bersyukur kepadaMu. Maka limpahkanlah segala karuniaMu pada semua ini. Para ahli sejarah Islam mencatat, beberapa saat setelah mengucapkan pidato terakhir di depan publik itu, datanglah malaikat Jibril menyampaikan firman Allah "Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku

cukupkan segala nikmatKu kepadamu, dan telah Aku ridhai Islam menjadi agama bagimu" (AI-Maidah ayat 3).

Setelah membaca ayat itu, segenap kaum Muslimin bersuka cita,.namun menangislah beberapa sahabat Nabi, antara lain Abu Bakar As-Shiddiq. Sahabat ini seolah menyadari dengan turunnya ayat itu, maka ini merupakan ayat terakhir dari wahyu yang dihimpun dalam kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan selama lebih dari 22 tahun. Ini menjadi tanda bahwa risalah kenabian Muhammad saw akan segera berakhir. Sejarahpun mencatat, hanya sekitar tiga bulan setelah diterimanya wahyu terakhir itu, maka Rasulullah saw wafat dan meninggalkan dunia yang ini untuk selama-lamanya. Khutbah Nabi Muhammad saw di Padang Arafah yang dikemukakan tadi, suatu pernyataan yang di dalamnya sarat dengan rumusan-rumusan yang di masa sekarang disebut dengan hak asasi manusia itu. Dengan wafatnya Rasulullah saw, tidak akan ada lagi nabi baru sesudah beliau, karna Al-Qur'an telah menegaskan bahwa Nabi Muhammad saw adalah "penutup dari segala nabi". Dengan demikian, nasib masa depan umat manusia dan khususnya kita kaum Muslimin, adalah tergantung pada kesungguhan perjuangan kita sendiri. "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum, sebelum kaum itu berjuang keras untuk mengubah nasibnya sendiri" (QS. Ar-Ra'd: 11). Kaum Muslimin tidak dalam posisi menunggu kedatangan seorang nabi, seorang penyelamat ataupun ratu adil untuk mengubah nasib mereka.

Selain dari konsep kemuliaan harkat dan martabat manusia yang selama ini telah dikenal luas oleh kaum Muslimin sebagaimana termaktub di dalam Al-Qur'an dan hadits, dalam kesempatan yang berbahagia ini, ingin pula kami singgung sedikit prinsip-prinsip hak asasi manusia yang termaktub di dalam Piagam Nabi (Kitab an-Nabi] yang oleh beberapa ahli hukum tata Negara dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia yakni dokumen historis tentang aturan-aturan dasar

penyelenggaraan Madinah sebagai sebuah komunitas di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad saw. Ketika hijrah ke Yatsrib yang kemudian berubah menjadi Madinah, penduduk kota itu tidaklah homogen. Paling tidak terdapat kelompok kaum Muslimin yang terdiri dari dua bagian, yakni Muhajirin dan Anshan, kelompok keagamaan Yahudi dan kelompok masyarakat Arab penganut Paganisme. Setibanya di Yatsrib, Nabi segera mengadakan pakta kesepakatan bersama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang heterogen itu untuk menyatukan mereka ke dalam satu komunitas baru, yang dinamakan dengan Madinah. Sekarang, setelah beberapa sarjana melakukan studi yang mendalam terhadap teks piagam ini, mereka dengan mudah mensistematikkan piagam ini menjadi 10 Bab dan 47 pasal, yang di dalamnya memuat rumusan-rumusan penting tentang hak asasi manusia.

Penegasan terpenting yang termaktub dalam Piagam Madinah yaitu pengakuan terhadap pluralisme masyarakat, yang dalam hak-hak dan kewajiban adalah sama tanpa membedakan asal-usul dan agama. Tiap-tiap kelompok masyarakat memiliki semacam otonomi ke dalam, tetapi tidak mempunyai kewenangan melakukan hubungan ke luar yang harus dilakukan atas nama Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah saw sebagai suatu kesatuan komunitas. Nabi Muhammad saw diangkat menjadi pemimpin komunitas ini, tetapi beliau tidaklah menjadi seorang autokrat karena hukum Tuhan berada di atas segala-galanya dan setiap pengambilan keputusan dilakukan dengan prinsip musyawarah. Karena masyarakatnya majemuk, maka dalam komunitas Madinah diberlakukan berbagai subsistem hukum. Dalam arti kaum Muslimin tunduk kepada hukum Islam, sementara kaum Yahudi tunduk kepada hukum Taurat dan kaum penganut Paganisme tunduk kepada hukum Adat mereka.

Kebebasan menjalankan ibadah keagamaan dengan sendirinya dijamin di dalam teks Piagam Madinah. Hal ini disebabkan karena pada prinsipnya Islam menegaskan bahwa

keyakinan keagamaan tidak dapat dipaksakan terhadap seseorang, meskipun dakwah wajib dijalankan. Hak milik, hak kebebasan pribadi, hak untuk mendapatkan jaminan keselamatan pribadi dan kelompok semuanya dijamin dalam Piagam, demikian pula hak untuk ikut serta dalam pembelaan komunitas jika diserang oleh kelompok di luarnya. Dengan demikian, partisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan ekonomi, sosial dan politik terbuka bagi semua orang.

Dengan menyimak pidato Nabi Muhammad saw pada saat Hajjatul Wada' dan isi Piagam Madinah, dengan mudah kita dapat menarik kesimpulan bahwa prinsip-prinsip yang sekarang disebut sebagai hak asasi manusia, sebenarnya telah dikemukakan dalam khazanah ajaran Islam. Bukanlah suatu sikap "apologetik" sebagaimana sering dituduhkan oleh kaum Orientatis jika kita mengatakan bahwa dokumen historis yang ditinggalkan Nabi Muhammad saw, jauh mendahului dokumen serupa yang dikenal dalam sejarah modern dan abad pertengahan bumi belahan barat, seperti tertuang dalam Magna Charta di Inggris (Tahun 1215 Masehi), Konstitusi Amerika Serikat dan Pernyataan Tentang Hak-Hak Manusia di Perancis, hingga munculnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (1948) dan berbagai kovenan hak-hak sipil, sosial dan politik yang menyertainya, serta berbagai dokumen dan konvensi internasional yang muncul di masa kemudian.

Meskipun dokumen-dokumen yang diwariskan oleh Islam tetap ada dan terpelihara hingga sekarang dan dibaca oleh jutaan kaum Muslimin di seluruh dunia, namun masih saja terdapat anggapan bahwa persoalan hak asasi manusia, dianggap seolah-olah sesuatu yang asing dari khazanah peradaban kaum Muslimin. Anggapan seperti ini patut kita sesali, mengingat rujukan akademis dan intelektual di banyak masyarakat Timur hingga sekarang tetap mengacu ke dunia Barat. Sehingga tidak mengherankan jika timbul kritik terhadap kaum intelektual di Asia dan Afrika, dimana mereka dituduh sebagai "orang Barat di negeri Timur".

Namun perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Islam sekarang ini telah memberikan harapan baru untuk menilai warisan tradisi sejarah peradaban umat manusia secara jujur dan berimbang. Penilaian seperti itu tentu bukan dimaksudkan sekedar memenuhi dahaga intelektual kaum cendikiawan, karena langkah selanjutnya adalah bagaimana menyerap dan mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam itu ke dalam kehidupan umat manusia dalam menghadapi tantangan zaman.

Sebagai bangsa kita patut bersyukur bahwa nilai-nilai Islam yang diwariskan Nabi Muhammad saw itu telah, sedang dan akan terus mempengaruhi kehidupan bangsa kita. Tak seorangpun yang akan menyangkal fakta sejarah, bahwa semangat Islam telah mendorong suku bangsa di kepulauan Nusantara untuk bersatu. Peradaban Islam di kawasan ini dengan sengaja memilih bahasa Melayu sebagai bahasa intelektual keagamaan dan sekaligus sebagai bahasa penghubung antar suku, yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia. Semangat Islam yang menghormati harkat dan martabat manusia dan keyakinan bahwa membebaskan diri dari segala bentuk penindasan adalah salah satu perjuangan yang diajarkan agama, telah mendorong semangat bangsa kita untuk merdeka. Tidak ada ideologi apapun juga yang dapat berkembang di tanah air kita ini tanpa mencari persentuhannya dengan Islam, baik itu Nasionalisme ataupun Sosialisme. Termasuk pula kaum Komunis yang diawal abad ke dua puluh yang lalu, telah menggunakan idiom-idiom Islam untuk memperkenalkan gagasan-gagasan mereka ke tengah-tengah masyarakat. Tentu saja ajaran Islam yang sejati akan menentang doktrin Komunisme itu.

Penghormatan Islam yang demikian teguh kepada harkat dan martabat manusia, tercermin dengan sungguh-sungguh kedalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adalah Haji Agus Salim, yang dapat kita anggap sebagai Bapak Cendikiawan Muslim di tanah air, yang memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam merumuskan kalimat-kalimat dalam

pembukaan undang-undang dasar itu. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu telah memuat seluruh elemen-elemen dasar hak asasi manusia di bidang sosial, politik dan ekonomi, bahkan menegaskan hak kolektif sebuah bangsa untuk merdeka dan bebas dari segala bentuk penjajahan dan penindasan.

Namun di Era Reformasi sekarang ini, perubahan yang radikal telah terjadi. Kini kita telah mempunyai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Hak Asasi Manusia, demikian pula undang-undangnya, serta kita telah pula mengesahkan Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang sedemikian jauh mengadopsi gagasan-gagasan yang dikemukakan dalam hukum Islam serta berbagai statuta dan konvensi internasional yang memuat delik "kejahatan kemanusiaan" (*crime against humanity*). Bahkan lebih jauh lagi, dua kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, telah pula melengkapi kekurangan pasal-pasal tentang hak asasi manusia yang ada dalam teks asli undang-undang dasar itu. Kita juga telah membentuk berbagai institusi resmi pemerintah maupun institusi independen dalam upaya untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Kita juga terus-menerus melatih aparatur pemerintah, khususnya aparatur penegak hukum agar mereka benar-benar menerapkan nilai-nilai dan ketentuan-ketentuan hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya. Kitapun berusaha pula untuk memasukkan kurikulum pendidikan hak asasi manusia sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Kita ingin menunjukkan kepada masyarakat internasional, bahwa sebagai bangsa yang pernah dijajah dan ditindas selama lebih dari tiga abad lamanya, kita mempunyai komitmen yang teguh untuk menghormati hak asasi manusia. Setidaknya pada tingkat normatif, komitmen itu telah kita tunjukkan. Namun kita harus pula menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penerapannya, yang tentunya tidak dapat dibangun dalam masa yang singkat. Kesadaran akan hak asasi manusia masih memerlukan sosialisasi yang lugas di masyarakat, terlebih

terhadap aparatur penyelenggara Negara dan seluruh jajaran penegak hukum dan birokrasi pemerintahan. Tidak ada pilihan lain menghadapi semua ini, kecuali kesabaran, tekad yang kuat dan kerja keras yang tak mengenal lelah dari seluruh warga bangsa. Nabi Muhammad saw telah mencontohkan kepada kita, bahwa perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan memang memerlukan waktu dan kesabaran. Karma itu setiap penilaian terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di suatu negara, hendaknya dilakukan secara jujur dan proporsional serta dilandasi oleh iktikad baik, dengan kesadaran bahwa masalah ini adalah perjuangan kemanusiaan yang sangat panjang.

Tetapi, adalah tidak jujur dan tidak adil jika menjadikan isu hak asasi sebagai alat untuk melakukan penekanan politik terhadap negara-negara berkembang dan negara baru khususnya di Asia dan Afrika, untuk kepentingan diri sendiri, apalagi dilakukan dengan standar ganda. Lebih buruk lagi jika isu hak asasi manusia dijadikan sebagai "offensif propaganda" untuk menyerang dan memojokkan suatu bangsa, sambil menyembunyikan dan menutupi kesalahan yang mereka lakukan agar tidak diserang terlebih dahulu.

Kebanyakan kaum Muslimin kini merasakan akibat penerapan standar ganda di bidang hak asasi manusia, sejak terjadinya peristiwa yang disebut sebagai serangan kaum teroris terhadap Gedung *World Trade Center* di New York pada tanggal 11 September 2001. Kita dapat memahami penegasan berbagai pihak bahwa perang melawan terorisme bukanlah ditujukan kepada kaum Muslimin, karena terorisme dapat dilakukan oleh pemeluk agama apa saja di muka bumi ini. Namun ekses negatif perang terhadap terorisme yang dicanangkan Amerika Serikat itu kini lebih banyak dirasakan oleh kaum Muslimin dibandingkan dengan pemeluk agama lain. Akibatnya, tidak jarang hak asasi manusia mereka diabaikan, bahkan dilanggar secara sewenang-wenang. Berbagai bentuk sikap prejudis, rasialis, xenophobia

dan Islamophobia kini seakan muncul lagi dalam percaturan politik antarabangsa. Fenomena ini sangat ironis terjadi di tengah abad yang justru di awal kelahirannya memberikan banyak harapan terhadap penghormatan dan penegakan hak asasi manusia. Dominasi pemberitaan media massa seringkali pula dimanfaatkan untuk membangun persepsi buruk terhadap umat Islam yang tidak berdaya melakukan bantahan dan klarifikasi atas berita-berita seperti itu.

Bagi kita Muslimin Indonesia, adalah tugas dan kewajiban kita untuk menunjukkan kepada dunia, bahwa Islam adalah agama cinta damai dan agama yang menghormati hak asasi manusia, betapapun kini kita menghadapi kenyataan-kenyataan pahit yang menyesakkan dada. Kita berkewajiban untuk merealisasikan apa yang ditegaskan oleh Al-Quran bahwa "Kalian adalah sebaik-baik umat (*khaira ummah*) yang Kami tonjolkan kepada semua umat manusia, karena kalian selalu mengajak manusia ke arah kebajikan dan mencegah kemungkaran dan kalian beriman kepada Allah". Perjuangan ke arah itu memang tidak mudah, panjang dan berliku-liku. Namun kaum Muslimin tetap tidak boleh berputus asa menghadapi segala kenyataan. Di tengah kita memperingati Maulid Nabi, masih ada secercah harapan untuk membangun hari depan yang lebih baik.

Sebagai penutup, mari kita renungkan firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 17 dan 18,

فَبَشِّرْ عِبَادِ. الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّه وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الأَلْبَابِ

"Maka sampaikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaKu, yaitu mereka yang mau mendengarkan pendapat dan mengikuti mana jalan yang terbaik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk Tuhan dan merekalah orang-orang yang mempunyai akal fikiran". (QS. Az-Zumar: 17-18)

C. Indonesia dan Model Moderasi Islam

Keragaman bahasa, budaya, dan agama yang menjadi identitas bangsa Indonesia, memiliki nilai strategis dalam kancah internasional. Sebagai bangsa yang multikultur dan multietnis, ini adalah sebuah pertaruhan. Jika keragaman tersebut menjadi aspek penguat relasi sosial antar elemen bangsa, maka dunia akan melihat Indonesia sebagai rujukan utama sebagai *ideal type* (contoh ideal) dalam pengelolaan keragaman.

Sebaliknya, jika Indonesia tidak berhasil menjaga keragaman dimaksud, maka dunia akan terkena dampaknya. Hal ini dilandasi oleh dua kondisi. *Pertama,* secara geografis, Indonesia memiliki posisi yang strategis sebagai jantung dunia dan berada di garis khatulistiwa. Hutan Indonesia sangat dibutuhkan dunia sebagai penyuplai kelestarian alam terbesar. Ketika hutan Indonesia hancur, maka dunia akan merasakan dampaknya.

Kedua, secara sosiologis dan politis, Indonesia adalah negara dengan pemeluk Islam terbesar. Indonesia akan selalu dilirik dunia dalam melihat kehidupan umat Islamnya. Maka, jika Indonesia tidak berhasil mengelola kehidupan agama sebagai pilar kerukunan, akan berdampak pada percaturan Islam di dunia Internasional. Stabilitas dunia Islam akan terdampak jika bangsa Indonesia gagal mengelola keragaman di sekitarnya.

Masalah agama adalah salah satu faktor yang sangat sensitif di setiap negara, termasuk pula di Indonesia. Bahwa solidaritas atas nama agama terkadang melampaui ikatan-ikatan primordial lainnya, seperti ikatan kesukuan dan ikatan kekerabatan. Maka, bagi Indonesia dengan tingkat keragaman yang sangat luas, penataan hubungan antar dan intra umat beragama dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia mendapatkan perhatian khusus.

Menurut Nasaruddin Umar, Guru Besar tafsir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, penataan kehidupan umat beragama tidak mesti negara --dalam hal ini pemerintah-- melakukan intervensi

terhadap urusan-urusan *adhoc* setiap agama, atau menetapkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan agama. Akan tetapi yang diperlukan adalah negara dan pemerintah menjadi pengayom terhadap setiap agama dan para pemeluk agama tersebut. Jarak ideal antara negara perlu dipelihara dan dipertahankan. Hubungan antara keduanya sebaiknya bersifat administratif, bukannya negara menampilkan diri sebagai pengawas atau pengatur. Karena jika demikian adanya maka yang terjadi sesungguhnya adalah pengebirian terhadap agama, karena ajaran agama itu ada yang bersifat mutlak.

Di samping upaya tersebut, lanjutnya, secara horizontal juga dibutuhkan adanya kesungguhan untuk menciptakan adanya saling pengertian antara umat beragama. Salah satu upaya ke arah sana ialah, bagaimana umat beragama membaca ulang kitab suci tidak dengan menekankan *collective memory* yang sarat dengan prinsip negasi (*princeple of negation*), yang selalu menekankan perbedaan. Umat beragama dalam masyarakat pluralistik sudah waktunya membaca kitab suci dengan menekankan titik temu (*principle of identity*). Dengan begini, agama akan tampil sebagai sarana perekat (*melting pot*) integrasi bangsa, bukannya sebagai faktor desintegrasi nasional.

Gagasan ini tidak berarti mengupayakan penyatuan agama. Bagaimanapun juga agama-agama tidak akan pernah mungkin disatukan. Titik berat perjuangan kita dalam hubungannya dengan agama, bukanlah bagaimana mewujudkan persatuan antara umat beragama, tetapi bagaimana belajar berbeda dan menerima perbedaan itu sebagai sesuatu yang positif dan mempunyai hikmah yang penting. Gagasan ini juga tidak bermaksud mengecilkan peran-peran publik agama menjadi peran peran privat, atau lebih jauh lagi, tidak bermaksud mengakui pendapat Diderot yang mengatakan bahwa agama dengan segala lembaga dan pranatanya adalah sumber segala kebobrokan masyarakat, dengan ciri utama tidak

adanya samasekali toleransi. Akibatnya, toleransi dikembangkan lebih merupakan suatu cara (prosedur) agar manusia dapat menyingkir dari agama, atau agama menyingkir dari manusia.[28]

Saat ini, posisi Indonesia sangat strategis. Hal ini misalnya bisa kita lihat dari peran Indonesia dalam menengahi berbagai konflik di beberapa negara. Sejak dahulu Indonesia telah mengirim beberapa kontingen Garuda untuk menjadi penjaga perdamaian, seperti di Bosnia, Sudan, dan Libanon. Banyaknya harapan dunia akan peran serta Indonesia dalam menengahi berbagai konflik, tak lain disebabkan keberhasilan Indonesia dalam mengelola keberagaman, baik dari aspek budaya, bahasa, dan bahkan agama. Indonesia dipandang berhasil membangun moderasi Islam.

Moderasi Islam adalah jalan tengah di tengah keberagaman beragama. Wajah moderasi Islam nampak dalam hubungan harmoni antara Islam dan kearifan lokal (*local value*). *Local value* (kearifan lokal) sebagai warisan budaya Nusantara, mampu disandingkan secara sejajar sehingga antara spirit Islam dan kearifan budaya berjalan seiring, tidak saling menegasikan. Di sinilah wajah Islam Indonesia dipandang sangat tepat diterapkan dalam konteks heterogenitas budaya di kawasan ASEAN.

Moderasi Islam juga berperan besar dalam mendialogkan Islam dan modernitas. Terhadap modernitas, Islam tidak dalam posisi menolak atau menerima secara menyeluruh, melainkan tetap mengedepankan sikap kritis sehingga modernitas tumbuh menjadi nilai positif ketimbang negatif. Di saat negara-negara muslim begitu kaku dan konservatif terhadap perubahan dan produk-produk modernitas, Indonesia justru menjadikannya media dakwah dengan memasukan spirit Islam di dalamnya.[29]

---

28. Nasaruddin Umar, "Membina Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia: Perspektif Islam," Jurnal Bimas Islam Vol. 5 No. 1 2012

29. Jaja Zarkasyi, "Masa Depan Moderasi Islam di Kawasan ASEAN," bimasislam.kemenag.go.id

Kini, di saat dunia terus berada dalam bayang-bayang benturan sosial, seperti yang terjadi di Afghanistan, Irak, Suriah, hingga Irlandia, Indonesia tampil dengan kebersamaan dalam keragaman. Sungguh sangat indah menyaksikan berbagai agama, budaya, dan suku hidup berdampingan, saling menghormati. Masing-masing daerah tidak lagi mengusung aura kedaerahan atau kesukuan, melainkan hidup rukun di bawah payung Pancasila dalam bingkai NKRI.

KH. Hasyim Muzadi memiliki pandangan tersendiri tentang moderasi muslim Indonesia. Menurutnya, umat Islam Indonesia patut bangga karena memiliki cara berfikir keagamaan yang mengikuti ahlussunah yang diaplikasikan dalam kehidupan keindonesiaan yang menggabungkan antara ibadah, fikih, dan tasawuf secara bersamaan. Bangsa ini memiliki karakter keberagamaan yang taat, tanpa menghapus nilai kebangsaan. Umat Islam mampu hidup berdampingan dengan berbagai kelompok umat dan budaya lain, tanpa menanggalkan identitas keislamannya sesuai dengan ketentuan wahyu.

Umat Islam Indonesia memiliki seting pemikiran paradigma berfikir yang menempatkan nilai agama dan negara hidup berdampingan, tidak saling menegasikan, serta tidak merusak kemajemukan. Bangsa Indonesia tidak tertarik untuk mendirikan negara sekuler, begitu pula dengan negara agama. Sekulerisme telah gagal membangun bangsa-bangsa di dunia, sebagaimana Negara agama juga tidak mampu membangun dalam kemajemukan. Tetapi Indonesia yang sangat majemuk dengan beragama budaya dan agama mampu hidup damai dan berdampingan. Ini adalah sebuah prestasi bahwa bangsa Indonesia berhasil membangun negara di atas prinsip agama dan budaya bangsa, tidak menegasikan satu atas yang lainnya. KH. Hasyim menggarisbawahi bahwa kondisi ini terbentuk bukan tanpa usaha. Para pendahulu telah membangun fondasi yang kokoh tentang keberagaman dan kebangsaan sebagai tonggak moderasi Islam, kita tinggal merumuskan saja dalam moderasi Islam.

Moderasi pemikiran yang dibangun para ulama dapat dimengerti oleh berbagai aliran, baik yang ekstrem maupun liberal. Moderasi pemikiran Islam menemukan tempatnya di Indonesia. Bahkan sekte-sekte sangat menghargai moderasi kita, sekalipun belum tentu mengikuti. Di dunia Islam pun garis moderasi ini bisa mengatasi modernisasi dan globalisasi. Ketika arus globalisasi dan informasi deras memasuki kehidupan masyarakat, moderasi Islam mampu menyikapinya dengan baik.

Di sinilah, agama harus dilepaskan dari politik kekuasaan, dan dijadikan alat justifikasi. Agama perlu dikembalikan kepada eksistensinya sebagai sumber moralitas luhur yang selalu membimbing umatnya dan umat manusia secara keseluruhan dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Melalui pendekatan moral, langit harapan akan tampak lebih cerah. Kekerasan tidak dihadapkan dengan kekerasan yang lain. Justru, masing-masing pihak diharapkan akan kembali kepada eksistensinya sebagai manusia yang mengemban moralitas luhur dalam bentuk pembumian kedamaian, keadilan, kesetaraan dan sejenisnya, serta pengendalian diri dan seumpama.[30]

Terlepas dari semua itu, bangsa Indonesia tetap harus berhati-hati, karena potensi konflik akan terus bermunculan. Dengan arus informasi yang semakin deras dengan beragam informasi, tentunya ini harus kita waspadai. Namun di sisi lain, arus informasi juga bisa menjadi kekuatan yang akan menjadi unsur penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan umat beragama. Di sinilah peran komunikasi publik menjadi sangat vital dalam mewujudkan keharmonisan dimaksud.

C. NKRI Sebagai Semangat Kekhalifahan

Diskursus mengenai hubungan antara negara dan Islam senantiasa menarik untuk didiskusikan, bukan hanya di masa awal pendirian bangsa ini saja namun juga pada masa terakhir ini. Perbincangan mengenai diskursus ini di masa awal pendirian

30. Abdul A'la, *Ibid*, h. 21

bangsa merupakan bagian dari ikhtiar yang dilakukan oleh para pendiri bangsa dalam menggali nilai-nilai yang telah menancap kuat di tengah masyarakat untuk kemudian dirumuskan sebagai sebuah ideologi yang menjadi landasan berbangsa dan bernegara.

Perbincangan yang terjadi di era awal pendirian republik ini telah sampai pada kesimpulan untuk mufakat bahwa bentuk negara ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa. Permufakatan tersebut merupakan hasil ijtihad yang dilakukan oleh para pendiri bangsa, termasuk para pimpinan umat Islam, sehingga mengikat bagi seluruh elemen bangsa, termasuk umat Islam. Sebab sesuai dengan sabda nabi SAW: *al-muslimuna 'ala syurutihim*, umat Islam terikat oleh kesepakatan yang mereka buat.

Belakangan ini, banyak kalangan membincangkan kembali relevansi Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa. Kekhawatiran bahwa Pancasila mulai tidak laku lagi atau akan digantikan dengan ideologi lain, juga tak luput dari perbincangan di kalangan tertentu. Seiring dengan itu, perbincangan mengenai diskursus hubungan Islam dan Pancasila dimunculkan kembali. Hasil kesepakatan untuk menerima Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa yang merupakan hasil ijtihad para pendiri republik ini juga kembali dipertanyakan. Apakah kesepakatan yang mereka lakukan juga mengikat bagi umat Islam yang hidup di masa berikutnya. Bagaimana jika ada pandangan umat Islam saat ini yang berbeda dengan pandangan para pemimpin Islam yang menjadi bagian dari pendiri republik ini.

Apabila ditelaah secara mendalam dan objektif dari sejarah perumusan Pancasila, maka akan ditemukan fakta sejarah bahwa Pancasila merupakan kesepakatan dari sebuah kompromi yang dilakukan oleh para pendiri bangsa ini. Kesepakatan dan kompromi tersebut terutama terkait dengan perubahan sila pertama yang awalnya berbunyi: "*Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*" menjadi

"Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal tersebut menunjukkan kesediaan dari kalangan Islam untuk berkorban demi kepentingan kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara.

Dalam memaknai Pancasila setiap umat Islam di Indonesia harus memahami bahwa Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Namun demikian karena sila-sila dalam Pancasila kesemuanya memuat nilai-nilai universal yang sesuai dan identik dengan ajaran Islam, maka umat Islam bisa menerimanya sebagai dasar, falsafah dan ideologi negara, dengan alasan bahwa ajaran Islam dapat menerima nilai-nilai universal sepanjang nilai-nilai tersebut sesuai dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Penerimaan umat Islam terhadap Pancasila ini bersifat final karena telah dikukuhkan oleh ormas Islam, seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dsb. Majelis Ulama Indonesia juga secara tegas telah menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara merupakan kesepakatan bangsa Indonesia, termasuk umat Islam Indonesia.

Penerimaan umat Islam terhadap Pancasila ini tidaklah mengurangi sedikitpun akidahnya. Karena Pancasila sebagai ideologi terbuka, memungkinkan bagi umat Islam memaknainya sesuai dengan ajaran agama Islam. Misalnya sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai dasar Negara Republik Indonesia yang menurut pasal 29 ayat 1 Undang Undang Dasar (UUD) 1945 menjiwai sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. Istilah "Ketuhanan Yang Maha Esa" dapat difahami sebagai terjemahan dari *"Allahu al-Wahidu al-Ahad"*.

Oleh karena sila pertama ini menjiwai sila-sila yang lain dalam Pancasila, dan sila pertama ini menegaskan religiusitas

(agama) sebagai unsur asasi dalam berbangsa dan bernegara, maka agama harus dijadikan sumber hukum, sumber inspirasi, landasan berfikir, dan kaedah penuntun dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tidak terjadi benturan antara kerangka berfikir keagamaan dan kerangka berfikir kebangsaan. Setiap muslim dapat menjadi nasionalis sejati tanpa harus menanggalkan keislamannya, dan sebaliknya dapat menjadi seorang muslim yang taat tanpa menanggalkan identitas kebangsaannya.

Dengan pokok pikiran seperti itu sejatinya *positioning* Pancasila bagi umat Islam sudahlah final atau selesai. Hubungan antara Islam dan Pancasila juga dianggap selesai. Hal ini terbukti diakomodirnya undang-undang yang bernuansa keagamaan, misalnya UU Haji, UU Zakat, UU Perkawinan, dan sebagainya. Terlebih setelah era Reformasi di mana tafsir tunggal terhadap Pancasila tidak diberlakukan lagi dan kelompok masyarakat diberikan keleluasaan mencantumkan asas organisasinya sesuai dengan ideologinya, maka tidak ada alasan lagi untuk menolak Pancasila.

Namun memang harus diakui bahwa pasca era reformasi yang membawa kebebasan yang berlebihan membawa dampak adanya kelompok yang ingin merubah Pancasila, baik yang berasal dari kelompok sekularisme radikal ataupun radikalisme agama. Kelompok sekularisme radikal menginginkan perubahan tafsir terhadap Pancasila. Kelompok sekuler ini menginginkan Pancasila sebagai dasar negara harus dibebaskan dari pengaruh agama, karenanya mereka gigih menolak adanya penyerapan nilai ajaran agama, khususnya Islam, ke dalam sistem hukum nasional, karena dianggap tidak sesuai dengan Pancasila.

Pancasila memang bukan agama, karena ia merupakan kumpulan nilai dan visi. Tepatnya, lima nilai dan visi yang hendak diraih dan diwujudkan oleh bangsa Indonesia ketika berikhtiar mendirikan sebuah negara. Meski demikian, bukan berarti Pancasila itu anti agama, atau agama harus disingkirkan dari

Pancasila. Karena keberadaan agama itu diakui dan dilindungi serta dijamin eksistensinya oleh Pancasila. Dengan nilai dan visi ketuhanannya, sebagaimana sila pertama Pancasila, justru arah negara Indonesia bukanlah negara sekular, juga bukan negara Sosialis-Komunis maupun Kapitalis-Liberal. Tetapi sebuah negara yang dibangun berdasarkan nilai dan visi Ketuhanan yang Maha Esa.

Sedangkan kelompok radikalisme agama menginginkan merubah dasar negara ini menjadi negara agama. Tuntutan kelompok radikalis agama ini telah menafikan kesepakatan yang dilakukan oleh para pendiri republik ini. Sebagaimana ajaran Islam, kesepakatan yang telah dilakukan oleh para pendiri republik tersebut juga mengikat kepada umat Islam yang datang setelahnya. Hal ini juga diperkuat oleh berbagai keputusan Ormas Islam. Bahkan MUI menyatakan bahwa kelompok yang melanggar kesepakatan tersebut dikategorikan sebagai separatis atau *bughat* yang wajib diperangi oleh negara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara merupakan hasil ijtihad para ulama dan pemimpin Islam yang merupakan bagian dari pendiri negara ini, karena itu umat Islam yang lahir setelah itu harus menghormati dan menjaga kesepakatan dan hasil ijtihad tersebut. Negara ini sangat menjunjung tinggi ajaran agama dan memberikan ruang yang sangat lebar kepada umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya. Dalam terminologi Ibnu Khaldun, semangat khilafah sebagaimana dicontohkan oleh *al-khulafa ar-rasyidun* dapat diperjuangkan untuk diejawantahkan di negara ini, dengan tetap dalam bingkai NKRI dan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara.

Dengan begitu, perjuangan umat Islam di negeri ini lebih pada memasukkan semangat kekhalifahan dengan cara demokratis dan konstitusional, tanpa mengubah bentuk negara dan falsafah serta ideologi bangsa. Setiap upaya mengubah hal itu, apalagi dilakukan dengan cara tidak demokratis dan

tidak konstitusional, maka sebagaimana keputusan MUI dapat dikategorikan sebagai *bughat* yang boleh diperangi.

Dalam konteks ini, keberadaan kelompok yang mendukung ISIS yang mempunyai agenda untuk mengubah negara dan falsafah serta ideologi bangsa, apabila telah ada gerakannya secara nyata maka dalam pandangan hukum Islam sudah sah dianggap sebagai *bughat*. Untuk itu negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah strategis agar kelompok tersebut tidak berkembang. Namun begitu, kebijakan negara terkait dengan hal ini jangan hanya menggunakan pendekatan keamanan saja, tapi juga menggunakan pendekatan keagamaan dengan melibatkan para ulama. Pendekatan keamanan hanya akan menjangkau hal-hal di permukaan saja. Sedangkan akar masalahnya hanya bisa dijangkau dan dihilangkan melalui pendekatan keagamaan, yaitu melalui pemahaman keagamaan yang benar[]

3

MEMBANGUN HARMONI KEBANGSAAN

Ketika beberapa kasus kekerasan muncul di antara riak-riak reformasi dan demokrasi, ada sebagian pandangan yang melihat latar belakang agama sebagai unsur pemicunya. Media mencatat, kekerasan kerap muncul dengan mengatasnamakan agama atau aliran tertentu. Lihatlah, perbedaan pandangan seputar isu-isu keagamaan kekinian telah melahirkan dua kutub yang bersebrangan: radikal dan liberal.

Radikalisme identik dengan perilaku intoleran terhadap perbedaan, ekstrem dalam menyikapi masalah, dan menjadikan kekerasan sebagai cara penyelesaian masalah seperti terorisme. Radikalisme di setiap zaman selalu menjadi *common enemy* karena selalu menimbulkan berbagai kerusakan di tengah-tengah masyarakat.

Perbedaan pendapat selalu menjadi isu utama tumbuhnya radikalisme. Masih ada sebagian kelompok masyarakat yang belum bisa menerima arti perbedaan. Akibatnya perbedaan dipaksa harus melebur dalam satu pemahaman yang mereka bangun.

Tragedi kekerasan kelompok radikal juga meninggalkan pesan bahwa pemahaman merekalah yang paling benar. Perbedaan pendapat yang seyogyanya sebuah dinamika

kehidupan yang harus didialogkan, justru menjadi alasan untuk adanya pemaksaan pendapat terhadap mereka yang kontra. Di satu sisi mereka menegaskan pendapatnya, namun di sisi lain pendapat di luar mereka salahkan. Akibatnya perbedaan selalu identik dengan kekerasan sebagai jalan keluarnya.

Sikap kelompok radikalis dalam bersosialisasi dengan kelompok lainnya telah melahirkan berbagai tragedi sosial berupa runtuhnya rasa kebersamaan dan saling menghormati. Ketika kelompok lain bersebarangan, maka permusuhan dikumandangkan dan kekerasan menjadi cara penyelesaiannya. Kehidupan yang seyogyanya tumbuh dalam bingkai kebersamaan dan saling menghormati, diruntuhkan oleh sikap egois dan mementingkan diri sendiri.

Dalam kehidupan yang heterogen dari sisi budaya, bahasa, dan bahkan agama tentunya sangat riskan dengan perbedaan. Latar belakang sosial budaya dan ekonomi tak bisa dihindarkan untuk munculnya perbedaan. Dengan demikian, jika radikalisme tumbuh subur dalam komunitas masyarakat yang heterogen, niscaya gesekan dan perselisihan bahkan hingga kontak fisik, akan mudah tersulut.

Bukan hanya dalam ranah konflik horizontal, agama juga dikritik atas ketidakmampuannya mengarahkan pemeluk untuk menjunjung moralitas. Tinggginya angka korupsi menjadi pintu masuk dalam melihat rendahnya kualitas penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama. Lihatlah, sebagian besar kasus korupsi dilakukan oleh mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan agama.

Di sisi lain, lembaga-lembaga keagamaan yang ada di berbagai sudut negeri, keberadaannya terkesan berjalan sendiri-sendiri. Permasalahan kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan pemahaman keagamaan umat masih jauh dari harapan. Padahal ada banyak

Dilihat dari realitas sejarah, agama di Indonesia belum sepenuhnya berhasil mengaktualisasikan potensi profetiknya

untuk perubahan yang signifikan. Kenyataan ini lebih disebabkan karena agama dalam perlakuan umum masyarakat masih diposisikan sebagai *sacramental religion* yakni corak keberagamaan yang bersifat ritualistik-spiritualistik. Padahal, agama yang ada di Indonesia merupakan agama etik *(ethical religion)* yang berorientasi pada pengembangan etika dalam arti yang seluas-luasnya atau apa yang disebut moralitas agama (akhlak).

Disinilah momentum penting bagi penegasan kembali fungsi kritis agama dalam mengevaluasi posisi manusia dalam berbangsa dan bernegara, mengaplikasikan moralitas publik sekaligus mendudukkan peran agama secara fungsional dalam melaksanakan fungsi kritis untuk mengendalikan kehidupan masyarakat menuju kehidupan yang bermoral dan manusiawi. Jika upaya tersebut berhasil dilakukan, maka operasionalisasi agama sebagai sistem keyakinan yang dapat menjadi bagian atau inti dari sistem-sistem nilai yang ada dalam masyarakat bersangkutan dan menjadi pendorong, penggerak serta pengontrol untuk anggota-anggotanya untuk tetap berjalan sesuai dengan ajaran-ajaran agamanya berlangsung dengan baik.

A. Pembangunan Nasional Bidang Agama

Agama memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa. Pengakuan akan kedudukan dan peran penting agama ini tercermin dari penetapan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama falsafah negara Pancasila, yang juga dipahami sebagai sila yang menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. Oleh sebab itu, pembangunan agama bukan hanya merupakan bagian integral pembangunan nasional, melainkan juga bagian yang seharusnya melandasi dan menjiwai keseluruhan arah dan tujuan pembangunan nasional.

Selain memiliki posisi yang sangat penting, agama juga menempati posisi yang unik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tercermin dalam suatu rumusan terkenal tentang hubungan antara agama dan negara di Indonesia bahwa

"Indonesia bukanlah negara teokratis, tetapi bukan pula negara sekular". Rumusan ini berarti tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak didasarkan pada satu paham atau keyakinan agama tertentu, namun nilai-nilai keluhuran, keutamaan dan kebaikan yang terkandung dalam agama-agama diakui sebagai sumber dan landasan spiritual, moral dan etik bagi kehidupan bangsa dan negara.

Merujuk pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ada enam landasan filosofis bagi pembangunan bidang agama, yaitu: *Pertama,* agama sebagai sumber nilai spiritual, moral dan etik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembangunan bidang agama merupakan upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pengetahuan dan penghayatan umat beragama terhadap nilai-nilai keluhuran, keutamaan, dan kebaikan yang terkandung dalam ajaran agama. Pengetahuan dan penghayatan itu diharapkan dapat mengejawantah dalam perilaku dan akhlak mulia warga negara sehingga dapat menghasilkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat dan berkeadaban.

Sebagaimana telah umum diyakini, agama bukan sekadar mengajarkan tentang hubungan antara pemeluk agama dan Sang Pencipta, melainkan juga tentang hubungan antar sesama manusia dan hubungan dengan alam sekitarnya. Oleh sebab itu, pembangunan bidang agama diarahkan bukan saja untuk meningkatkan kualitas kesalehan individual umat beragama, tetapi juga mendorong terwujudnya kesalehan sosial dan ekologis, serta moralitas publik dalam pengelolaan kehidupan bernegara.

Sikap toleran dan penghormatan terhadap pandangan dan keyakinan orang lain, kepedulian terhadap sesama manusia, kerjasama dan tolong-menolong, adalah di antara wujud dari kesalehan sosial. Sementara itu, pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya alam yang disertai perlindungan dan pemeliharaan kelestariannya antara lain merupakan bentuk-bentuk nyata dari kesalehan ekologis. Adapun moralitas publik dalam kehidupan

bernegara antara lain termanifestasi dalam penyelengaraan urusan pemerintahan dan negara yang sejalan dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta terbebas dari perilaku korup dan menyimpang.

Kedua, penghormatan dan perlindungan atas hak dan kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi warga negara. Hak dan kebebasan beragama warga negara diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 UUD 1945 Ayat 2 bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Jaminan itu ditegaskan pula pada bagian lain, yaitu Pasal 28 E UUD 1945 Ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali," dan "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya." Selain itu, konstitusi juga menegaskan bahwa hak beragama adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun; bahwa setiap warga berhak mendapat perlindungan dari setiap perlakuan diskriminatif; dan bahwa perlindungan dan penegakan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28 I UUD 1945 Ayat 1, 2, dan 4).

Sesuai amanat konstitusi, negara dan pemerintah berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan atas hak setiap warganya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta memberikan fasilitasi dan pelayanan untuk pemenuhan hak dasar warga negara tersebut. Dengan demikian, aspek perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak beragama sebagai bagian dari hak asasi warga negara menjadi landasan pokok bagi pembangunan bidang agama.

Sementara kebebasan untuk beragama atau berkeyakinan merupakan hak asasi warga negara, namun manifestasi dari kebebasan beragama atau berkeyakinan itu merupakan aspek yang dapat dibatasi atau diatur oleh negara. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang disepakati oleh masyarakat internasional bahwa manifestasi kebebasan beragama atau berkeyakinan dapat dibatasi berdasarkan undang-undang guna melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan dan moralitas publik, serta untuk melindungi hak-hak fundamental atau kebebasan pihak lain (*International Covenant on Civil and Political Rights* Pasal 18 Ayat 4). Pembatasan atau pengaturan serupa dinyatakan dalam Pasal 28 J UUD 1945 Ayat 2 yang berbunyi: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil, sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

Ketiga, kerukunan umat beragama dan tata kelola kehidupan beragama. Sebagai bangsa multietnis, budaya, dan agama, kerukunan hidup umat beragama menjadi hal yang sangat penting dan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerukunan hidup umat beragama menjadi pilar penting bagi terwujudnya persatuan, kesatuan, dan ketahanan nasional, sekaligus menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik dan keamanan yang niscaya bagi terselenggaranya pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Landasan bagi pengembangan kerukunan umat beragama yang selama ini dijadikan pijakan adalah prinsip trilogi kerukunan, yaitu kerukunan antarumat beragama, kerukunan intraumat beragama dan kerukunan antara umat beragama dan pemerintah. Tantangannya adalah bagaimana kerukunan tersebut dikembangkan lebih jauh sehingga tidak hanya di kalangan elite

agama, tetapi juga menjangkau lapisan umat beragama yang lebih luas.

Kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak asasi setiap warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi negara Republik Indonesia. Namun demikian, diperlukan pengaturan menyangkut aspek perwujudan dari hak dan kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan itu agar kebebasan seorang warga tidak melanggar hak asasi dan kebebasan warga lain dalam beragama dan berkeyakinan, serta untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan dan moralitas publik. Oleh sebab itu, tata kelola kehidupan umat beragama menjadi penting dikembangkan guna mewujudkan kehidupan beragama yang rukun dan damai yang dilandasi atas sikap toleran dan saling menghormati di kalangan umat beragama, tanpa mencampuri substansi dari agama dan keyakinan yang dipeluk oleh warga negara.

Keempat, pengembangan karakter dan jati diri bangsa. Cita-cita nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dilandasi keinginan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang maju, unggul, mandiri, bermartabat, beradab dan sejahtera. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah perlu mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang dapat membentuk manusia Indonesia yang memiliki penguasaan dan keterampilan yang tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan daya saing, serta memiliki karkater dan jatidiri bangsa yang kuat, dengan bertumpu pada keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia.

Di dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 3 dan 4 dinyatakan: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang," dan "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan

bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia."

Upaya pembentukan karakter dan jati diri bangsa, di samping peningkatan penguasaan dan ketrampilan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan etos kerja dan daya saing, dilaksanakan melalui pembangunan agama dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan raudhatul athfal (RA), madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, berakhlak mulia, bermartabat, dan beradab.

Kelima, penyediaan fasilitasi dan pelayanan bagi umat beragama berdasarkan prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik. Salah satu mandat konstitusional yang diemban dalam pelaksanaan pembangunan bidang agama adalah penyediaan fasilitasi dan pelayanan sebagai upaya pemenuhan hak beragama warga negara. Fasilitasi dan pelayanan itu dapat berupa regulasi, kebijakan dan program pembangunan bidang agama. Untuk mencapai keberhasilan yang maksimal, fasilitasi dan pelayanan itu perlu diselenggarakan berdasarkan prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik, meliputi: orientasi pada tercapainya konsensus, adanya keikutsertaan publik dalam pengambilan setiap kebijakan (*participatory*), bertumpu pada asas *rule of law*, efektif dan efisien, dapat dipertanggungjawabkan kepada warganya (*accountable*), berlangsung secara transparan (*transparent*), tanggap terhadap aspirasi dan kebutuhan warga (*responsive*), serta berlangsung adil dan terbuka bagi seluruh warga (*equitable and inclusive*).

Arti penting pengembangan partisipasi dan kemitraan umat beragama dalam pembangunan bidang agama didasari atas kenyataan bahwa sebagian besar penyelenggaraan fasilitasi dan pelayanan keagamaan lebih banyak dikelola oleh umat beragama sendiri. Selain itu, sumber daya manusia dan keuangan yang dimiliki pemerintah sendiri bukan tidak terbatas. Oleh sebab itu,

partisipasi dan kemitraan masyarakat menjadi salah satu unsur penting bagi keberhasilan pembangunan bidang agama sekaligus menjadikan pembangunan bidang agama dapat berjalan lebih selaras dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Pembangunan agama juga harus dilandasi prinsip perlakuan yang adil, setara dan terbuka bagi seluruh umat beragama, sejalan dengan pengakuan negara terhadap nilai keluhuran, keutamaan dan kebaikan agama-agama sebagai landasan spiritual, moral dan etik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih dari itu, pembangunan agama harus didasarkan atas prinsip akuntabilitas agar pembangunan agama dapat berdaya-guna dan berhasil-guna

Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi nasional pembangunan bidang agama serta pendidikan agama dan pendidikan keagamaan digambarkan sebagai berikut: *Pertama,* peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama masyarakat,antara lain melalui: (1) Peningkatan ketaatan beragama masyarakat yang terwujud dalam sikap dan perilaku sosial yang sejalan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam ajaran agama. (2) Menumbuhkembangkan wawasan keagamaan yang lapang dan toleran selaras dengan wawasan kebangsaan dan kebhinnekaan. (3) Menumbuhkembangkan pusat kajian keagamaaan dan sumber belajar masyarakat. (4) Peningkatan pemanfaatan sumber-sumber informasi keagamaan dan perpustakaan rumah ibadat. (5) Peningkatan peran media massa dan teknologi informasi berbasis internet sebagai wahana internalisasi nilai-nilai agama. (6) Peningkatan pemahaman keagamaan masyarakat berwawasan HAM dan gender.

Kedua, pengembangan kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama, antara lain melalui: (1) Pemberdayaan forum kerukunan umat beragama sebagai modal sosial dalam pembangunan nasional. (2) Peningkatan sikap dan perilaku keberagamaan yang inklusif dan

toleran pada masyarakat. (3) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menyampaikan dan mengartikulasikan aspirasi-aspirasi keagamaan melalui cara-cara damai. (4) Pencegahan insiden kekerasan terkait dengan isu-isu keagamaan. (5) Peningkatan kerjasama intern dan antarumat beragama, dan pemerintah. (6) Peningkatan peran dan kerjasama kelompok-kelompok sosial keagamaan dalam upaya penciptaan dan pemeliharaan kerukunan hidup beragama. (7) Peningkatan kualitas penanganan konflik bernuansa keagamaan yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan kelompok-kelompok sosial keagamaan. (8) Peningkatan koordinasi antarinstansi/lembaga pemerintah dalam upaya penanganan konflik terkait isu-isu keagamaan. (9) Pengembangan wawasan multikultur dan pendidikan ruhani bagi guru-guru agama, penyuluh agama, siswa, mahasiswa dan para pemuda calon pemimpin agama. (10) Pemantapan landasan peraturan perundang-undangan tentang kemerdekaan beribadat dan kerukunan umat beragama.

Ketiga, peningkatan kualitas pelayanan bagi umat beragama, antara lain melalui: (1) Peningkatan kualitas pelayanan bagi umat beragama. (2) Peningkatan kualitas pelayanan lembaga sosial keagamaan. Peningkatan kualitas pelayanan data dan informasi keagamaan. (3) Peningkatan pengelolaan dan fungsi rumah ibadat. (4) Peningkatan pelayanan jaminan produk halal. (5) Peningkatan kualitas pengelolaan dana sosial keagamaan dan kapasitas lembaga keuangan berbasis agama. (6) Peningkatan kapasitas instansi/lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan bagi umat beragama disertai dengan meningkatnya profesionalisme aparatur penyedia layanan. (7) Peningkatan kebijakan dan tata kelola yang baik dalam penyediaan pelayanan bagi umat beragama dengan dilandasi oleh prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Keempat, peningkatan akses dan kualitas pendidikan Raudhatul Athfal, Madrasah, Perguruan Tinggi Agama,

pendidikan agama dan pendidikan keagamaan,antara lain melalui: (1) Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan berbasis keagamaan yang bermutu. (2) Perintisan pendidikan berbasis keagamaan bertaraf internasional. (3) Peningkatan mutu dan daya saing pendidikan tinggi agama. (4) Peningkatan Ma'had Aly pada pondok pesantren. (5) Peningkatan mutu pengelolaan dan layanan pendidikan diniyah dan pondok pesantren. (6) Peningkatan layanan pendidikan nonformal dan vokasional pada pondok pesantren. (7) Peningkatan mutu pendidikan agama di sekolah. (8) Peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidikan. (9) Peningkatan pastisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan Raudhatul Athfal, Madrasah, Perguruan Tinggi Agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Secara operasional, untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan agama, yaitu: *Pertama,* strategi empiris rasionalis, yaitu pemecahan masalah dengan menggunakan pendekatan ilmiah melalui observasi-observasi di lapangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengadakan penelitian yang kontinyu berkaitan dengan pendidikan agama dan keagamaan. *Kedua,* strategi normatif, yaitu pendekatan nilai-nilai atau kebudayaan yang masih berlaku di masyarakat. Strategi ini dalam rangka menggiring opini publik agar tidak lagi berasosiasi negatif terhadap dunia pendidikan agama dan keagamaan. Alternatif ini bisa diwujudkan melalui perubahan paradigma dan tingkah laku insan pendidikan agama dan keagamaan yang kemudian menjadi suri tauladan di masyarakat. *Ketiga,* strategi kebijakan administratif, yaitu alternatif pemecahan masalah yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan teknis dan politis dalam pemerintahan. Sebab bagaimanapun juga perlu dipahami bahwa hubungan pendidikan dengan penguasa adalah hubungan yang tidak lepas dari kepentingan politik. Hubungan antara pendidikan dan politik bukan sekadar hubungan saling memengaruhi, tetapi juga hubungan fungsional

Dari pemaparan di atas jelaslah bahwa agama adalah pilar penting ketika bangsa ini mulai menata kehidupannya setelah jatuh dari penjajahan. Para tokoh agama bersama pemerintah telah menjalin kerjasama yang baik dan bahu membahu menata bangsa ini. Dan pembangunan bidang agama adalah bagian penting dalam pembangunan nasional.

Atas dasar ini pulalah pemerintah berkepentingan terbangunnya kualitas keberagamaan yang baik, sehingga masing-masing pemeluk mampu menjadi pribadi yang bernilaikan keluhuran ajaran agama. Dengan terbangunnya kualitas keberagamaan yang baik, maka berkontribusi besar dalam menciptakan kehidupan bangsa dan negara yang adil, damai dan sejahtera.

B. Kerukunan Pilar NKRI

Kerukunan umat beragama merupakan salah satu agenda strategis sebagai fondasi ideal meletakkan segenap upaya bersama mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara. Tanpa kerukunan yang terjalin baik maka berbagai program pembangunan bangsa akan menemui jalan buntu. Pada tataran inilah kerukunan umat beragama harus diupayakan bersama oleh segenap elemen bangsa yang sadar akan pentingya pembagunan karakter dan budaya rukun.

Berbagai program Kementerian Agama baik di pusat maupun daerah terkait kerukunan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil yang cukup baik. Indikator yang dapat digunakan misalnya semakin berkurangnya berbagai konflik bernuansa agama di berbagai daerah dan semakin berkembangnya geliat pendidikan multikultural di berbagai tingkat dan jenjang pendidikan sebagai jembatan emas menuju kerukunan. Tentu hal ini juga merupakan hasil akumulasi kehendak mulia dan karya kolektif dari berbagai pihak yang mendukung dan peduli dengan kerukunan.

Terkait dengan keberhasilan program kerukunan tersebut, saat ini Indonesia dianggap sebagai laboratorium kerukunan umat beragama. Paling tidak hal ini terungkap dari pernyataan Menteri Luar Negeri Italia, Franco Frattini dan pendiri komunitas Sant' Egidio, Andrea Riccardi, dalam pidatonya pada pembukaan seminar internasional dengan tema "Unity in Diversity: The Indonesian Model for a Society in which to Live Together" yang digelar pada 4 Maret 2009 di Roma.

Indonesia adalah sebuah negara yang dipandang istimewa, sebagai tempat persandingan keberagaman dimana agama-agama besar dunia berkembang dengan subur, saling toleran tanpa adanya sikap saling meniadakan. Berbagai peninggalan peradaban agama terdahulu tidak pernah disia-siakan atau dihancurkan melainkan dihargai, bahkan dianggap sebagai simbol kekayaan bangsa.

a. Isu-isu Kerukunan

Pujian tentang keberhasilan kerukunan di Indonesia yang datang dari berbagai pihak tentu saja tidak boleh membuat terlena, tetapi justru harus tetap mawas diri, karena kerukunan umat beragama bukan merupakan sesuatu yang stagnan dan final, ia terus mengalami perubahan, kadang sangat sederhana tetapi pada kondisi tertentu sangat kompleks terkait dengan berbagai dinamika kehidupan sosial yang berkembang. Kepekaan terhadap dinamika kehidupan sosial masyarakat terkait kerukunan tersebut yang harus dimiliki oleh kita semua yang memiliki tekad menjaga dan melestarikan kerukunan.

Tantangan terhadap kerukunan ternyata tidak semakin berkurang seiring dengan kondusifnya suasana kerukunan itu sendiri, melainkan justru makin bertambah. Selain permasalahan seputar rumah ibadat, penyiaran agama, penodaan agama, secara nyata masyarakat dapat menyaksikan merebaknya berbagai paham keagamaan yang keluar dari arus pemahaman "mainstream" yang sedikit banyak akan berpengaruh terhadap wajah kerukunan.

Pada titik tertentu kondisi ini tidak menimbulkan masalah, tetapi manakala ekspresi keagamaannya berbenturan dengan sistem dan paham keagamaan "mainstream" secara tajam baru akan menimbulkan permasalahan.

b. Dua Kutub Keagamaan

Ekspresi keagamaan terbaru yang keluar dari arus "mainstream" setidaknya dapat digolongkan dalam dua "kutub" ekstrem, kutub pertama dikenal dengan kutub radikalisme dan kutub kedua adalah liberalisme. Kutub radikal ditandai dengan berbagai sikap fanatisme, dan yang paling berat adalah kelompok yang selalu mengatakan bahwa di luar dirinya adalah salah secara mutlak. Ekspresi yang berlebihan dari sikap ini dapat berpotensi mengganggu kerukunan.

Kutub ekstrem lain dikenal dengan sebutan paham keagamaan liberal. Corak keagamaan liberal pada dasarnya sangat menghargai kerukunan dan multikulturalisme tetapi terjerumus pada sekularisme, inklusifisme, dan pluralisme agama tanpa kendali yang jelas.

Sekularisme dipahami dengan menganggap bahwa agama itu tidak ada urusan dengan dunia maupun negara. Inklusifisme dipahami secara sangat ekstrem dengan menganggap agama kita dan agama orang lain itu posisinya sama, saling mengisi, mungkin agama kita salah, agama lain benar. Tidak boleh mengakui bahwa agama kita saja yang benar.

Lebih-lebih lagi faham pluralisme dipahami dengan menganggap semua agama itu sejajar, paralel, prinsipnya sama, hanya beda teknis. Hal yang harus diwaspadai dalam corak keagamaan liberal ini adalah rusaknya nilai-nilai akidah dan sakralitas dari agama itu sendiri. Yang ingin kita tuju adalah kerukunan yang tidak perlu mengorbankan akidah dan kemurnian masing-masing agama.

c. Peta Masalah

Peta permasalahan seputar persoalan keharmonisan

umat beragama tersebut kiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bahwa, *Pertama,* persoalan kerukunan umat beragama adalah persoalan yang sangat luas dan kompleks. *Kedua,* agama bukanlah pemicu konflik, namun variabel-variabel sosial-keagamaanlah yang kiranya perlu ditelusuri lebih lanjut. Sebab, semua agama pada prinsipnya sama-sama menanamkan ajaran kedamaian dan cinta terhadap sesama manusia.

Ketiga, dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keharmonisan umat beragama, masih banyak peluang yang dapat diisi oleh segenap elemen masyarakat, sehingga persoalan kerukunan bukanlah tanggung jawab pemerintah semata, namun juga merupakan agenda bersama yang keberhasilannya sangat menentukan arah dan masa depan masyarakat Indonesia yang damai, rukun, sejahtera dan bermartabat.

Keempat, diperlukan kader-kader kerukunan yang rencananya akan dibentuk dengan nama pemandu harmonisasi umat yang berperan membimbing, membina keharmonisan kehidupan kehidupan keagamaan yang sekaligus sebagai mitra pemerintah dalam mendorong keterlibatan aktif umat membangun bangsa dan negara dalam roh dan semangat dasar falsafah negara Pancasila dan UUD 1945 serta dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

d. Desain Kebijakan Kerukunan

Salah satu agenda besar bangsa Indonesia dewasa ini dan ke depan adalah mengembangkan sikap dan perilaku sosial yang mendukung bagi pemaknaan keharmonisan kehidupan umat beragama dalam koridor integrasi nasional yang dicita-citakan bersama.

Sikap dan perilaku sosial tadi haruslah dibangun dan dikembangkan atas dasar paradigma kerukunan umat beragama dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam tataran praksis, membangun keharmonisan kehidupan umat beragama tidak lepas dari pemaknaan

terhadap pluralitas dan unitas bangsa. Dalam hubungan ini perlu digarisbawahi bahwa pluralitas dan unitas merupakan pilar penyangga kebesaran bangsa. Oleh karena itu, tidak pada tempatnya apabila konsep pluralitas dan unitas tersebut dipertentangkan. Justru sebaliknya, pluralitas dan unitas perlu dikembangkan secara dinamis dan kreatif dalam rangka memperkaya jati diri dan khazanah kebudayaan bangsa.

Menyadari akan hal tersebut, Kementerian Agama lewat unit Pusat Kerukunan Umat Beragama(PKUB) telah membuat berbagai program dan strategi yang komprehensif untuk mewujudkan keharmonisan umat beragama diantaranya adalah:

1) Inovasi dan pemantapan program keharmonisan umat beragama.

   Pada awal tahun Kementerian Agama (PKUB) selalu mengadakan workshop konsultasi program kerukunan umat beragama. Workshop dimaksud untuk memetakan program keharmonisan atau kerukunan umat beragama agar lebih memiliki output yang riil pada masyarakat akar rumput.

   Program disusun berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi yang diemban PKUB, kebutuhan riil di lapangan, dan berbagai agenda jangka panjang. Penyusunan akan sesuai dengan kebutuhan nasional sekaligus kebutuhan spesifik di berbagai daerah karena potret permasalah keharmonisan umat dari masing-masing provinsi akan dipresentasikan oleh Kasubbag Hukmas dan KUB sebagai mitra kerja PKUB di daerah.

2) Mengupayakan terbentuknya tenaga fungsional pemandu harmonisasi umat.

   Paradigma berpikir pembinaan keharmonisan umat beragama mulai bergeser dari arah struktural ke arah fungsional. Arah fungsional dirasakan akan lebih

menyentuh masyarakat akar rumput secara langsung, untuk itu maka sangat urgen sekali dibentuknya tenaga pemandu harmonisasi umat sebagai kader-kader penabur keharmonisan umat beragama.

3) Program pengembangan wawasan multikultural.

Menurut Sosiolog UI Parsudi Suparlan, multikulturalisme adalah konsep yang mampu menjawab tantangan perubahan zaman dengan alasan multikulturalisme merupakan sebuah ideologi yang mengagungkan perbedaaan budaya, atau sebuah keyakinan agama yang mengakui dan mendorong terwujudnya pluralisme budaya sebagai corak kehidupan masyarakat.

Multikulturalisme akan menjadi pengikat dan jembatan yang mengakomodasi perbedaan-perbedaan termasuk perbedaan kesukubangsaan dan suku bangsa dalam masyarakat yang multikultural. Perbedaan itu dapat terwadahi di tempat-tempat umum, tempat kerja dan pasar, dan sistem nasional dalam hal kesetaraan derajat secara politik, hukum, ekonomi, dan sosial.

Senada dengan hal tersebut, PKUB memandang bahwa pendidikan multikultural merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya besar untuk menumbuhkan keharmonisan umat beragama dalam ruang kebangsaan. Untuk itu telah dan akan digulirkan berbagai program pengembangan wawasan multikultural, mulai dari pendidikan multikultural bagi anak-anak, penyiar agama, tokoh-tokoh agama, guru-guru agama, maupun berbagai pihak yang memiliki posisi strategis sebagai agen keharmonisan umat.

4) Menggali berbagai kearifan lokal penopang harmonisasi.

Keharmonisan umat beragama yang dibangun antar berbagai kelompok salah satunya terwujud karena adanya kearifan lokal di masing-masing daerah di

Indonesia berdasarkan kesepakatan anggota masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan yang ada. Dalam berbagai kasus yang terjadi, ternyata kearifan lokal telah mampu menyelesaikan masalah secara lebih efektif guna terwujudnya harmonisasi yang mantap.

Sebagai contoh, di Medan, Sumatera Utara, telah sejak lama dikenal adat *dalihan na tolu* yang berfungsi merekatkan masyarakat, walaupun berbeda agama dan etnis. Di Jawa Timur, terdapat konsep *siro yo ingsun, ingsun yo siro* (Anda ya saya, saya ya Anda) yang merupakan perwujudan konkret egalitarianisme dan sikap persaudaraan. Di Kalimantan Tengah terdapat rumah betang, yaitu rumah panjang yang dihuni berbagai anggota keluarga yang mungkin berbeda agama, tetap hidup damai dilandasi cinta, kasih sayang, dan rasa persaudaraan. Kehidupan masyarakat Suku Bugis di Sulawesi Selatan memiliki konsep *sipakalebbi* dan *sipakatau* yang berarti saling menghormati dan menghargai.

Dalam Suku Makassar dikenal *sikatutui* dan *sipakabaji* yang berarti saling mengingatkan dan memaafkan. Dalam masyarakat Toraja terdapat tradisi *solata* yang merupakan nilai-nilai yang mendorong keharmonisan umat beragama, dan masih banyak lagi kearifan lokal yang menopang keharmonisan umat beragama.

Menyadari besarnya kearifan lokal dalam menjaga harmonisasi umat beragama, PKUB telah dan akan terus mengadakan kegiatan penggalian dan reaktualisasi kearifan lokal yang dituangkan dalam program workshop faktor perekat kerukunan dan harmonisasi umat.

5) Menjalin kemitraan aktif

Jalinan PKUB dengan berbagai ormas keagamaan, Majelis agama, maupun tokoh-tokoh agama sudah terbentuk sedemikian baiknya. PKUB memandang bahwa tokoh

agama maupun lembaga agama merupakan mitra strategis untuk menegakkan harmonisasi umat.

6) Pemberdayaan FKUB.

FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) sebagai mitra kerja PKUB yang berada di seluruh provinsi Indonesia memiliki peran strategis untuk mengharmoniskan umat beragama sekaligus untuk memberdayakan umat beragama. Fungsi dan peran FKUB yang strategis tersebut perlu dioptimalkan dan didinamiskan supaya memiliki kontribusi nyata bagi keharmonisan umat beragama.

7) Pendekatan terhadap penganut faham radikal dan liberal.

Berkembangnya berbagai pemikiran keagamaan radikal dan liberal di Indonesia akan mewarnai geliat keharmonisan umat beragama. Warna dan pengaruh yang dibawa dan ingin diterapkan di negara yang banyak didominasi kultur keagamaan moderat jelas akan menimbulkan berbagai perentangan. Mewaspadai hal tersebut maka PKUB memiliki tugas pokok dan fungsi baru untuk melakukan pendekatan terhadap pihak yang berhaluan pemikiran radikal dan liberal.

8) Optimalisasi media

Peran media baik cetak maupun elektronik dalam mengupayakan penyebaran suatu pemikiran, dan gagasan sangat vital. Oleh karena itu, PKUB akan terus menggunakan media dimaksud untuk menyebarkan berbagai program dan gagasan multikultural agar cepat "meruang" secara lebih luas.

Media cetak yang digunakan adalah dengan secara rutin menerbitkan jurnal dan leaflet kerukunan, melakukan kerja sama aktif dengan sejumlah harian nasional seperti Kompas, Sinar Harapan, sedangkan media elektronik telah melakukan kerja sama pengembangan wawasan multikultural dengan berbagai stasiun televisi diantaranya adalah TVRI, MetroTV, dan TV One.

9) Melaksanakan berbagai kegiatan riil yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat luas. Realisasi dari kegiatan dimaksud adalah konsensus bersama antara PKUB dengan majelis-majelis agama untuk membentuk kawasan binaan kerukunan, kawasan dimaksud merupakan cerminan dari kerukunan antar umat beragama untuk melakukan kerja sama mengatasi berbagai masalah sosial yang ada.

   Dalam hal ini kerukunan bukan hanya disyaratkan dengan suasana damai dan tidak adanya konflik antar umat beragama tetapi kerukunan merupakan suatu kekuatan yang "bergerak aktif untuk melakukan sesuatu", bukan kerukunan pasif.

10) Pelayanan terhadap umat Khonghucu.

   Sejak tahun 2010 telah dilaksanakan Workshop Orientasi Guru Agama Khonghucu yang diikuti oleh 50 guru agama Khonghucu, sehingga pada tahun ajaran 2011 mata pelajaraan Agama Khonghucu telah diajarkan pada sekolah dasar maupun menengah.

   Terkait dengan standar isi mata pelajaran agama Khonghucu maupun standar kompetensi lulusan agama Khonghucu telah diatur dalam Permendiknas No 47 dan 48 tahun 2008. Pendataan pemeluk agama Khonghucu juga akan dilakukan oleh BPS dengan mengacu pada UU Adminduk No 23 tahun 2006.

11) Dialog

   Lingkungan Hidup Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia merupakan rahmat yang wajib dikembangkan dan dilestarikan, agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi bangsa dan rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.

   Oleh karena itu, manusia seharusnya berusaha memelihara bahkan meningkatkan keberadaan lingkungan hidup.

Salah satu upayanya adalah imbauan kepada masyarakat agar bekerja sama dengan semua pihak, tanpa memandang kedudukan, ras, agama, dan suku untuk bersama-sama memelihara lingkungan hidup dalam hal ini pelestarian lingkungan pesisir.

12) Interfaith Dialogue

Peristiwa serangan 11 September 2001 (11/9) di World Trade Centre (WTC) New York, Amerika Serikat (AS) telah meninggalkan dua hal: kewaspadaan dan kecurigaan. Sejak peristiwa itu, terorisme yang dikaitkan dengan agama dinilai sebagai acaman perdamaian dan keamanan internasional. Lebih jauh dari itu, muncul "tuduhan" dari negara-negara Barat khususnya terhadap kelompok Islam tertentu sebagai pelaku terorisme.

Mispersepsi dan misinterpretasi negara-negara Barat telah ikut merugikan negara-negara Islam di dunia termasuk Indonesia yang berpenduduk Islam terbesar di dunia. Tindakan teroris telah mengubah perspektif dunia tentang hubungan internasional dan menimbulkan dampak, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan antar umat beragama.

Di Indonesia, terjadinya serangkaian serangan bom menambah kekhawatiran masyarakat dunia dan menimbulkan dugaan, apakah Indonesia telah menjadi sarang dan tempat berkembangnya teroris di wilayah Asia Tenggara "homegrown terrorism".

Adanya aksi pengeboman telah ikut mencoreng wajah Islam di Indonesia. Namun, pelaksanaan Pemilu Legislatif dan pemilihan langsung Presiden sejak tahun 2004 telah mengangkat harkat dan martabat Indonesia di mata masyarakat Internasional, karena pelaksanaannya berjalan secara aman, damai, dan sukses.

Hal ini membuktikan bahwa Islam dan Demokrasi dapat

berjalan seiringan. "Success story" tersebut menimbulkan keinginan kuat untuk mempromosikan citra Indonesia sebagai negara Demokrasi dengan penduduk mayoritas Islam yang moderat serta mengubah citra Indonesia sebagai korban terorisme dan bukan sarang terorisme dunia.

Sejak tahun 2004, Kementerian Agama c.q. Pusat Kerukunan Umat Beragama bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri ikut mempromosikan budaya dialog lintas agama kepada masyarakat internasional dalam usaha mengembangkan sikap toleransi dan saling memahami antar sesama umat beragama dan antar peradaban.

Dialog lintas agama dinilai penting untuk menghilangkan kecurigaan dan kesalahpahaman antar umat beragama dengan lebih mempromosikan harmoni dan kerja sama.

Dialog lintas agama dan budaya dipercaya dapat membantu menciptakan dunia yang lebih aman dan damai, terutama di tengah maraknya ancaman terorisme.

Selain itu, lewat kegiatan dialog lintas agama dan budaya, stereotip negatif tentang Islam yang berkembang di Barat dapat dihilangkan, terutama lewat pengalaman Indonesia yang adalah bangsa besar dan multikultur tetapi dapat hidup berdampingan, rukun, dan harmonis.

Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Kementerian Agama telah dan akan terus bekerja sama dengan semua pihak untuk ikut mendorong terlaksananya kegiatan "Interfaith Dialogue" bilateral, regional, maupun multilateral, baik yang diadakan di dalam negeri maupun di luar negeri; karena disadari bahwa konflik dan persoalan kerukunan di dalam negeri tidak berdiri sendiri tetapi sudah menjadi bagian dari persoalan internasional.

Selama ini Pusat Kerukunan Umat Beragama telah ikut terlibat di *Regional Interfaith Dialogue* seperti *Asia Pacific Interfaith Dialogue* dan *ASEM Interfaith Dialogue; Bilateral*

Interfaith Dialogue seperti RI-Belanda, RI-Kanada, RI-UK Islamic Advisory Group, RI-Austria, RI-Lebanon, RI-Jerman, RI-Rusia, RI-AS, RI-Hungaria, RI-Ceko, RI-Bulgaria, RI-Spanyol, RI-Serbia, RI-Yunani, RI-Ethiopia, RI-EU, RI-Polandia; *Asia Erope Youth Interfaith Dialogue* di Bandung (Team PKUB).

Sebagai catatan penutup, apa yang ingin dicapai melalui program-program peningkatan keharmonisan umat beragama sesungguhnya adalah suasana kondusif dalam suatu konteks berbangsa dan bernegara dalam realitas masyarakat yang plural. Agama apa pun yang dianut masyarakat akan berlaku pada kehidupan berbangsa dan bernegara bila memang pelaksanaan ajaran agama tersebut dijiwai dan diamalkan dengan benar.

Kebersamaan, keharmonisan dan kerukunan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin adalah tetap menjadi komitmen dan fokus pembinaan Kementerian Agama.[31]

C. Membangun Kemitraan Strategis

Sebagai sebuah upaya untuk menjaga kerukunan internal umat Islam, diperlukan kemitraan dengan *stake holder* agar tujuan dapat tercapai dengan baik:

a. Kemitraan dengan Ormas Islam

Keberadaan lembaga/ormas keagamaan adalah potensi besar yang bisa digunakan untuk sosialisasi tata nilai agama. Ormas keagamaan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan masyarakat. Ormas sendiri didirikan oleh masyarakat, sehingga Ormas akan terkait erat dengan dinamika kehidupan masyarakat atau pengikutnya.

---

31. Prof. Dr. H. Achmad Gunaryo, M.Soc.Sc Mantan Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Artikel pernah dimuat di antaranews.

Atas dasar itulah, keterkaitan yang erat antara Ormas keagamaan dan masyarakat harus dijadikan pintu untuk menyampaikan universalitas agama. Melalui Ormas/lembaga keagamaan inilah agama diperkenalkan kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan dengan mudah menerima penjelasan dari Ormas/lembaga keagamaan karena memang mereka memiliki ikatan yang kuat.

Kementerian Agama misalnya, telah memaksimalkan peran ormas-ormas yang ada. Untuk menjadikan Ormas Islam semakin berdaya di masa depan, Kementerian Agama dengan cara proaktif mengundang mereka, sekecil apa pun Ormas itu. Selama ini Ormas-ormas Islam mungkin kurang mendapat perhatian. Ini artinya, Kementerian Agama berusaha memberikan peluang kepada Ormas Islam untuk berkonstribusi menyumbangkan pikirannya bagi pemberdayaan umat Islam. Mereka inilah pemilik umat yang sesungguhnya, sehingga banyak persoalan yang bisa diselesaikan.

Kementerian Agama sadar tidak bisa menyelesaikan semua persoalan sendiri, seperti kasus al-Qiyadah, Ahmadiyah, dan lain-lain. Keterlibatan Ormas-ormas Islam ini sangat penting dan besar artinya. Posisi pemerintah adalah sebagai mediator, terutama dalam konflik horizontal, baik dalam internal umat Islam atau antar ormas Islam, seperti penetuan awal Ramadhan, 1 syawal, dan sebagainya

Terkait dengan pembangunan kerukunan umat beragama, ini juga menjadi agenda Kementerian Agama dengan Ormas-ormas Islam. Secara berkala, Kementerian Agama melakukan koordinasi dengan ormas-ormas Islam dalam rangka mencari solusi dan langkah-langkah strategis pembangunan kerukunan umat beragama.

Kerjasama antara Kementerian Agama dengan Ormas Islam diwujudkan antara lain dalam bentuk bantuan operasional organisasi, pelatihan bagi Ormas-ormas dengan melibatkan BNN, serta pembibitan dai muda dari Ormas-ormas untuk dijadikan juru dakwah.

Secara berkala, Kementerian Agama telah melakukan koordinasi dengan ormas-ormas dalam hal penanganan ekstremisme dan radikalisme. Termasuk dalam hal penanganan eks teroris, Kementerian Agama menjalin kerjasama dengan Ormas Islam untuk melakukan dakwah agar para teroris ini bisa kembali ke jalan yang lurus.

Selain itu, Kementerian Agama juga memberikan bantuan dana operasional. Hal ini bertujuan agar ormas bisa maksimal memberikan bimbingan dan dakwah, sekaligus mensosialisasikan arti penting kerukunan umat beragama.

Dalam berbagai kegiatan Kementerian Agama, selalu melibatkan Ormas Islam. Begitu pula, dalam setiap kegiatan Ormas, Kementerian Agama dilibatkan, baik sebagai narasumber maupun fasilitator. Hal ini bertujuan agar antara Kementerian Agama dan Ormas terjalin kerjasama yang baik dan terintegrasi dengan baik, sehingga program pembangunan kerukunan umat beragama dapat berjalan dengan baik. Begitu pula dengan organisasi sosial politik, Kementerian Agama bekerjasama dalam mensosialisasikan kerukunan umat beragama.

Baik dengan Ormas maupun Orsospol, Kementerian Agama terus membangun komunikasi terkait isu-isu aktual dan strategis, terutama menyangkut berbagai masalah kerukunan umat beragama. Isu-isu yang ada harus menjadi isu bersama, sehingga terbangun program yang terintegrasi antara pemerintah dan Ormas. Dengan adanya integrasi dimaksud, maka pembangunan kerukunan umat beragam tidak berjalan masing-masing dengan hasil yang kurang memuaskan tentunya.

Peran komunikasi publik dalam menjaga keharmonisan bangsa ini sangat vital. Melalui berbagai media, Kementerian Agama telah melakukan sosialisasi dan kampanye akan pentingnya keharmonisan umat beragama.

Peran komunikasi publik ini ke depan akan semakin berat, mengingat tantangan yang akan merongrong kerukunan yang sudah terbangun saat ini semakin beragam dan tajam. Segenap

jajaran Kementerian Agama akan terus meningkatkan peran strategisnya guna memperkuat peran komunikasi publik dalam pembangunan keharmonisan umat beragama.

Semua ini memerlukan dukungan dari segenap elemen bangsa. Karena suatu hal mustahil usaha ini bisa dijalankan sendirian. Pemerintah dan masyarakat harus bersatu menjadi komunikator yang baik di bidang kerukunan umat beragama.

b. Pencegahan Radikalisme Agama

Pencegahan radikalisme agama menjadi tema yang dikembangkan dalam kemitraan dengan ormas Islam. Ketua Umum PBNU Said Agil Siradj menegaskan bahwa paham dan gerakan radikalisme agama tidak mungkin dihadapi dengan tindakan dan kebijakan yang parsial, tetapi dibutuhkan perencanaan kebijakan dan implementasi yang komprehensip dan terpadu. Problem radikalisme agama merentang dari hulu ke hilir. Terorisme merupakan *public enemy* yang membutuhkan keseriusan bersama dalam menanganinya, tanpa pamrih pada kepentingan politik yang parsial dan sekadar politik kekuasaan, tetapi pamrih pada politik kebangsaan dan kerakyatan.[32]

Terkait dengan maraknya faham dan gerakan radikalisme agama, termasuk munculnya kembali gerakan NII, Kementerian Agama (baca: Pemerintah) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, terus mengupayakan pencegahan dan penanggulangan hal tersebut melalui langkah-langkah preventif pada pranata institusi pendidikan, lembaga keagamaan dan masyarakat.

Institusi pendidikan merupakan institusi yang paling rentan terhadap infiltrasi berbagai gerakan radikalisme agama, mengingat peserta didik merupakan sasaran yang sangat rentan dilihat dari aspek sosial psikologis. Langkah preventif yang akan dilakukan di institusi pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama, meliputi perguruan tinggi agama, pendidikan agama pada perguruan tinggi umum, madrasah, pesantren, dan

---

32. Republika, 26 April 2011

pendidikan agama pada sekolah, selengkapnya adalah sebagai berikut:[33]

a) Di Perguruan Tinggi Agama Negeri akan dilakukan kegiatan antara lain: Pemetaan radikalisme di seluruh PTAIN; Penguatan organisasi ekstra kampus; Pemasyarakatan ideologi Pancasila; Semiloka dan simposium mengenai strategi preventif dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme agama; Memperkuat regulasi kampus yang mempersempit munculnya pemikiran dan gerakan radikalisme agama; Menjadikan 'Terorisme dan Radikalisme Agama" sebagai materi dalam Mata Kuliah Dasar Umum; Memantau dan membimbing aktivitas kampus melalui Unit Kegiatan Mahasiswa dan Lembaga Dakwah Kampus dengan substansi ibadah dan akhlak mulia bersumber pada nash-nash yang sahih; dan pengembangan wawasan multikultural bagi dosen dan mahasiswa.

b) Di Perguruan Tinggi Umum meliputi kegiatan antara lain: Pemetaan radikalisme di PTU; Pemasyarakatan ideologi Pancasila; penguatan kurikulum dan materi pendidikan agama; penguatan kegiatan ekstra kurikuler keagamaan yang lebih terstruktur; Semiloka dan Simposium tentang Islam dalam berbagai perspektif; pengembangan wawasan multikultural bagi dosen-dosen pendidikan agama; dan sosialisasi bahaya terorisme bagi keutuhan NKRI.

c) Di madrasah meliputi kegiatan antara lain: penguatan kurikulum pendidikan agama melalui kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler; penguatan kegiatan pembinaan kebangsaan melalui kepramukaan; penguatan peran guru BK dalam pemberian bimbingan bagi siswa yang terdeteksi terkontaminasi paham-paham keagamaan yang menyimpang; penguatan hubungan antara madrasah

---

33. Disarikan dari buku "Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia 2012, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2012

dengan komite madrasah dalam penanggulangan masuknya paham-paham menyimpang; dan Pengembangan wawasan multikultural untuk guru dalam memahami ajaran agama

d) Di pesantren melalui kegiatan antara lain: Pengembangan wawasan multikultural dan budaya damai melalui jambore/ kemah santri; pelatihan life skill dan kewirausahaan; sosialisasi "*Islam Rahmatan lil alamin*", makna jihad, pilar-pilar kebangsaan, dan ketahanan nasional; dan pemetaan dan usahausaha preventif bagi pesantren yang rawan terhadap ideologi radikal.

e) Adapun di sekolah umum melalui kegiatan antara lain: pengembangan kegiatan ekstra kurikuler keagamaan; penguatan peranan Kelompok Kerja Guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan Kelompok Kerja Pengawas melalui workshop, seminar; pengembangan wawasan untuk organisasi kerohanian siswa sekolah melalui pelatihan pendidikan agama; dan menambah materi berwawasan multikultural pada kegiatan-kegiatan pesantren kilat dan pelatihan-pelatihan guru agama. Lembaga keagamaan, terutama rumah ibadah, khususnya masjid dan musholla yang berada di lingkungan kampus atau pemukiman merupakan sasaran yang rentan terhadap masuknya paham-paham keagamaan menyimpang mengingat sifat rumah ibadah yang terbuka untuk umum dan lemahnya manajemen rumah ibadah. Di samping itu daya tahan serta antisipasi masyarakat terhadap paham-paham keagamaan menyimpang masih relatif rendah. Hal ini disebabkan antara lain oleh rendahnya pemahaman agama dan lemahnya pembinaan yang sistematis terhadap ajaran agama yang benar.

Langkah preventif yang akan dilakukan di lembaga keagamaan di bawah binaan Kementerian Agama serta pembinaan keagamaan masyarakat, meliputi antara lain:

a) Intensifikasi sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pembinaan kerukunan

umat beragama dan pendirian rumah ibadah;

b) Pemberdayaan rumah ibadah secara multifungsi, menghidupkan organisasi remaja masjid dan rumah ibadah lainnya;

c) Penguatan majelis taklim berperspektif kerukunan, pemberdayaan masyarakat, dan kebangsaan; dan pengembangan wawasan multikultural bagi penyuluh agama dan tokoh agama;

d) Mengembangkan dialog antar tokoh agama;

e) Kampanye budaya damai dan hidup rukun, pengembangan budaya toleransi, pelurusan makna jihad, dan intensifikasi peran Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem);

f) Penguatan *early warning system* kehidupan beragama melalui peningkatan peran penyuluh agama;

g) Pemberdayaan pranata keagamaan masyarakat dalam mengantisipasi masuknya paham menyimpang di masyarakat; dan sinergi antar instansi untuk penguatan kerjasama sosial kemanusiaan lintas agama;

h) Pemberdayaan FKUB dalam mengatasi isu-isu sosial keagamaan.

c. Pembinaan Aliran Keagamaan: JAI[34]

Ahmadiyah didirikan di kota Qodian, India oleh Mirza Ghulam Ahmad pada tanggal 23 Maret 1889. Dalam perkembangannya, Ahmadiyah terbagi menjadi 2 aliran, yaitu Ahmadiyah Qodian dan Ahmadiyah Lahore. Ahmadiyah Qodian berkeyakinan bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai seorang Nabi sedangkan Ahmadiyah Lahore berpendapat Mirza Ghulam Ahmad sebagai pembaharu. Ahmadiyah masuk ke Indonesia pada tahun 1925 dan terbentuk dalam 2 organisasi yaitu Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) sebagai organisasi pengikut Ahmadiyah Lahore, dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sebagai organisasi pengikut Ahmadiyah Qodiani.

JAI terdaftar sebagai Badan Hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman RI Nomor: JA.5/23/13 tanggal 13 Maret 1953 yang dimuat dalam Tambahan Berita Negara Nomor: 26 tanggal 31 Maret 1953. JAI juga terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan di Departemen Dalam Negeri dengan Nomor: 75/D.I/VI/2003 tanggal 5 Juni 2003.

Jumlah anggota JAI, menurut pimpinannya yaitu Ustadz H. Abdul Basit dalam rangkaian dialog dengan Departemen Agama pada akhir 2007 dan awal 2008, sebanyak 300.000-400.000 orang, dengan jumlah kepengurusan cabang JAI sebanyak 320 buah. Adapun menurut estimasi Badan Litbang dan Diklat Departemen

34. Bahan-bahan pada bagian ini diambil dari Sambutan Menteri Agama RI dalam Acara Sosialisasi SKB 3 Menteri tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat di hadapan Tokoh Ormas Islam Tingkat Pusat, di Operation Room Departemen Agama, 9 Juli 2008. Juga dari buku Sosialisasi Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor: 03 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama 2008); dan makalah delegasi Indonesia (M. Atho Mudzhar) berjudul "Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Masalah Ahmadiyah di Indonesia", disajikan dalam sidang MABIMS, tanggal 11 November di Yogyakarta.

Agama, jumlah anggota JAI pada 2008 berkisar antara 50 - 80 ribu orang. Estimasi ini diperoleh karena banyak sekali cabang atau komunitas JAI yang sesungguhnya hanya beranggotakan ratusan bahkan puluhan orang saja. Sebagai contoh Sukabumi memiliki anggota JAI 5.000 orang, Kuningan 3.000 orang, Medan 3000 orang, Garut 2.000 orang, dan Tangerang 1.000 orang, sedangkan di sebagian besar cabang lainnya, apalagi di luar Pulau Jawa, jumlah anggota JAI di masing-masing cabang hanya mencapai ratusan bahkan puluhan orang saja, seperti di Banjarnegara 663 orang, Padang 500 orang, Depok 500 orang, Makassar 500 orang, Jakarta Selatan 300 orang, Kabupaten Bandung 243 orang, Kota Tasikmalaya 200 orang, Talang 89 orang, Majalaya 80 orang, Cicalengka 74 orang, Cisarua Cimahi 40 orang, Tanjung Pinang 32 orang, Banjarmasin 23 orang, dan Lembang 4 orang. Dari contoh-contoh tersebut mungkin dapat diperkirakan jumlah anggota JAI di seluruh Indonesia berkisar antara 50 - 80 ribu orang.

Penolakan umat Islam terhadap Ahmadiyah telah terjadi sejak tahun 1930-an. Kemudian penolakan pun terjadi baik dalam bentuk keberatan maupun perusakan bangunan rumah, masjid dan mushalla milik Ahmadiyah di berbagai daerah, antara lain di Sumatera Timur (1953), Medan (1964), Cianjur (1968), Kuningan (1969), Nusa Tenggara Barat (1976), Kalimantan Tengah (1981), Sulawesi Selatan (1981), Kalimantan Barat, Surabaya, Parung, Bogor (1981), Riau, Palembang, Sumatera Barat, Timor Timur dan Jakarta (1990). Pada tahun 2000-an penolakan tersebut muncul kembali di beberapa daerah, seperti: Nusa Tenggara Barat (2002), Parung dan Bogor (2006), Kuningan, Majalengka, dan Sukabumi (2008). Semua penolakan ini hanya ditujukan kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia, yang mengusung faham bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi.

Sikap penolakan juga dilakukan dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pada tahun 1980 yang menyatakan bahwa Ahmadiyah Qodian adalah jemaah di luar Islam, sesat dan

menyesatkan, dan pada tahun 2005 yang menyatakan bahwa aliran Ahmadiyah Qodian dan Ahmadiyah Lahore adalah sesat dan menyesatkan. Fatwa yang sama juga dikeluarkan oleh MUI Aceh, MUI Sumatera Utara, MUI Riau, PB NU, Muhammadiyah, dan beberapa organisasi Islam lainnya. Beberapa Pemerintah Daerah melalui Kejaksaan Negeri telah melakukan pelarangan terhadap ajaran Ahmadiyah seperti di Subang, Meulaboh, Lombok Timur, Sindereng Rappang, Kerinci, Tarakan, dan Sumatera Utara.

Persoalan Ahmadiyah di Indonesia bertumpu pada keyakinannya yang mempercayai bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi yang mendapat wahyu dari Allah SWT. Keyakinan ini tentu saja bertentangan dengan paham kaum Sunni yang meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul penerima wahyu terakhir. Karena itu penyebaran paham Ahmadiyah di Indonesia adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, dan sekaligus meresahkan masyarakat serta memicu pertentangan dalam masyarakat yang pada gilirannya mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Banyak desakan dari kelompok-kelompok umat Islam agar JAI dibubarkan dengan alasan penodaan agama. Dasarnya ialah UU No.1/PNPS/1965. Demonstrasi-demonstrasi juga dilancarkan terutama pada tahun 2005 dan awal 2008 untuk menuntut pembubaran itu. Sementara itu sebagian kecil kelompok masyarakat menyarankan agar dilakukan dialog dengan pihak Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan JAI, Kementerian Agama bersama-sama dengan Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Mabes POLRI dan beberapa tokoh agama telah melakukan tujuh kali putaran dialog dengan Pengurus Besar JAI sejak tanggal 7 September 2007 sampai dengan 14 Januari 2008. Pertemuan tersebut menghasilkan 12 butir penjelasan PB JAI tentang pokok-pokok keyakinan dan kemasyarakatan warga JAI. Kedua belas butir itu ialah:

1. Kami warga Jemaat Ahmadiyah sejak semula meyakini dan

mengucapkan dua kalimah syahadat sebagaimana yang diajarkan oleh Yang Mulia Nabi Muhammad Rasulullah saw yaitu, *Asyhadu anlaa-ilaaha illallahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,* artinya: aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah.

2. Sejak semula kami warga Jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa Muhammad Rasulullah adalah *Khatamun Nabiyyin (nabi penutup).*
3. Di antara keyakinan kami bahwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang guru, mursyid, pembawa berita gembira dan peringatan serta pengemban *mubasysyirat,* pendiri dan pemimpin Jemaat Ahmadiyah yang bertugas memperkuat dakwah dan syiar Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.
4. Untuk memperjelas bahwa kata **Rasulullah** dalam 10 syarat bai'at yang harus dibaca oleh setiap calon anggota Jemaat Ahmadiyah bahwa yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW, maka kami mencantumkan kata **Muhammad** di depan kata **Rasulullah**.
5. Kami warga Jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa:
   a. Tidak ada wahyu syariat setelah Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw;
   b. Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Rasulullah saw adalah sumber ajaran Islam yang kami pedomani.
6. Buku Tadzkirah bukanlah kitab suci Ahmadiyah, melainkan catatan pengalaman rohani Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad yang dikumpulkan dan dibukukan serta diberi nama Tadzkirah oleh pengikutnya pada tahun 1935, yakni 27 tahun setelah beliau wafat (1908).
7. Kami warga Jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan mengkafirkan orang Islam di luar Ahmadiyah, baik dengan kata-kata maupun perbuatan.

8. Kami warga Jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan menyebut masjid yang kami bangun dengan nama **Masjid Ahmadiyah**.
9. Kami menyatakan bahwa setiap masjid yang dibangun dan dikelola oleh Jemaat Ahmadiyah selalu terbuka untuk seluruh umat Islam dari golongan manapun.
10. Kami warga Jemaat Ahmadiyah sebagai Muslim selalu melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama dan mendaftarkan perkara perceraian dan perkara-perkara lainnya berkenaan dengan itu ke kantor Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Kami warga Jemaat Ahmadiyah akan terus meningkatkan silaturrahim dan bekerjasama dengan seluruh kelompok/golongan umat Islam & masyarakat dalam perkhidmatan sosial kemasyarakatan untuk kemajuan Islam, bangsa & Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
12. Dengan penjelasan ini, kami Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB JAI) mengharapkan agar warga Jemaat Ahmadiyah khususnya dan umat Islam umumnya serta masyarakat Indonesia dapat memahaminya dengan semangat ukhuwah Islamiyah, serta persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam rangka memantau pelaksanaan 12 butir Penjelasan PB JAI di lapangan, Menteri Agama telah membentuk Tim Pemantau dan Evaluasi yang beranggotakan unsur-unsur dari Kementerian Agama, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, dan POLRI. Pemantauan dan evaluasi di lapangan dilakukan selama 3 bulan di 55 titik komunitas JAI, yang terdapat di 33 kabupaten/kota. Di samping itu Departemen Agama telah melakukan kajian terhadap 21 buah buku yang diterbitkan atau digunakan di kalangan JAI, dan sebuah buku berjudul *Al-Qur'an dengan Terjemahan dan Tafsir Singkat* yang diterbitkan oleh JAI.

Dari hasil pemantauan dan evaluasi di lapangan

disimpulkan bahwa warga JAI belum sepenuhnya melaksanakan 12 butir Penjelasan PB JAI. Beberapa butir telah sesuai dengan kenyataan di lapangan, yaitu: Butir 1 tentang syahadat, butir 4 tentang pencantuman kata "Muhammad" sebelum kata "Rasulullah" dalam naskah 10 syarat baiat JAI, butir 8 tentang penamaan masjid bukan dengan sebutan masjid Ahmadiyah, butir 9 tentang keterbukaan mesjid Ahmadiyah, butir 10 tentang pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pendaftaran perceraian di Kantor Pengadilan Agama, dan butir 11 tentang upaya meningkatkan silaturahmi dan bekerjasama dengan kelompok/golongan umat Islam dan masyarakat.

Sedangkan beberapa butir lainnya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, yaitu:

1. tetap meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad saw;
2. tetap meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi, Masih Mau'ud, dan Imam Mahdi;
3. tetap meyakini isi buku Tadzkirah tentang kewahyuan dan kebenarannya, termasuk klaim tentang kenabian Mirza Ghulam Ahmad di dalamnya.
4. tetap menafsirkan Al-Quran sesuai dengan Buku Tadzkirah;
5. tetap tidak bersedia bermakmum dalam shalat kepada orang Islam non-JAI karena dianggap kufur (ingkar) kepada kenabian Mirza Ghulam Ahmad yang berarti JAI mengkafirkan Muslim non-JAI secara perbuatan.

Dengan demikian, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi di lapangan tersebut, warga JAI masih menganut penafsiran keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam, bahkan secara sistematis terus berupaya mengusahakan dukungan umum untuk melakukan kegiatan dan penafsiran keagamaan yang menyimpang melalui buku-buku, dan pengiriman mubaligh-mubalighnya ke daerah-daerah. Di samping itu, mereka juga menyatakan tidak akan merubah dan tidak ada keinginan untuk merubah kegiatan dan penafsiran

keagamaan yang menyimpang tersebut, dan tidak perlu ada perubahan apapun sebagaimana disampaikan melalui surat dari PB JAI kepada Departemen Agama tanggal 21 Februari 2008 Nomor: 911/Amir/II/2008 dan keterangan Pimpinan PB JAI pada pertemuan dengan kepala Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama tanggal 10 Maret 2008, di Departemen Agama.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut, Rapat BAKOR PAKEM pada tanggal 16 April 2008 merekomendasikan kepada Pemerintah untuk mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri agar warga JAI diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam.

Untuk menindaklanjuti rekomendasi Bakor Pakem tersebut, beberapa Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan acuan adalah sebagai berikut:

a) Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28E, 28I, 28J dan 29 yang pada intinya bahwa setiap warga bebas dan berhak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang;

b) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 70 dan Pasal 73, yang mewajibkan setiap orang untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang, dan bahwa hak dan kebebasan setiap orang dapat dibatasi dengan Undang-Undang.

c) Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik,

dimana pada pasal 18 kovenan mengatur tentang kebebasan beragama, dan bahwa kebebasan tersebut dapat dibatasi dengan Undang-Undang.

d) Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang isinya setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceriterakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

d. Membangun Ukhuwah

Spirit Al-Qur'an ini menjadi landasan gerak dakwah seluruh ormas Islam. Dalam sejarahnya, ormas Islam memegang peran yang besar menginternalisasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tak bisa dipungkiri bahwa kemajuan bangsa sejak pergolakan kemerdekaan hingga kini tak bisa dilepaskan dari peran ormas Islam.

Gerak Ormas Islam dalam berdakwah berdampak besar bagi pencapaian pembangunan nasional. Kerukunan, pendidikan, kesejahteraan hingga keutuhan NKRI menjadi bukti luasnya wilayah peran ormas Islam. Dalam konteks kerukunan, ormas Islam adalah yang terdepan dalam membina dan menjaga keragaman bangsa ini dalam harmoni.

Hal terpenting yang dapat kita garisbawahi dari eksistensi ormas Islam adalah jalinan ukhuwah Islamiyyah sebagai landasan berdakwah. Tanpa ukhuwah, niscaya keberagaman di negeri ini akan memunculkan beragam konflik. Kedewasaan dan keluasan perilaku beragama menjadi ruh dalam jalinan ukhuwah ini.

Umat yang terkelompok dalam organisasi-organisasi Islam seharusnya saling bahu-membahu menyatukan berbagai potensi

yang ada menuju kesatuan yang kuat di tengah perbedaannya. Dalam kenyataan, kadang masih kita lihat antara yang satu dengan lainnya, di samping mempunyai perbedaan paradigma berfikir, juga perbedaan artikulasi kepentingan sehingga satu sama lain sulit saling memahami dan mencapai kompromi.

e. Kemitraan dengan Stake Holders

Melihat wilayah kerja yang luas dan problematika umat yang beragam, dibutuhkan tim yang bisa membantu mobilitas Bimas Islam. Keberadaan tim ditujukan agar program kerja yang telah disusun dapat bersinergi dengan kebutuhan umat. Melalui tim inilah Bimas Islam dapat menyentuh wilayah-wilayah yang tidak bisa disentuh sebelumnya. Di samping itu, secara organisatoris Bimas Islam tidak mungkin memegang aspek teknis kegiatan pengabdian. Keterbatasan SDM dan pertimbangan efektifitas adalah salah satu alasan pembentukan tim.

Untuk mewujudkan efektifitas kerja, Bimas Islam telah membuat beberapa lembaga yang akan mengurusi beberapa bidang kerja. Lembaga – lembaga tersebut tersebar secara luas dan mengakar pada seluruh lapisan masyarakat. Beberapa Lembaga keagamaan dan sasaran kerja di lingkungan Bimas Islam antara lain:

1) Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).
2) Forum Komunikasi Lembaga Dakwah (FKLD). Lembaga ini merupakan wadah bagi koordinasi dan komukikasi antar lembaga dakwah yang ada di Indonesia.
3) Lembaga Pembina Pengamalan Agama (LP2A). LP2A merupakan lembaga ketahanan yang kini telah terbentuk hingga ke desa-desa. Walau masih ada kendala dalam keorganisasian, LP2A merupakan tulang punggung Bimas Islam dalam pembinaan umat di tingkat desa.
4) Forum Komunikasi Da'i Muda Indonesia (FKDMI).
5) Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (LASQI).

Pengembangan seni budaya merupakan bagian dari upaya Bimas Islam membangun arus dakwah melalui seni.

6) Penyuluh Agama Fungsional (PAF).
7) Penyuluh Agama Honorer (PAH).
8) Hari-Hari Besar Islam (HBI).
9) Bimbingan dan Penyuluhan pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).
10) Forum Konsultasi dan Komunikasi Badan Pembina Rohani Islam (FOKKUS BABINROHIS) yang ada di semua tingkat birokrasi, militer dan BUMN.
11) BP4. Lembaga ini memiliki tugas sebagai mediator dan pembina perkawinan. Keberdaan BP4 telah menjadi brand bagi Departemen Agama, sehingga peran dan kedudukannya selalu ditingkatkan dari hari ke hari.
12) BAZNAS. Lembaga ini sesungguhnya independen dan diangkat langsung oleh presiden. Namun Bimas Islam tetap memiliki jalur koordinasi dalam pemberdayaan zakat sebagaimana tupoksi zakat juga berada dalam naungan Bimas Islam. Untuk itu Bimas Islam dalam hal ini berkedudukan sebagai fasilitator, motivator, dan regulator saja.
13) Badan Wakaf Indonesia (BWI). Seperti halnya BAZNAS, BWI juga independen. Bimas Islam memang sebagai pencetusnya, namun dalam hal ini hanya fungsi kordinatif dan pengawasan saja.

Bimas Islam masih memiliki lembaga-lembaga lain yang bertugas di bidang-bidang tertentu. Ke depan Bimas Islam tengah membangun arah pembentukan lembaga-lembaga yang ada di bawah Bimas Islam menjaid lembaga nasional dan diangkat langsung oleh presiden, salah satunya adalah Badan Hisab-Rukyat (BHR).

D. Memberdayakan Penyuluh Agama Profesional

Pelaksanaan Penyuluh Agama Islam merupakan ujung tombak Kementerian Agama yang berada di garda terdepan dalam pembinaan umat. Penyuluh Agama Islam, baik yang fungsional maupun honorer, bertugas memberikan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat di tingkat *grasroot.*

a. Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama Islam

Berdasarkan perundang-undangan, fungsi Penyuluh diantaranya: *Pertama,* **Fungsi Informatif dan Edukatif**: Penyuluh Agama Islam memposisikan sebagai da'i yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran agama. *Kedua,* **Fungsi Konsultatif**: Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai anggota masyarakat umum. *Ketiga,* **Fungsi Advokatif**: Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan aqidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak".

Data Kementerian Agama menunjukkan jumlah PAI sebanyak 95.814 orang, terdiri dari Penyuluh Non PNS (PAH) sebanyak 91.798 orang dan Penyuluh PNS (PAF) sebanyak 4.016 orang (4%).

Jika madrasah bergerak pada pembinaan pendidikan formil, maka PAI bergerak pada pendidikan non formil seperti pembinaan majelis taklim, remaja masjid dan kelompok masyarakat secara luas. Pendidikan non formil selama ini belum mendapatkan perhatian secara maksimal. Berbeda dengan pendidikan formal, pendidikan non formal belum terdukung oleh manajerial dan ketersediaan anggaran serta SDM yang

mencukupi. Masih terkesan berjalan sendiri-sendiri, belum terbentuk satu manajerial yang mencerminkan profesionalitas.

Pendidikan non formal yang secara tidak langsung menjadi tangggung jawab para penyuluh memiliki peran yang sangat luas dalam pembangunan bangsa yang kuat, terutama dari aspek kehidupan keagamaan. Seperti kita ketahui bersama, dalam beberapa tahun belakang bangsa ini "seakan" dikepung oleh beragam masalah sosial keagamaan. Dimulai radikalisme, ekstrimisme dan kerukunan intra dan antar umat beragama. Padahal, NKRI selama ini dibangun di atas prinsip toleransi dan kebersamaan.

Beban tugas penyuluh agama dalam masa pembangunan dewasa ini, dituntut agar mampu menyebarkan segala aspek pembangunan melalui pintu agama agar penyuluhan dapat berhasil, maka seorang penyuluh agama harus dapat memahami materi dakwah, menguasai betul metode dakwah dan teknik penyuluhan, sehingga diharapkan seorang penyuluh agama dapat mencapai tujuan da'wah yaitu dapat mengubah masyarakat sasaran kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera lahir maupun batin. Wajar kiranya penyuluh agama diharapkan dapat berperan pula sebagai motivator pembangunan.

Tugas penyuluh agama sangat penting karena pembangunan tidak semata-mata membangun manusia dari aspek lahiriah dan jasmani saja, melainkan juga membimbing dan membangun aspek rohaniah, mental spiritualnya yang dilaksanakan secara simultan. Para penyuluh, tokoh agama dan ormas Islam harus bersinergi membangun dakwah sekaligus meredam munculnya potensi konflik di masyarakat.

b. Penguatan Peran PAI di Masyarakat

Peran Penyuluh Agama Islam (PAI) kini tidak lagi sebatas bergerak pada bidang pembinaan keagamaan. Para penyuluh tidak lagi sebatas berdakwah di masjid, musholla maupun majelis

taklim, melainkan juga berperan dalam pengembangan bidang-bidang kemasyarakatan agar dakwah lebih luas maknanya dan berdampak bagi perubahan di masyarakat. Di sinilah para penyuluh harus berkarakter, memiliki inisiatif dan inovatif dalam memberi warna bagi pengembangan di masyarakat.

Dewasa ini, Direktorat Penerangan Agama Islam telah menjalankan berbagai program berkaitan dengan pengembangan peran penyuluh agama Islam melalui pasrtisipasi aktif dalam bidang-bidang pengembangan masyarakat. Sebagai contoh, dalam tiga tahun ini para penyuluh diberikan pelatihan entrepreneur khususnya di daerah transmigrasi, pelayanan konseling pada LAPAS serta pelatihan pendampingan pengembangan usaha kecil.

Kebijakan ini sejalan dengan visi pengembangan penyuluhan agama Islam yaitu meningkatkan partisipasi secara luas para penyuluh agama Islam dalam pengembangan masyarakat. Menurutnya, kebijakan ini mendorong para penyuluh berperan aktif dalam berbagai aspek pengembangan kemasyarakatan, baik ekonomi, sosial-budaya maupun pendidikan. Bahkan, para penyuluh pada LAPAS menegaskan bahwa keberadaannya begitu sangat dibutuhkan lintas sektoral. Sebagai catatan, para Penyuluh Agama Islam (PAI) di Provinsi Yogyakarta misalnya, memiliki 13 LAPAS binaan, terdiri dari 8 LAPAS Umum dan 5 LAPAS Narkotik. Materi yang disampaikan diantaranya membaca al-Qur'an, bimbingan ibadah, dan bimbingan mental-spiritual. Dengan kehadiran penyuluhan agama di LAPAS, hal ini sangat membantu pemulihan sebelum mereka kembali ke masyarakat.

Dalam mengimbangai arus modernitas dan tuntutan masyarakat, para dai/penyuluh agama Islam harus peka terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga dakwah tidak lagi monoton melainkan sangat variatif dan solutif. Dai/penyuluh bisa berperan dalam pengembangan ekonomi, sosial-budaya dan lainnya. Selain akan meningkatkan kepercayaan masyarakat,

para penyuluh akan semakin strategis posisinya dalam arus perubahan di masyarakat.

Dalam catatan Bimas Islam, terdapat beberapa contoh peran penyuluh dalam pengembangan masyarakat, diantaranya pembinaan dan pendampingan PSK di Kabupaten Cirebon, pendampingan usaha kecil dan kelompok di Kabupaten Tasikmalaya, penyuluhan pada LAPAS di Yogyakarta serta pendampingan usaha pada masyarakat transmigrasi di Provinsi Bengkulu.

E. Penyelenggaraan MTQ: Pesan Kedamaian dalam Keragaman

MTQ adalah even yang telah rutin kita selenggarakan. MTQ ini telah menjadi kegiatan rutin yang diselenggarakan. Karena sifatnya rutin, maka penyelenggaraan MTQ adalah sebuah momen yang sangat dinanti kehadiranya. Atas dasar itu pula kesuksesan penyelenggaraan MTQ menjadi garansi yang wajib disuguhkan. Jangan sampai momen rutin ini tercoreng citranya.

Setidaknya ada dua makna penyelenggaraan MTQ ini. *Pertama,* bagi internal umat Islam, MTQ adalah momen untuk membangkitkan semangat mendalami dan mengkaji Al-Qur'an. Pada dasarnya MTQ adalah momen untuk membangun kesadaran dan kepeduliaan terhadap Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk umat Islam. Dalam MTQ tersimpan semangat untuk meningkatkan rasa cinta terhadap Al-Qur'an. Perlombaan-perlombaan dalam MTQ bertujuan agar tiap-tiap jengkal dari Al-Qur'an dapat semakin dekat dengan hati umat Islam.

Saat ini di beberapa tempat, Al-Qur'an sudah mulai jarang terdengar dikumandangkan. Dahulu setelah magrib para remaja ramai-ramai mengaji Al-Qur'an. Suara gaduh oleh bacaan Al-Qur'an adalah pemandangan biasa di mushalla dan masjid. Namun hal itu kini mulai tergantikan oleh alunan musik. Masjid, mushalla, langgar, ataupun surau sepi dari aktifitas pengajian.

Di tempat lain, kajian terhadap Al-Qur'an pun masih kurang dari memuaskan. Masih banyak umat Islam yang hanya mengenal Al-Qur'an sebatas bacaannya saja. Sementara isinya tidak mendapat perhatian. Padahal dalam Al-Qur'an terpendam nilai-nilai agung yang jika diterpkan dalam kehidupan, maka yang membacanya akan mendapatkan penerang. Hidupnya akan bahagia karena dibimbing oleh Al-Qur'an.

Melalui perhelatan MTQ yang di dalamnya terdapat perlombaan tafsir, tahfidz, dan sejeninya kita diajak untuk terus menumbuhkan kecintaan membaca Al-Qur'an sekaligus mengkaji isinya. Kita hendak mengajak para generasi Islam untuk terus meningkatkan semangat mengkaji Al-Qur'an. Diharapkan para generasi muda kita memiliki kecintaan sekaligus semangat untuk mengkaji Al-Qur'an lebih mendalam lagi. Ini menjadi titik perhatian kita semua.

Kedua, MTQ adalah momen tepat untuk menyampaikan Islam yang damai dan bersahabat, kapanpun dan di manapun. Kita tentunya miris melihat stigma negatif yang akhir-akhir ini dialamatkan kepada Islam. Beberapa tragedi yang menjurus pada teror masih saja dialamatkan kepada Islam. Bahkan Islam di beberapa tempat dijadikan sebuah phobia, sebuah ketakutan. Islam ditakuti karena sikapnya yang intoleran, keras terhadap perbedaan, dan sikap-sikap negatif lainnya.

Citra ini jelas merugikan umat Islam. Sebagai agama yang dibawa dengan semangat persamaan, toleransi, dan pembelaan terhadap hak-hak dasar kehidupan, adalah sangat salah tatkala menjadikan Islam sebagai bagian dari teror, gerakan intoleran, ataupun anti perbedaan. Karena sejarah mencatat bahwa Islam adalah sebuah agama yang mampu menciptakan perubahan mendasar dalam tata kehidupan bangsa Arab yang saat itu tengah mengalami dekadensi moralitas di berbagai segi. Maka, mengalamatkan berbagai tindakan negatif terhadap Islam sungguh sangat bertentangan dengan fakta sejarah.

MTQ adalah momen untuk menepis semua anggapan negatif tersebut. Kita ingin membuktikan bahwa Islam penuh dengan rasa perdamaian, persaudaraan, dan persamaan hak. Islam tidak mengakui kekerasan sebagai sebuah jala kehidupan. MTQ dengan segala perhelatan yang ada di dalamnya, menyampaikan pesan-pesan damai. Alunan indah suaru qari dan qariah akan mengikis segala kesan negatif terhadap Islam. Begitu pula dengan fahmil qur'an maupun tafsir Al-Qur'an, kesemuanya menyampaikan bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan nilai-nilai agung jika saja manusia menggalinya.

Jika kita maknai secara mendalam, even MTQ adalah ajakan dan seruan bagi seluruh umat manusia untuk menjunjung tinggi universalitas nilai-nilai kebaikan, perdamaian, toleransi dan hak-hak kemanusiaan. Al-Qur'an sebagai inspirasi dan *guide* bagi umat Islam khususnya dan manusia umumnya, berisi ajaran mulia. Al-Qur'an mengajarkan ketulusan dalam berbagi, bersahabat dengan keramahan, toleran dalam keragaman, berbagi dalam keserderhanaan; Al-Qur'an pun mengajak manusia untuk menjadi pribadi yang berkarakter positif, menjadi motivator bagi lingkungan, inspirator bagi kemajuan dan dinamisator.

Mungkin kita terhenyak ketika stigma negatif terhadap umat Islam begitu deras akibat ulah segelintir saudara kita yang melakukan tindak kekerasan. Hujatan, hinaan dan bahkan tuduhan terus menggempur umat Islam di seluruh penjuru dunia. Islam berhasil digambarkan sebagai agama kekerasan, teroris dan sejuta atribut negatif lainnya. Celakanya, Al-Qur'an menjadi pusat stigma negatif ini, bahwa Al-Qur'an mengajarkan kekerasan, membunuh dan berperang. Stigma negatif ini sangat jahat, merusak citra yang selama ini sudah kita bangun.

Keadaan ini menjadi sangat tidak mengenakan bagi kita. Sebagai pemeluk mayoritas, tentunya kita terus menjadi sorotan. Sekecil apapun kesalahan kita, akan disorot secara luas oleh masyarakat luas. Dan ini adalah sebuah resiko yang tak perlu

kita ratapi, melainkan kita jawab dengan sikap dan perilaku yang lebih baik.

Melalui even MTQ kita pertegas bahwa Al-Qur'an bukanlah musuh bagi keragaman, bukan ancaman bagi demokrasi. Akan tetapi Al-Qur'an adalah sahabat bagi semua manusia, inspirator dan motivator bagi perdamaian manusia. Negeri Madinah sebagai *propotype* bangsa multikultural adalah bukti bahwa Al-Qur'an mengakui keragaman, menjaga semua agama, bersahabat dengan siapapun selama tidak mengajak bermusuhan.

Harus diakui bahwa dalam penyelenggaraan MTQ masih terdapat beberapa sisi yang harus dibenahi. Hal ini bertujuan agar MTQ semakin baik penyelenggarannya, sehingga meninggalkan kesan positif bagi yang melihatnya. Adanya kritik dari masyarakat terhadap penyelenggaraan MTQ adalah sebuah pesan positif bahwa umat kita memiliki perhatian yang besar terhadap event MTQ ini. Ini harus kita tindak lanjuti dengan sikap terbuka menerima masukan, karena bisa saja masukan tersebut baik untuk kemajuah penyelenggaraan MTQ ke depan[]

4

PENUTUP

Radikalisme Agama adalah fenomena sosial di masyarakat yang terkait dengan berbagai faktor: politik, ekonomi, sosial-budaya dan juga paham keagamaan. Membaca fenomena Radikalisme agama tidak bisa parsial, akan tetapi harus secara jeli dan komperehensif. Hal ini untuk menghindari kesalahan dalam menyikapi yang akan berdampak terhadap keutuhan umat, bangsa dan negara.

Islam sebagai agama telah berbuat nyata dalam membangun kerukunan dalam keragaman nusantara. Para ulama, tokoh agama dan Ormas Islam bahu membahu membangun dan menjaga keragaman Nusantara dalam bingkai keislaman yang moderat. Di sinilah bangsa Indonesia tumbuh sebagai motivator sekaligus *prototype* moderasi Islam, sebuah nilai yang menempatkan Islam sebagai nilai yang memberi warna dan pencerahan bagi pembangunan bangsa dan negara tanpa menegasikan keragaman yang ada.

Kita patut bangga sekaligus *aware* terhadap kualitas kehidupan beragama bangsa Indonesia. Kebanggan harus ditumbuhkan agar tetap terjaga semangat untuk terus mengkreasi langkah-langkah penguatan kerukuann, sekaligus membangun *aware* bahwa terdapat banyak ancaman bagi kerukunan bangsa Indonesia.

Fenomena radikalisme agama belakangan ini semakin populer, baik global maupun lokal. Agama yang seharusnya menjadi *drive* hidup yang ramah dan toleran justru menjadi pemicu timbulnya kekerasan dan teror. Dalam konteks ini berarti ada kesalahan dalam pemahaman dan implementasi ajaran yang sangat fundamental.

Dalam penggalan sejarah Islam memang telah muncul bibit-bibit radikalisme akibat dari perbedaan politik. Namun demikian, arus gerakan itu sesungguhnya sangat kecil. Hanya saja, gerakan mereka selalu mencuri momentum dunia sehingga mendapatkan perhatian publik yang memperburuk citra Islam.

Jika fenomena ini dibiarkan dan tidak ada upaya untuk mencegah dan ditangani secara holistic dan sinergis antar lembaga terkait, maka sangat mungkin gerakan ini akan membesar dan menjadi ancaman yang serius bagi NKRI dan *Islam rahmatanlil-'alamin.*

Oleh sebab itu, semua pihak harus mengambil bagian agar gerakan ini tidak menyebar dan merusak tatanan kebangsaan kita. Sekecil apapun peran yang diberikan untuk mencegah gerakan ini patut diberikan apresiasi.

Buku ini merupakan hasil Seminar Nasional tentang Fenomena ISIS yang diselenggarakan oleh Ditjen Bimas Islam pada 9 Agustus 2014 yang disempurnakan. Buku ini memberikan gambaran tentang seluk beluk radikalisme agama dan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulanginya.

Diterbitkan
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Kemenag RI Tahun 2014
Jl. M. H. Thamrin No. 6 Jakarta 10340
bimasislam.kemenag.go.id

ISBN: 978-602-71756-0-0